



SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2021

# RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

TAHUN 2021

**RENSTRA**  
PERIODE 2018 -2023



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ucapan Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas Ijin, Perkenan dan Rahmat-Nya, sehingga Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 (RENSTRA Perubahan Tahun 2021) Sekretariat Daerah Kota Bandung pada rangkaian Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 (RENSTRA Perubahan Tahun 2021) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, disebabkan oleh Perubahan RPJMD sehingga berpengaruh pada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah pada tahun 2021, Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 ini merupakan komitmen seluruh unit kerja atau Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam pencapaian sasaran dan program dalam 3 (tiga) tahun kedepan dalam cakupan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018 - 2023.

Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kota Bandung dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 (RENSTRA Perubahan Tahun 2021) Sekretariat Daerah Kota Bandung ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan setiap unit kerja atau Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 (RENSTRA Perubahan Tahun 2021) tersebut, besar harapan Sekretariat Daerah untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kota Bandung dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Bandung.

Bandung, 7 Desember 2021  
**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDUNG**

  
**Drs. H. EMA SUMARNA, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661207 198603 1 006



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG .....</b>	<b>8</b>
2.1 Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung .....	8
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Bandung .....	22
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	22
2.2.2 Sarana Dan Prasarana Kerja .....	25
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung .....	25
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung .....	41
2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung .....	44
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>50</b>
3.1 Permasalahan Pembangunan .....	50
3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	51
3.2.1 Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung .....	53
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	55
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Pemerintah Provinsi .....	60
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	67
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung.....	79
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>83</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Bandung .....	83
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>87</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>97</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>388</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>391</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan .....	23
Tabel 2. 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan .....	24
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Sekretariat Daerah Kota Bandung Sampai Dengan Tahun 2018.....	25
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2019 -2023 .....	26
Tabel 2. 5 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2021 .....	41
Tabel 2. 6 Rekapitulasi Anggaran dan Rata-Rata Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2020.....	42
Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 .....	43
Tabel 2. 8 Tantangan dan Peluang Sekretariat Daerah Kota Bandung .....	44
Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.....	51
Tabel 3. 2 Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih .....	58
Tabel 3. 3 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong .....	63
Tabel 3. 4 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat .....	75
Tabel 3. 5 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis.....	80
Tabel 3. 6 Penjabaran Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah .....	81
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran (Sebelum Perubahan) Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 .....	84
Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran (Setelah Perubahan) Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 .....	85
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (Iku) (Sebelum Reviu) Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2021- 2023.....	86
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (Iku) (Setelah Reviu) Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2018 - 2023.....	86
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Bandung .	88
Tabel 5. 2 Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Bandung .....	96
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Bandung 2018-2023 .....	99
Tabel 6. 2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) Sekretariat Daerah Kota Bandung .....	265
Tabel 6. 3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Berdasarkan KEPMEN Nomor 050-3708 Tahun 2020) Sekretariat Daerah Kota Bandung.....	325



Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Sebelum Reviu) .....	389
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Setelah Reviu) .....	390



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah .....	2
Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Ban .....	10
Gambar 3. 1 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung .....	69
Gambar 3. 2 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung .....	70
Gambar 3. 3 Isu Strategis Kota Bandung.....	80



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung dilakukan secara simultan. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbang Kota Bandung.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung 2018- 2023 memiliki keterkaitan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, program dan kegiatan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, ilustrasi keterhubungan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1. 1**  
**Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah**



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, landasan hukum tersebut yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
- u. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
- v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



- Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
  - y. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  - z. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018- 2023;
  - aa. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1376 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Staf Ahli Wali Kota Bandung;
  - bb. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 635 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  - cc. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 636 Tahun 2017 tentang Pengoordinasian Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
  - dd. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Sekretariat Daerah Kota Bandung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam menentukan prioritas



program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung, keterkaitan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan RPJMD, dan keterkaitan renja, RKT dengan Renstra.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG**

Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi PD, sumber daya PD, kinerja pelayanan PD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.



**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG**

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat penjabaran tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah yang hendak dicapai.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Sedangkan Kebijakan yaitu arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG**

#### **2.1 Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung**

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, pendukung Kepala Daerah dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian asisten dan seluruh perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dengan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 635 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung, kemudian diubah dan diatur kembali pada

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung, dalam melaksanakan tugas tersebut maka Sekretariat Daerah Kota Bandung menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah Kota; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung terdiri atas :

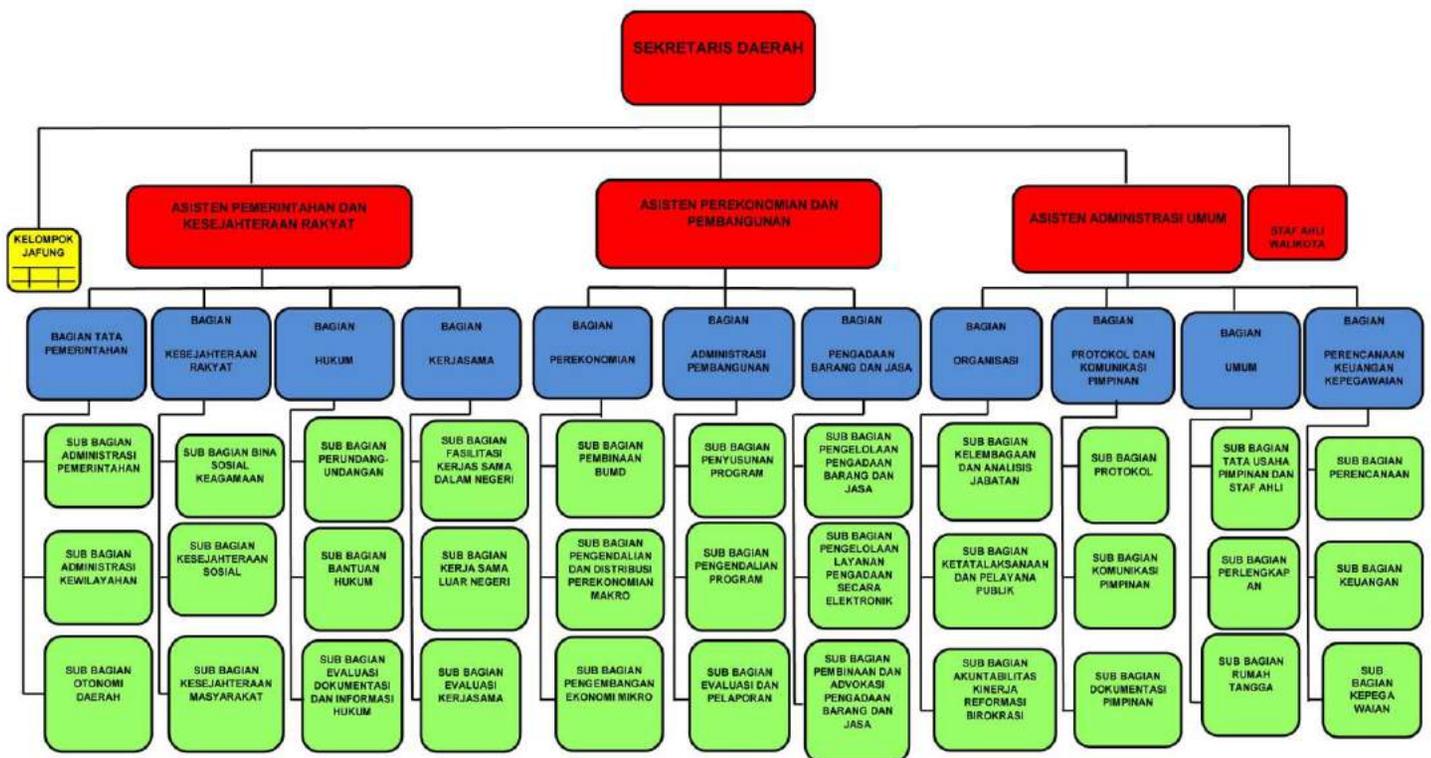
- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
  1. Bagian Tata Pemerintahan, yang terdiri atas:
    - a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
    - b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
    - c. Sub Bagian Otonomi Daerah.



2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Bina Sosial Keagamaan;
  - b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
  - c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
3. Bagian Hukum, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
  - b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
  - c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
4. Bagian Kerja Sama, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri;
  - b. Sub Bagian Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri; dan
  - c. Sub Bagian Evaluasi Kerja Sama.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
  1. Bagian Perekonomian, terdiri atas :
    - a. Sub Bagian Pembinaan BUMD;
    - b. Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Makro; dan
    - c. Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Mikro.
  2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
    - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b. Sub Bagian Pengendalian Program; dan
    - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :
    - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
    - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengaduan Secara Elektronik; dan
    - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
  1. Bagian Organisasi terdiri atas :
    - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
    - c. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
  2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
    - a. Sub Bagian Protokol;
    - b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
    - c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
  3. Bagian Umum, terdiri atas :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
    - b. Sub Bagian Perlengkapan; dan

- c. Sub Bagian Rumah Tangga.
- 4. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- e. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 2. 1**  
**Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Ban**



Sumber : Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 635 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung, sebagai berikut:

- 1). Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
  - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan serta administrasi umum;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - d. mengoordinasikan fasilitasi dan evaluasi BUMD;
  - e. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD dan perubahan APBD;



- f. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan RPJMD dan RPJPD, LKIP Sekretariat Daerah, Penetapan kinerja Sekretariat Daerah, bahan LKPJ Wali Kota, bahan LPPD dan bahan IPPD;
  - g. membina manajemen kepegawaian daerah;
  - h. membina manajemen keuangan daerah;
  - i. membina manajemen pengelolaan BMD/aset daerah;
  - j. membina pengembangan sistem informasi manajemen Pemerintahan Daerah Kota;
  - k. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, instansi pemerintah dalam dan luar negeri dan/atau swasta;
  - l. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
  - m. mengoordinasikan pelayanan administrasi Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah;
  - n. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan, dan laporan yang tidak menjadi kewenangan Perangkat Daerah;
  - o. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
  - p. melaksanakan hubungan kerja penyelenggaraan pemerintahan dan urusan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2). Uraian tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama;
  - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Daerah;
  - c. memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
  - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah lingkup tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan penyelenggaraan kerja sama;
  - e. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;



- f. melaksanakan hubungan kerja penyelenggaraan pemerintahan dan urusan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - Uraian tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut:
    - a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penilaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan;
    - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Daerah;
    - c. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup tata pemerintahan;
    - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan kesekretariatan DPRD dan kecamatan;
    - e. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan lingkup administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
    - f. mengoordinasikan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    - g. mengoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah;
    - h. menyelenggarakan penataan batas Daerah Kota dan batas wilayah;
    - i. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi potensi dan monitoring pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
    - j. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
    - k. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;



- l. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Uraian tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penilaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Daerah;
  - c. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata dan transmigrasi;
  - e. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat lingkup bina sosial keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  - f. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup bina sosial keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  - g. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Uraian tugas Kepala Bagian Hukum adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penilaian kinerja Bagian Hukum;



- b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Daerah;
  - c. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup hukum;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah lingkup perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi, dokumentasi dan informasi hukum;
  - e. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Hukum lingkup perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi, dokumentasi dan informasi hukum;
  - f. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah;
  - g. mengoordinasikan penataan peraturan perundang-undangan;
  - h. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Wali Kota, Rancangan Keputusan Wali Kota dan/atau peraturan pelaksanaan kebijakan daerah lainnya;
  - i. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum atas terjadinya perkara;
  - j. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup perundang-undangan, bantuan hukum, evaluasi, dokumentasi dan informasi hukum;
  - k. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - l. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Uraian tugas Kepala Bagian Kerja Sama adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penilaian kinerja Bagian Kerja Sama;
  - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Daerah;
  - c. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup kerja sama;



- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah lingkup fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
  - e. mengoordinasikan peningkatan kerja sama Pemerintah Daerah Kota;
  - f. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Kerja Sama lingkup fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
  - g. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
  - h. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3). Uraian tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
  - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Daerah;
  - c. memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
  - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah lingkup perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
  - e. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - f. melaksanakan hubungan kerja penyelenggaraan pemerintahan dan urusan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- Uraian tugas Kepala Bagian Perekonomian adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penilaian kinerja Bagian Perekonomian;
  - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Daerah;
  - c. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup perekonomian;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan dan perindustrian;
  - e. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pembinaan BUMD, pengendalian dan distribusi perekonomian makro dan pengembangan ekonomi mikro;
  - f. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup pembinaan BUMD, pengendalian dan distribusi perekonomian makro dan pengembangan ekonomi mikro;
  - g. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Uraian tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penilaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan;
  - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Daerah;
  - c. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup administrasi pembangunan;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,



- pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. menyelenggarakan peningkatan desain dan administrasi pembangunan;
  - f. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi program dan kegiatan lingkup penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
  - g. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
  - h. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Uraian tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penilaian kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Daerah;
  - c. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup pengadaan barang dan jasa;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah lingkup pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  - e. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa lingkup pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  - f. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan lingkup pengadaan barang/jasa;



- g. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota
  - h. menetapkan kelompok kerja pemilihan untuk kegiatan pemilihan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  - j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Uraian tugas Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan, keuangan dan kepegawaian;
  - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Daerah;
  - c. memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
  - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah lingkup umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan, keuangan dan kepegawaian;
  - e. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - f. melaksanakan hubungan kerja penyelenggaraan pemerintahan dan urusan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- Uraian tugas Kepala Bagian Organisasi adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penilaian kinerja Bagian Organisasi;
  - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Daerah;
  - c. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup organisasi;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan penyelenggaraan pengawasan;
  - e. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Organisasi lingkup kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
  - f. mengoordinasikan penataan dan penguatan kelembagaan;
  - g. mengoordinasikan penataan tatalaksana dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - h. mengoordinasikan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi dan reformasi birokrasi;
  - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
  - j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Uraian tugas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penilaian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
  - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Daerah;



- c. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup protokol dan komunikasi pimpinan;
  - d. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup protokol dan komunikasi pimpinan;
  - e. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan kegiatan pimpinan;
  - f. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup protokol dan komunikasi pimpinan;
  - g. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Uraian tugas Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penilaian kinerja Bagian Umum;
  - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Daerah;
  - c. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup tata usaha pimpinan dan staf ahli, perlengkapan dan rumah tangga;
  - d. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup tata usaha pimpinan dan staf ahli, perlengkapan dan rumah tangga;
  - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah lingkup tata usaha pimpinan dan staf ahli, perlengkapan dan rumah tangga;
  - f. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - g. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- Uraian tugas Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penilaian kinerja Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian;
  - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Sekretariat Daerah;
  - c. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan, keuangan dan kepegawaian;
  - d. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup perencanaan, keuangan dan kepegawaian;
  - e. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
  - f. mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja daerah lingkup Sekretariat Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah lingkup Sekretariat Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kebijakan lingkup perencanaan, keuangan dan kepegawaian;
  - i. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Staf Ahli Wali Kota mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Staf Ahli Wali Kota terdiri dari :

1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan



3. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Staf Ahli Wali Kota masing-masing mempunyai fungsi:
  - a. Pengkajian, telaahan dan indentifikasi permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
  - b. Pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan pokok permasalahan;
  - c. Penganalisaan pokok permasalahan berdasarkan kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Penyusunan kesimpulan, pertimbangan dan saran tindak kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
  - e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir tahun kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Bandung**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 270 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Sekretaris Daerah, sebanyak 3 orang (1,11 %) merupakan Staf Ahli Wali Kota, sebanyak 65 orang ( 24,07 %) merupakan Asisten Daerah bersama pegawai pada Asisten Pemerintahan dan Kesra, sebanyak 61 orang (22,59 %) merupakan Asisten Daerah dan pegawai di Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dan sebanyak 140 orang ( 51,85 %) merupakan Aisten Daerah dan pegawai di Asisten Administrasi Umum .

Jumlah pejabat Pimpinan Tinggi Utama terdiri dari satu orang yaitu Sekretaris Daerah, Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pegawai setingkat eselon II sebanyak 6 pejabat, terdiri dari Asisten Pemerintahan & Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum dan 3 (tiga) orang Staf Ahli Wali Kota. Untuk jabatan Administrator atau setingkat Eselon III sebanyak 11 orang terdiri dari Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dan jabatan Pengawas atau setingkat eselon IV sebanyak 33 orang yaitu terdiri dari Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung. Jabatan Pelaksana sebanyak 219 orang dengan alokasi terbanyak terdapat pada Bagian Umum sejumlah 73 orang (33,33 %) dari jumlah total Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.



Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 1**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan**

No	Uraian	JPT Utama	JPT Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	-	1
2	<b>Asisten Pemerintahan dan Kesra</b>	-	1	-	-	-	1
3	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	1	3	8	12
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	1	3	12	16
5	Bagian Hukum	-	-	1	3	20	24
6	Bagian Kerja Sama	-	-	1	3	8	12
7	<b>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</b>	-	1	-	-	-	1
8	Bagian Perekonomian	-	-	1	3	8	12
9	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	1	3	8	12
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	1	3	32	36
11	<b>Asisten Administrasi Umum dan</b>	-	1	-	-	-	1
12	Bagian Organisasi	-	-	1	3	17	21
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	1	3	14	18
14	Bagian Umum	-	-	1	3	73	76
15	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	-	-	1	3	19	23
16	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	-	1	-	-	-	1
17	Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan sumber Daya Manusia	-	1	-	-	-	1
18	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	-	1	-	-	-	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>219</b>	<b>270</b>

Sumber : Bagian Perkapreg, Sub Bagian Kepegawaian ( TW 3 Tahun 2021)

**Tabel 2. 2**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan**

No	Uraian	SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	<b>Asisten Pemerintahan dan Kesra</b>	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	4	-	2	4	2	-	12
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	3	1	-	9	3	-	16
5	Bagian Hukum	-	-	3	-	-	18	3	-	24
6	Bagian Kerja Sama	-	-	3	-	-	6	3	-	11
7	<b>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</b>	-	-	-	-	-	1	-	-	1
8	Bagian Perekonomian	1	-	-	2	-	6	3	-	12
9	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	2	-	-	8	2	-	12
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	2	1	-	25	8	-	36
11	<b>Asisten Administrasi Umum dan</b>	-	-	-	-	-	-	1	-	1
12	Bagian Organisasi	-	-	-	3	2	11	5	-	21
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	2	1	3	10	2	-	18
14	Bagian Umum	4	4	34	3	7	19	6	-	77
15	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	-	-	4	4	2	9	4	-	23
16	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	1	1
17	Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	1	-	1
18	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>57</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>126</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>270</b>

Sumber : Bagian Perkapeg, Sub Bagian Kepegawaian ( TW 3 Tahun 2021)



Dari seluruh jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kota Bandung, sebanyak 1 orang ( 0,37 %) memiliki pendidikan S3, Pegawai yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 46 orang (17,03 %), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 126 orang (46,67 %), yang memiliki pendidikan D4 sebanyak 16 orang (5,92 %), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 15 orang ( 5,56 %), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 57 orang (21,11%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 4 orang (1,48 %) dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 5 orang ( 1,85 %).

### 2.2.2 Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kota Bandung dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung, data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir :

**Tabel 2. 3**  
**Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Sekretariat Daerah Kota Bandung**  
**Sampai Dengan Tahun 2018**

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Kendaraan Roda 4	70	Baik
2	Kendaraan Roda 2	136	Baik
3	AC	91	Baik
4	Lemari/Rak/Buffet/Filling Cabinet	59	Baik
5	Brankas	2	Baik
6	Meja	38	Baik

Sumber : Bagian Umum (Sub Bagian Aset)

### 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2014-2018 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2014-2018 menurut indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 2. 4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2019 -2023**

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



4.	Jumlah Dokumen Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bandung				1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%									
5.	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik				33.33	50.00	n/a	n/a	n/a	46.66	63.33	n/a	n/a	n/a	139,99%	126,66%	n/a	n/a	n/a
6.	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah				1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%									
7.	Persentase Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Jumlah Dokumen Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah				1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%									
8.	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi dan Identikasi Nama Rupabumi				1 Dokumen	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a
9.	Persentase terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilpres, Pileg dan Pilkada				n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%
10.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pilpres, Pileg dan Pilkada				n/a	n/a	n/a	n/a	1 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	100%



Bagian Kesejahteraan Rakyat																			
11. Jumlah Rancangan Kebijakan bidang Sosial kemasyarakatan dan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Masalah Sosial, Kemasyarakatan dan Penanggulangan Kemiskinan					2 dok	-	-	-	-	2 dok	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi lingkup bina sosial keagamaan					4 keg	4 keg	-	-	-	4 keg	4 keg	-	-	-	100%	100%	-	-	-
12. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan Sosial Budaya					2 keg	2 keg	-	-	-	2 keg	2 keg	-	-	-	100%	100%	-	-	-
13. Persentase Rancangan Kebijakan bidang Sosial kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan ditindaklanjuti					-	25%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-
14. pan pelayanan administrasi perkantoran					-	-	100%	100%	100%	-	-	50% (Tw2)	-	-	-	-	50% (Tw2)	-	-
15. pan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	-	100%	100%	100%	-	-	50% (Tw2)	-	-	-	-	50% (Tw2)	-	-



16.	pan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				-	-	100%	100%	100%	-	-	0 (Tw2)	-	-	-	-	0 (Tw2)	-	-
17.	Persentase permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang diselesaikan lingkup sosial keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat						100%	100%	100%	-	-	50% (Tw2)	-	-	-	-	50% (Tw2)	-	
<b>Bagian Hukum</b>																			
18.	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19.	Jumlah sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah				-	8	8	15	8	-	8	8	15	8	100%	100%	100%	100%	100%
20.	Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasikan				-	16	18	15	16	-	16	18	15	16	100%	100%	100%	100%	100%
21.	Rancangan Produk Hukum yang ditetapkan				-	115	17	30	100	-	115	17	30	100	100%	100%	100%	100%	100%
22.	Dokumen Laporan penyuluhan hukum terpadu dan pembinaan keluarga sadar hukum				-	11	16	21	13	-	11	16	21	13	100%	100%	100%	100%	100%



	(Kadarkum)																		
23.	Dokumen Laporan pelaksanaan HAM bagi aparat	-	1	1	1	4	-	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%			
24.	Dokumen Laporan penanganan perkara	-	20	20	25	25	-	20	20	25	25	100%	100%	100%	100%	100%			
25.	IKM Layanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah	-	-	-	75	75	-	-	-	75	75	-	-	-	100%	100%			
	Rasio Berita Baik dan Buruk	-	-	-	65 : 35	70 : 30	-	-	-	85,87 : 14,12	82,30 : 17,70	-	-	-	132	117			
26.	Jumlah Perusahaan dan atau Pendorong yang berkontribusi terhadap pembangunan kota	180	200	220	-	-	182	214	195	-	-	101,11	107	82,31	-	-			
27.	Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	18,75	25	31,25	-	-	18,75	25	31,25	-	-	100	100	100	-	-			
28.	Jumlah jejaring kota kreatif	-	1	2	-	-	-	1	38	-	-	-	100	950	-	-			
29.	Persentase BUMD yang Sehat	25	25	25	-	-	25	50	50	-	-	100	200	200	-	-			
30.	Persentase BUMD yang Profitabel	25	50	50	-	-	50	50	50	-	-	200	100	100	-	-			



31.	Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian				-	-	-	13	10	-	-	-	9	11	-	-	-	69	110
<b>Bagian Kerjasama</b>																			
32.	Presentase Implementasi Kerjasama Lingkup Dalam Negeri				60%	65%	66%	68%	70%	65.85%	127.3%	-	-	-	109.75%	195.80%	-	-	-
33.	Presentase Implementasi Kerjasama Lingkup Luar Negeri				30%	35%	37.5%	40%	42.5	84.6%	78.57%	-	-	-	282%	224.5%	-	-	-
<b>Bagian Perekonomian</b>																			
34.	Terselenggaranya Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Sesuai Prosedur dan Aturan yang Berlaku				50 %	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
35.	Persentase permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Perekonomian yang diselesaikan				-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-
36.	Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga				-	85,71%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-



37.	Persentase bumd yang tercapai kinerjanya (keterangan: masing masing bumd diberikan taget kinerja sesuai dengan tujuan dibentuknya)				-	40%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-
38.	Jumlah BUMD yang di evaluasi berdasarkan kriteria pengukuran kinerja				-	-	5 BUMD	5 BUMD	5 BUMD	-	-	2 BUMD (Tw2)	-	-	-	-	40% (Tw2)	-	-
39.	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				-	-	100%	100%	100%	-	-	50% (Tw2)	-	-	-	-	50% (Tw2)	-	-
	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>																		
40.	Jumlah PD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan				73	73				73	73								
41.	Persentase perangkat daerah yang mengikuti prosedur Penyelenggaraan pengesahan desain dan mendapatkan pengesahan				100%	100%				100%	100%								
42.	Nilai Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Desain dan Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah				100%	100%				100%	100%								
43.	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi pelaksanaan						100%	100%	100%			100%	100%	100%					



	pembangunan																		
44.	Persentase perencanaan pembangunan yang terpadu						100%	100%	100%			100%	100%	100%					
45.	Persentase desain pembangunan yang terevaluasi						100%	100%	100%			100%	100%	100%					
46.	Persentase pelaksanaan pembangunan strategis yang terevaluasi						100%	100%	100%			100%	100%	100%					
47.	Persentase pelaksanaan pembangunan strategis yang terkendali						100%	100%	100%			100%	100%	100%					
<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>																			
48.	Persentase PD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan Birms				100	100	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a
49.	Persentase Perencanaan Pembangunan dalam Pengadaan Barang/Jasa				n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	50	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
<b>Bagian Organisasi</b>																			
50.	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung (Komponen Pelaporan Kinerja) pada Skala 15				12,60	12,70	12,8	12,9	13	12,60	12,70	-	-	-	100	100	-	-	-



51.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (Komponen Penataan dan Penguatan Organisasi) pada Skala 6				4	4.20	4,5	4,75	5	4	4,20	-	-	-	100	100	-	-	-
52.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (Komponen Penataan Tata Laksana) pada Skala 5				3.9	4,00	4,01	4,02	4,03	3,9	4,00	-	-	-	100	100	-	-	-
53.	Indeks Layanan Bagian Organisasi dan PAD				80	81.25	-	-	-	81.05	90.69	-	-	-	101	111.9	-	-	-
	<b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>																		
54.	<b>Rasio Berita Baik dan Berita Buruk</b>				<b>Rasio 71 : 29</b>	<b>Rasio 71,20 : 28,80</b>				<b>Rasio 82,96 : 17,04</b>	<b>Rasio 97,70 : 2,30</b>				<b>118</b>	<b>136</b>			
55.	Jumlah Publikasi Media Cetak dan Elektronik dan Kegiatan Bandung Menjawab				200 Publikasi	210 Publikasi				245 Publikasi	231 Publikasi				122	110			
56.	Jumlah Media Grafis Infograpis dan Videograpis yang di sampaikan melalui Media Sosial Kepada Masyarakat				400 Media Grafis	450 Media Grafis				542 Media Grafis	920 Media Grafis				135	204			
57.	Cakupan Pelayanan Sambutan Tepat Waktu				100 %	100 %				100 %	100 %				100	100			
58.	Jumlah Press Rilis Sosialisasi Kebijakan Pemerintah				700 Press Rilis	750 Press Rilis				1326 Press Rilis	1313 Press Rilis				189	175			



59..	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Bagian Hubungan Masyarakat				85 Nilai	85 Nilai				86,44 Nilai	91,90 Nilai				101	136			
60.	Jumlah jasa bulanan komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100	100			
61..	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2 Jenis	2 Jenis				2 Jenis	2 Jenis				100	100			
62.	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100	100			
63.	Jumlah penyediaan ATK				2 Paket	2 Paket				2 Paket	2 Paket				100	100			
64.	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan				5 Jenis	5 Jenis				5 Jenis	5 Jenis				100	100			
65.	Jumlah jenis peralatan rumah tangga				3 Jenis	3 Jenis				3 Jenis	3 Jenis				100	100			
66..	Jumlah jenis bahan bacaan				3 Jenis	3 Jenis				3 Jenis	3 Jenis				100	100			
67.	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah				12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100	100			
68	Jumlah Kegiatan Makanan dan Minuman Rapat				12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100	100			

Perubahan Indikator Karena Perubahan SOTK dari Bagian Humas 2016-2021, menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mulai 1 April 2021



69.	<b>Rasio Berita Baik dan Berita Buruk</b>							<b>Rasio 71,80 : 28,20</b>	-	-									
70.	<b>Terlaksananya Pelayanan Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>							-	<b>100%</b>	<b>100%</b>									
71.	Cakupan Pelayanan Protokoler Terhadap Pimpinan							100%	100%	100%									
72.	Jumlah Publikasi Kegiatan Pimpinan/Pemerintah Kota Bandung Yang Di Informasikan Melalui Media Cetak, Elektronik dan Online							240 Publikasi	-	-									
73.	Jumlah Media Grafis Infografis dan videografis yang disampaikan melalui media sosial							500 Media Grafis	550 Media Grafis	600 Media Grafis									
74.	Cakupan Pelayanan Sambutan yang di fasilitas							100 %	100 %	100 %									
75.	Jumlah Notulensi Dokumentasi Mengenai Pimpinan atau Pemerintah Kota Bandung							800 Notulensi	850 Notulensi	900 Notulensi									
76..	Jumlah Laporan Perbaikan Peralatan Kerja							2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis									
77.	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulanan							12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan									



78.	Jumlah Laporan Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan										
79.	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor bulanan						12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan										
80.	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga						2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis										
81.	Jumlah Jenis penyediaan Bahan Bacaan dan atau Peraturan Perundang - Undangan						3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis										
82.	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan										
83.	Jumlah Bulanan Penyediaan Makanan dan Minuman						12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan										
84.	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis										
85.	Jumlah Jasa Pengadaan Cetakan dan Penggandaan						3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis										
	<b>Bagian Umum</b>																		
86.	IKM Layanan Bagian Lingkup Sekretariat Daerah				72,50	75	77,50	75,50	80	75	77,67	n/a	n/a	n/a	103,45	103,56	n/a	n/a	n/a



87.	Persentase usulan kepegawaian tepat waktu				100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a
88.	Presentase sarana prasarana kondisi baik				80	80	85	85	90	80	80	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a
89.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai Standar				80	80	85	85	90	100	100	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a
90.	Indeks Kepuasan Layanan Internal Ketatausahaan Sekretariat Daerah				73	74	75	77	80	73	74	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a
91.	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar dan Kondisi Baik				80	80	85	85	90	80	80	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a
92.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah				100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a
93.	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kepada Tim Perumus Kebijakan Kepala Daerah				100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a
	<b>Bagian Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian</b>																		
94.	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti				100	100				100	100				100%	100%			



95.	Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu				100	100				100	100				100%	100%			
96.	Persentase Penyelenggaraan Acara Protokol Yang Sesuai Dengan SOP				100	100				n/a	n/a				n/a	n/a			
97.	Indeks Kepuasan Acara Keprotokolan				100	100				n/a	n/a				n/a	n/a			
98.	Persentase Pengelolaan Surat Tepat Waktu				100	100				100	100				100%	100%			
99.	Indeks Kepuasan Layanan Internal Ketatausahaan Sekretariat Daerah				73	74				73	74				100%	100%			
Perubahan Indikator Karena Perubahan SOTK dari Bagian Tata Usaha Pimpinan 2016-2021, Menjadi Bagian Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian mulai 1 April 2021																			
100.	Jumlah Dokumen bahan penetapan rencana kerja daerah lingkup Sekretariat Daerah				-	-	4	4	4	-	-	4			-	-	<b>100%</b>		
101.	Jumlah Dokumen bahan penetapan laporan kinerja daerah lingkup Sekretariat Daerah				-	-	3	3	3	-	-	3			-	-	<b>100%</b>		
102.	Cakupan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup perencanaan, keuangan dan kepegawaian				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%			-	-	<b>100%</b>		
103.	Cakupan pelayanan, penyusunan rencana penyelenggaraan kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%			-	-	<b>100%</b>		



104.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian				-	-	80	80	80	-	-	100%			-	-	<b>100%</b>		
105.	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%			-	-	<b>100%</b>		

Sumber : Bagian Perkapreg, Sub Bag Perencanaan Per TW2 Tahun 2021

	<b>Bagian Tata Pemerintahan</b>																		
1.	Nilai LPPD				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	3.4023	3.4033	3.4043	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	-	-	100%	100%	-	-	-
2.	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)				n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	100%	100%

## 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung

### 2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2021 per triwulan ke I anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2. 5**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi (TWIII)	%
<b>Belanja</b>	279.458.426.350	149.638.095.942	53,55
- <b>Belanja Operasi</b>	268.531.596.404	144.597.611.368	53,85
- <b>Belanja Modal</b>	10.926.829.946	5.040.484.574	46,13
<b>Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>		129.820.330.408	46,45

Sumber : Bagian Perkapeg Setda Kota Bandung Angka realisasi Per Triwulan 3 Tahun 2021

Anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun 2018 untuk belanja sebesar Rp. 279.108.426.350,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 268.211.211.704,00 (96,09%) dan belanja modal sebesar Rp. 10.897.214.646,00 (3,90%) dapat direalisasi sebesar Rp. 26.979.765.644,00 (9,67%) yang terdiri dari operasi sebesar Rp. 26.760.667.644,00 (9,98%) dan belanja modal sebesar Rp. 219.098.000,00 (2,01%).

Untuk periode pelayanan Tahun 2018 - 2023 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 2. 6**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Rata-Rata Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2020**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>Belanja</b>	689.380.525.398,04	621.091.220.838	90,09
- <b>Belanja Tidak Langsung</b>	184.799.769.359,92	175.977.675.634	95,23
- <b>Belanja Langsung</b>	504.580.756.038,12	445.113.545.204	88,21
<b>Total Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>		68.599.166.750,04	

Sumber : Bagian Perkapeg Setda Kota Bandung (Sub.Bag Keuangan)

Total anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 untuk belanja sebesar Rp. 689.380.525.398,04 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 184.799.769.359,92 (26,81%) dan belanja langsung sebesar Rp. 504.580.756.038,12 (74,62 %) dapat direalisasi sebesar Rp. 621.091.220.838 (90,09 %) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 175.977.675.634 (95,23%) dan belanja langsung sebesar Rp. 445.113.545.204 (88,21 %).

Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung selama tahun 2014-2018 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2. 7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung**  
**Tahun 2018-2023**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Urusan Wajib (Bidang : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian)	35.007.9 94.268,0 0	29.413.4 32.173,0 0	77.261.0 22.210,0 0	84.987. 124.431	93.485.8 36.874	35.007.9 94.268,0 0	29.413.4 32.173,0 0	77.261.0 22.210,0 0	84.987.1 24.431	93.485.8 36.874	29.478.1 70.983,0 0	25.904.8 55.024,0 0	922.94 2.173	-	-	84,20	88,07	n/a	n/a	n/a
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Bidang : Fungsi Penunjang Lainnya)	109.643. 971.328, 00	139.736. 435.065, 34	202.197. 404.140, 00	222.417. 144.55 4	244.658. 859.009	109.643. 971.328, 00	139.736. 435.065, 34	202.197. 404.140, 00	222.417. 144.554	244.658 .859.00 9	90.414.2 26.391,0 0	124.453. 058.455, 00	47.487.7 02.314,0 0	-	-	82,46	89,06	n/a	n/a	n/a

Sumber: Bagian Perkapag, Sub Bag Keuangan, Tahun ke 4 dan Tahun ke 5 merupakan Proyeksi 10% dari Tahun 2021 (Tahun ke 3), Realisasi Tahun ke 3 Terhitung baru sampai Triwulan ke II Tahun berjalan

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung

**Tabel 2. 8**  
**Tantangan dan Peluang Sekretariat Daerah Kota Bandung**

NO	BAGIAN	TANTANGAN	PELUANG
1.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian pengukuran kinerja oleh Timda Provinsi dan Timnas Kemendagri tentang Nilai LPPD, masih terkait dengan penilaian aspek Teknis dan Non Teknis.</li> <li>- Masih terdapat Kecamatan yang belum membina dan mengawasi Kelurahan di kewilayahannya dalam melakukan pelaporan secara disiplin dan terstruktur.</li> <li>- Belum optimalnya pendataan batas antar wilayah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi peningkatan data dukung pelaporan LPPD untuk Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Urusan Wajib, Urusan Penunjang dan Urusan Pilihan.</li> <li>- Penilaian Kecamatan Berkinerja Baik harus terdata secara update dan terukur penilaiannya.</li> <li>- Penentuan Batas Antar Wilayah dan Tapal Batas harus sesuai dengan luas daerah/wilayah keseluruhan dan wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.</li> </ul>
2.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisa terjadi konflik internal terkait program dan kegiatan akibat kurangnya koordinasi</li> <li>- Tuntutan Sosial terhadap akibat adanya kebijakan yang Tidak tepat atau kebijakan yang Kurang berpihak kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Masyarakatmenunjang Program dan Kegiatan</li> <li>- Optimalisasi dukungan yang kuat dari pimpinan</li> </ul>
3.	BAGIAN HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah daerah di luar bagian hukum terhadap proses pembentukan produk hukum daerah;</li> <li>- Peraturan pelaksanaan dari undang-undang di tingkat pusat relatif lambat</li> <li>- Tingkat resistensi masyarakat dalam bidang hukum meningkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dukungan regulasi tingkat pusat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Adanya media teknologi dan informasi</li> <li>- Adanya dukungan dari lembaga legialatif</li> <li>- Adanya dukungan dari masyarakat</li> </ul>
4.	BAGIAN KERJASAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terdapat kerja sama-kerja sama “zombie”/belum ditindaklanjuti oleh Dinas Terkait sebagai leading sektor sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut oleh Bagian Kerja Sama sebagai fasilitator. Hal tersebut menyebabkan pembangunan yang diinisiasi melalui kerja sama dirasa belum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Bandung sebagai ibu Kota Provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan dengan didukung oleh letak geografi yang strategis dan aspek demografi yang unggul dengan generasi muda yang aktif dalam merancang</li> </ul>



		<p>maksimal dan efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Kerja Sama dalam meningkatkan dan mengoptimalkan potensi sektor-sektor kerjasama.</li> </ul>	<p>inovasi, menjadi potensi sebagai daya tarik berbagai pihak untuk dapat berkolaborasi/beke rjasama dalam rangka mendukung pembangunan dan mewujudkan visi misi Kota Bandung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui kolaborasi, Kota Bandung dapat mengakselerasi pembangunan di berbagai bidang (mendatangkan investasi, mendapatkan bantuan program kesejahteraan masyarakat, program bantuan dana hibah Non APBD)</li> <li>- Adanya komitmen dalam peningkatan peluang kerja sama yang memberikan benefit bagi Kota Bandung sebagai Kota Jasa dan Pariwisata.</li> </ul>
5.	BAGIAN PEREKONOMIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya perubahan regulasi</li> <li>- Masih lemahnya pemahaman Personil terkait Regulasi, SOP dan data ekonomi</li> <li>- Kurang terdukungnya tenaga ahli dalam memaksimalkan evaluasi dan pelaksanaan kegiatan.</li> <li>- Adanya pelaksanaan program kegiatan yang kurang terkoordinasi dan tumpang tindih yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program lingkup ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya Perusahaan yang ada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya yang menjadikan peluang program pembangunan berbasis kolaborasi melalui program CSR Perusahaan.</li> <li>- Adanya dukungan regulasi tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan Program CSR Perusahaan, Pengembangan BUMD, TPID, KUR dan BDC</li> <li>- Adanya dukungan teknologi informasi dan sarana dalam pelaksanaan program CSR, TPID, KUR dan BDC</li> <li>- Adanya komitmen dari Pimpinan untuk berkolaborasi dengan Perusahaandan sebagian besar Perusahaan memiliki komitmen untuk meningkatkan kolaborasi melalui</li> </ul>



			Program TJSL Perusahaan.
6.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsi penyelenggaraan pengesahan desain sebagai inovasi daerah tidak ada acuan hukum secara vertical</li> <li>- Adanya pelaksanaan program kegiatan yang kurang terkoordinasi yang dapat mempengaruhi kualitas pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya keselarasan regulasi tingkat pusat, regional dan daerah.</li> <li>- Adanya komitmen dan semangat aparatur dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban.</li> <li>- Pesatnya kemajuan teknologi informasi yang menunjang dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>- Tingkat kepekaan terhadap kualitas lingkungan yang semakin meningkat.</li> </ul>
7.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketidak patuhan pelaku pengadaan terhadap peraturan yang berlaku</li> <li>- Adanya perubahan regulasi</li> <li>- Adanya pelaku usaha yang mengikuti proses pemilihan penyedia dengan cara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya pelaku usaha yang ada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya yang menjadikan peluang kompetisi dalam proses pemilihan penyedia semakin baik, sehingga prinsip value for money akan dapat dicapai.</li> <li>- Adanya dukungan regulasi tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa.</li> <li>- Adanya dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa.</li> </ul>
8.	BAGIAN ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat cepat dan belum jelas</li> <li>- Standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan tidak di implementasikan di Perangkat Daerah dalam pelayanan publik</li> <li>- Adanya kepentingan politik dalam penataan kelembagaan</li> <li>- Adanya kepentingan individu (ego sektoral) dalam penataan kelembagaan</li> <li>- Resistensi terhadap kebijakan penataan organisasi terutama apabila terjadi perampingan (sehingga ada pendapat ramping struktur banyak musuh)</li> <li>- Anggapan SOP adalah (business asusual) tidak berorientasi pada percepatan, dan penyelarasan pelaksanaan tugas pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan RPJMD Wali Kota baru</li> <li>- Memanfaatkan Perguruan Tinggi untuk Kajian Akademis</li> <li>- Keinginan masyarakat atas kualitas pelayanan prima</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Pemanfaatan teknologi informasi yang sudah terintegrasi dari beberapa sistem aplikasi perangkat daerah</p>



		- Kondisi antara perencanaan yang diperjanjikan tidak selaras	
9.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muncul nya Berita Hoax.</li> <li>- Hadirnya Media Sosial Dimana Setiap Orang Dapat Mengutarakan Pendapatnya Masing-Masing, Memberikan Saran, Kritik atau bahkan melaporkan suatu kejadian tertentu.</li> <li>- Muncul nya Berita Negatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Situs dan Medsos Pemerintahan Akan Lebih Dipercaya Masyarakat</li> <li>- Pemerintah Dapat Mengetahui Informasi Tertentu Dari Masyarakat Untuk Mendukung Pembangunan Kota</li> </ul>
10	BAGIAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi catatan asset yang menjadi temuan pemeriksa</li> <li>- Perubahan kebijakan kepala daerah terhadap pemanfaatan asset</li> <li>- Kebijakan anggaran sering berubah</li> <li>- Ketidakesesuaian target output usulan adm kepegawaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem penganggaran berbasis system teknologi informasi.</li> <li>- Tersedianya layanan pengadaan barang jasa (e-katalog lokal, nasional dan BIRMS).</li> <li>- Perwal Remunerasi Kinerja Pegawai.</li> <li>- Perwal tentang Standar Operasional Prosedur.</li> <li>- Kebijakan pengadaan pegawai non ASN yang professional.</li> </ul>
11.	BAGIAN PERENCANAAN, KEANGAN DAN KEPGAWAIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Regulasi dan perundangan yang cepat, sering dan terkadang tidak konsisten dengan regulasi sebelumnya.</li> <li>- Perubahan SOTK Sekretariat Daerah berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tidak sedikit merombak satu bagian penuh sehingga kembali diperlukan penyesuaian dan penyusunan perencanaan dari awal ditengah RPJMD berjalan.</li> <li>- Belum meratanya jumlah serta kualitas SDM Aparatur Sipil Negara pada setiap organisasi perangkat daerah</li> <li>- Pola kerja Normal Baru memiliki tantangan tersendiri dalam proses koordinasi, antar organisasi perangkat daerah penyusunan dokumen Perencanaan, Keuangan dan kepegawaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan teknologi Informasi modern yang semakin dikuasai merata mempermudah koordinasi pelaksanaan Tugas.</li> <li>- Perubahan SOTK Sekretariat Daerah memungkinkan perekrutan SDM baru yang memungkinkan percepatan proses penyusunan perencanaan dan penggunaan IT .</li> <li>- Semangat Reformasi Birokrasi memungkinkan berbagai terobosan dan perbaikan proses perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya Kesadaran Pribadi, ataupun kurangnya pemahaman beberapa Aparatur Sipil Negara bisa menjadi penghambat terciptanya produk Kepegawaian tepat waktu.</li></ul>	
--	--	---	--

Dari tabel di atas yang menggambarkan tantangan dan peluang dalam pelayanan Sekretariat Daerah yang dihadapi, maka bisa diambil beberapa langkah upaya antara lain sebagai berikut :

- 1) Tim Reformasi Birokrasi perlu lebih aktif dan terstruktur melakukan sosialisasi terhadap 8 area perubahan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bandung 2018-2023 kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terutama lingkup Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- 2) Meningkatkan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kewilayahan
- 3) Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupa upaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja
- 5) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama (daerah) dalam dan luar negeri.
- 6) Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, meningkatkan pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam, kebijakan pembiayaan pembangunan dan kemitraan dengan swasta, mengembangkan ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif dan membina BUMD serta mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama.



Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kota Bandung akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kota dan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan yang tepat pula. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan.

#### **3.1 Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan pada dasarnya berupa kesenjangan antara realisasi pembangunan yang dicapai saat ini, dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada (1) evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, (2) evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau (3) evaluasi terhadap beberapa urusan yang berpengaruh sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi, berdasarkan kriteria berikut:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya di lingkup Sekretariat Daerah dapat diuraikan sebagaimana berikut :

### 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**Tabel 3. 1**  
**Identifikasi Permasalahan Sekretariat Daerah Kota Bandung**

NO	BAGIAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
1.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan penurunan Nilai LPPD dalam optimalisasi capaian Indikator Kinerja Kunci dikarenakan masih terdapat kekurangan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kunci baik terkait permasalahan pengambil kebijakan dan target yang belum dapat terukur dengan jelas. (Misalnya masalah RTH, Sanitasi, Luas Kawasan Kumuh dan Opini BPK terkait hasil laporan keuangan atau belum WTP).</li> <li>- Permasalahan yang timbul dalam Penilaian Kecamatan Berkinerja Baik yaitu masih terdapat pelaporan kegiatan di Kewilayahan baik Kecamatan maupun Kelurahan yang tidak sesuai dengan penilaian laporan bulanan meliputi Kualitas Pelayanan Publik, Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum (Laporan Kependudukan, Pertemuan dengan RW, PKK, LPM, Karang Taruna), Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, dan Lingkungan Hidup, Inovasi, Kreativitas dan Peningkatan Indeks Kebahagiaan.</li> <li>- Masalah antar Wilayah disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk, kondisi fisik kewilayahan, dan kondisi sosial ekonomi.</li> <li>-</li> </ul>
2.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya program dan kegiatan yang terkait sosial keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat terkendala dengan payung hukum atau regulasi terkait.</li> <li>- Kurangnya koordinasi yang baik antar OPD terkait program maupun kegiatan yang menjadi objek untuk menjadi bahan dalam menyusun rancangan kebijakan bidang sosial keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat</li> </ul>
3.	BAGIAN HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tertibnya administrasi data usul rancangan produk hukum daerah;</li> <li>- Belum tersedianya alat (tool) yang efektif dan efisien untuk memantau dokumen rancangan produk hukum daerah yang sedang diproses;</li> <li>- Terjadinya kelambanan dalam pembentukan produk hukum daerah;</li> <li>- Belum optimalnya kinerja pegawai dalam penyelesaian pembentukan produk hukum daerah;</li> <li>- Masih lambannya pengolahan dan pelaporan data terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia pada Perangkat Daerah;</li> </ul>
4.	BAGIAN KERJASAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih minimnya koordinasi bagi OPD penindak lanjut kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung, baik untuk lingkup kerjasama luar negeri maupun kerjasama dalam negeri.</li> <li>- Masih adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pengelola kerjasama, yang memerlukan adanya peningkatan kapasitas SDM yang memadai.</li> <li>- Kurang optimalnya peninjauan kerja sama khususnya Kerja Sama Luar Negeri dikarenakan adanya Surat Edaran/Radiogram Kementerian Dalam Negeri Nomor:440/2400/SJ tanggal 13 Maret 2020, Perihal himbauan larangan melakukan perjalanan ke luar negeri</li> </ul>



		<p>bagi Perangkat Daerah di masa pandemi yang belum dicabut.</p> <p>-</p>
5.	BAGIAN PEREKONOMIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih lemahnya sinkronisasi data dan informasi antar perangkat daerah terkait dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi mikro</li> <li>- Belum adanya database secara komprehensif/terpusat yang dapat dijadikan bahan kajian kebijakan khususnya dalam menentukan outcome program kegiatan Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan kepada pelaku usaha mikro di Kota Bandung</li> <li>- Belum terintegrasinya laporan kegiatan pengembangan ekonomi mikro secara berkala</li> <li>- Belum optimalnya pelaksanaan pendampingan dan pengawasan terhadap pencapaian outcome program kegiatan pada perangkat daerah terkait lingkup pengembangan ekonomi mikro</li> <li>- Belum optimalnya sosialisasi dan akses informasi kepada masyarakat khususnya pelaku ekonomi mikro dalam mengakses informasi tentang program kegiatan Perangkat Daerah Terkait baik berupa layanan maupun fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi</li> <li>- Dalam melakukan fungsi pembinaan BUMD, sebagai amanat peraturan perundang-undangan mempunyai tugas diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan</li> <li>- Pembinaan kepengurusan</li> <li>- Pembinaan pendayagunaan aset</li> <li>- Pembinaan pengembangan bisnis</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> <li>- Administrasi pembinaan</li> </ul> </li> <li>- Perlu adanya analisa dari Pembina BUMD dalam hal adanya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian rencana kerja perusahaan</li> <li>- Penyampaian laporan keuangan dan operasional</li> <li>- Rencana kerja sama</li> <li>- Rencana pengadaan barang jasa</li> <li>- Penyertaan modal</li> <li>- Penugasan</li> <li>- Pembentukan Anak Perusahaan</li> <li>- Penyusunan SOP dan GCG</li> <li>- Evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum dan privatisasi BUMD</li> <li>- Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan Pembubaran BUMD</li> <li>- Kepailitan BUMD</li> </ul> </li> <li>- Jumlah BUMD di Kota Bandung sebanyak 5</li> <li>- Dapat memonitor dan mengevaluasi permasalahan yang timbul sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Realisasi kegiatan harus dapat tercapai dikarenakan sebagai tolak ukur penilaian.</li> </ul>
6.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan dalam penyusunan dokumen perencanaan, dan penganggaran belum optimal.</li> <li>- Masih terbatas kepada penyajian Laporan kinerja ruang lingkup Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan.</li> </ul>
7.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar Dokumen Pemilihan Untuk Pengadaan Langsung perlu disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan terbaru</li> <li>- Belum tersedianya alat (tool) yang efektif dan efisien untuk memantau dokumen proses tahapan pengajuan tender</li> </ul>



8.	BAGIAN ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Besaran organisasi menyebabkan struktur organisasi berjalan tidak efektif dalam pencapaian kinerja</li><li>- Tumpang tindih tugas dan fungsi antar Perangkat Daerah</li><li>- Unit Penyelenggara Pelayanan Publik belum seluruhnya memenuhi Standar Pelayanan</li><li>- Peningkatan Kualitas dan Implementasi SAKIP dalam Budaya kinerja masih kurang</li></ul>
9.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih Banyak nya OPD Meminta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk melakukan peliputan kegiatan terhadap OPD tersebut</li><li>- Sambutan Yang Diajukan Tidak Menyertakan Pointer Kegiatan</li><li>- Masih Sulitnya Meminta Update Data Setiap OPD Untuk Keperluan Pimpinan</li><li>- Permohonan Pembuatan Sambutan, Infografis dan Videografis Yang Mencolok.</li></ul>
10.	BAGIAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"><li>- Permintaan Kebutuhan Pemenuhan Sarana Prasarana di luar Rencana Kebutuhan Barang</li><li>- Masih belum optimalnya penatausahaan BMD Sekretariat Daerah</li><li>- Cara dan solusi untuk aset yang masih dikuasai oleh para mantan pejabat</li></ul>
11.	BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM terutama pada Aparatur Sipil Negara, yang memerlukan adanya peningkatan kapasitas serta Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara yang sesuai Anjab/ABK</li><li>- Penyesuaian kembali Perencanaan, Program dan Anggaran setelah perubahan SOTK perlu dilaksanakan dengan teliti dikarenakan banyak bagian yang berubah total, beralihnya beberapa tugas dan fungsi, berpindahnya beberapa SDM ahli serta dibentuknya beberapa Sub Bagian baru yang masih perlu bimbingan dan penyesuaian dari awal.</li><li>- Kesadaran dan pemahaman individu yang berbeda-beda berpotensi memperlambat produk perencanaan, kepegawaian dan keuangan tepat waktu.</li></ul>

### 3.2.1 Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah (PD). Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat dari Kementerian PAN-RB nomor : B/301/RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (Indkes RB) Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan sebesar 0,82 yakni Tahun 2017 sebesar 69,81 menjadi 68,99 di Tahun 2018 dengan kategori "B" tersebut lebih banyak disebabkan pelaksanaan RB pada Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih bersifat formalitas belaka dan belum baik/optimal.

2. Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kota Bandung pada 60 perangkat daerah tahun 2018, sebanyak 43 perangkat daerah yang memperoleh capaian IKM di atas 75,00. Akan tetapi kualitas pelayanan publik tetap menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Bandung. Selain belum seluruh perangkat daerah mencapai kinerja yang baik, standar pelayanan di Kota Bandung perlu ditingkatkan lebih tinggi dan standar survei kepuasan masyarakat yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Bandung diantaranya melalui capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, dan nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Bandung pada tahun 2018 adalah 80,05 atau kategori "A", capaian tersebut sudah sesuai dengan target RPJMD periode sebelumnya. Akan tetapi capaian tersebut cenderung menurun dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 80,61 pada tahun 2016 dan 80,37 pada tahun 2017. Capaian tersebut tidak terlihat peningkatan secara signifikan. Berdasarkan komponen akuntabilitas kinerja yang harus diperbaiki antara lain: komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja.
  - b. Nilai LPPD Kota Bandung pada tahun 2018 adalah sebesar 3.4110 dengan kategori "Sangat Tinggi", capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 3.3060 atau sebesar 96,92%. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2017. Namun dengan capaian tersebut, perangkat daerah masih harus terus meningkatkan nilai LPPD secara optimal.
  - c. Mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sampai saat ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung

tahun 2018 sedang dalam proses penyusunan dan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan akan diterima setelah proses pemeriksaan oleh BPK RI selesai.

Berkaitan dengan temuan BPK RI yang terkait dengan akun Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 39A/LHP/XVII.BDG/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Aset tetap dengan Tahun Perolehan 1900, 2005 dan 2007 yang tidak dapat diyakini nilai kewajarannya sejumlah 3.334 unit dengan nilai Rp. 694.689.995.630,-. Sedang berproses tindak lanjut sejumlah 1.298 unit dengan nilai Rp.356.251.723.337,- dan sisanya sejumlah 2.036 unit dengan nilai Rp.338.438.272.293,- akan ditelusuri kembali.
2. Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah 2.489 unit dengan jumlah nilai Rp. 430.594.864.717,-. Sedang berproses tindak lanjut sejumlah 646 unit dengan nilai Rp.237.180.702.007,- dan sisanya sejumlah 1.843 unit dengan nilai Rp. 193.414.162.709,- akan ditelusuri kembali.

Dengan demikian sisa yang harus ditelusuri kembali adalah sebanyak 3.879 unit dengan jumlah nilai Rp. 531.852.435.002

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 yaitu :

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG  
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

**Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.



- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.
- Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

**Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausahayang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

**1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing**

*Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.*

**2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih**

*Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.*

**3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan**

*Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.*

**4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**

*Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.*

**5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi**

*Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.*

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2018-2023 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih merupakan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3. 2**  
**Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih**

No.	Aspek	Indikator
1	<i>Janji Kampanye untuk Bandung Unggul</i>	1. PIPPK Plus 2. 1 Pusat Kreativitas Pemuda per wilayah 3. Youthspace di setiap kelurahan 4. 1 Perpustakaan keliling / kecamatan 5. Beasiswa Pendidikan bagi Siswa, Guru dan ASN Berprestasi 6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan 7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan 8. Kampung wisata di setiap wilayah



2	<i>Janji untuk Nyaman</i> <i>Kampanye Bandung</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Flyover / underpass</li> <li>2. Pembangunan Kolam/Saluran Retensi</li> <li>3. Fasilitas Disabilitas di semua ruang publik</li> <li>4. 25.000 Sambungan air bersih baru</li> <li>5. Revitalisasi sarana olahraga/kecamatan</li> <li>6. Bank Sampah per kecamatan</li> <li>7. Menuntaskan revitalisasi pasar tradisional</li> </ol>
3	<i>Janji untuk Sejahtera</i> <i>Kampanye Bandung</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) per Kecamatan</li> <li>2. UMK untuk Guru Honorer</li> <li>3. Gratis Biaya Pemakaman bagi warga tidak mampu</li> <li>4. Peningkatan Insentif RT dan RW</li> <li>5. Subsidi harga sembako</li> <li>6. Kartu bandung sejahtera bagi warga tidak mampu</li> <li>7. Menciptakan 1 koperasi juara setiap kelurahan</li> <li>8. 1 Koperasi di Setiap Tempat Ibadah di Kelurahan</li> </ol>
4	<i>Janji untuk Agamis</i> <i>Kampanye Bandung</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Insentif untuk Guru Ngaji</li> <li>2. Gratis Sertifikasi Tanah Tempat Ibadah</li> <li>3. Gerakan Meyemarakkan tempat ibadah</li> </ol>

Sumber : Bappelitbang Kota Bandung 2018

Janji-janji politik Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung Terpilih terdiri dari 4 (empat) Aspek Kinerja Kota Bandung, yaitu : **Bandung Unggul, Bandung Nyaman, Bandung Sejahtera dan Bandung Agamis** serta



Agamis “Janji-janji politik Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung Terpilih” dalam masa kepemimpinan Pemerintah Kota Bandung merupakan **“Program Prioritas Kota Bandung”** yang hendak diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2018-2023, sehingga keberadaan organisasi Sekretariat Daerah sebagai lembaga staf dan *advisory* dalam penyelenggara pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan makro/umum pemerintah daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta membina hubungan kerja dengan seluruh organisasi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan program prioritas tersebut.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Pemerintah Provinsi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 Adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integras Bangsa”

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah :

**“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

- *Jabar Juara Lahir Batin*: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.
- *Inovasi*: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
- *Kolaborasi*: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
4. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.



5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

**Reliuis – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif**

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Hasil telaahan dari Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Jawa Barat dapat di simpulkan faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pun yang menjadi pendorong dalam pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas fungsi dapat diuraikan sebagaimana berikut :

**Tabel 3. 3**  
**Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong**

NO	BAGIAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan penurunan Nilai LPPD dalam optimalisasi capaian Indikator Kinerja Kunci dikarenakan masih terdapat kekurangan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kunci baik terkait permasalahan pengambil kebijakan dan target yang belum dapat terukur dengan jelas. (Misalnya masalah RTH, Sanitasi, Luas Kawasan Kumuh dan Opini BPK terkait hasil laporan keuangan atau belum WTP).</li> <li>- Permasalahan yang timbul dalam Penilaian Kecamatan Berkinerja Baik yaitu masih terdapat pelaporan kegiatan di Kewilayahan baik Kecamatan maupun Kelurahan yang tidak sesuai dengan penilaian laporan bulanan meliputi Kualitas Pelayanan Publik, Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum (Laporan Kependudukan, Pertemuan dengan RW, PKK, LPM, Karang Taruna), Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, dan Lingkungan Hidup, Inovasi, Kreativitas dan Peningkatan Indeks Kebahagiaan.</li> <li>- Masalah antar Wilayah disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk, kondisi fisik kewilayahan, dan kondisi sosial ekonomi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi peningkatan data dukung pelaporan LPPD untuk Indikator Kinerja Kunci untuk urusan Urusan Wajib, Urusan Penunjang dan Urusan Pilihan.</li> <li>- Penilaian Kecamatan Berkinerja Baik harus terdata secara update dan terukur penilaiannya.</li> <li>- Penentuan Batas Antar Wilayah dan Tapal Batas harus sesuai dengan luas daerah/wilayah keseluruhan dan wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.</li> </ul>
2.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya program dan kegiatan yang terkait Kesejahteraan Masyarakat, sosial keagamaan dan kesejahteraan sosial terkendala dengan payung hukum atau regulasi terkait.</li> <li>- Kurangnya koordinasi yang baik antar OPD terkait program maupun kegiatan yang menjadi objek untuk menjadi bahan dalam menyusun rancangan kebijakan bidang Kesejahteraan Masyarakat, sosial keagamaan dan kesejahteraan sosial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Masyarakat dalam menunjang Program dan Kegiatan</li> <li>- Optimalisasi Daya dukung yang kuat dari pimpinan</li> </ul>



3.	BAGIAN HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan internal dalam pembentukan produk hukum daerah masih belum optimal;</li> <li>- Masih lemahnya data/alat bukti di Perangkat Daerah dalam penanganan perkara gugatan TUN dan Perdata;</li> <li>- Perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan tingkat pusat tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaan dengan cepat, sehingga menyebabkan terjadinya mispersepsi dalam implementasinya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</li> <li>- Peningkatan evaluasi produk hukum daerah khususnya terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat;</li> <li>- Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum dan HAM bagi aparatur dan masyarakat melalui Peningkatan intensitas sosialisasi dan publikasi serta penyuluhan hukum terpadu.</li> </ul>
4.	BAGIAN KERJASAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih lambannya pelaporan data oleh perangkat daerah terkait kerjasama yang sudah ditindaklanjuti.</li> <li>- Terbatasnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia di Bagian Kerja Sama sehingga perlu dilakukan penambahan jumlah personel pengelola kerja sama dan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM.</li> <li>- Pengawasan internal dalam upaya memaksimalkan kerjasama yang efektif, efisien dan saling menguntungkan masih belum optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya sistem informasi monitoring kerja sama yang diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan efektifitas kerja sama yang dilakukan.</li> <li>- Adanya media teknologi dan informasi mengenai Kota Bandung yang menambah daya tarik bagi pihak lain, baik dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan kota Bandung.</li> <li>- Adanya komitmen dalam peningkatan peluang kerja sama yang memberikan benefit bagi Kota Bandung sebagai Kota Jasa dan Pariwisata.</li> </ul>
5.	BAGIAN PEREKONOMIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor internal masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan latar belakang pendidikan terkait kebijakan ekonomi</li> <li>- Belum adanya SOP tentang integrasi data dan informasi tentang program dan kegiatan pengembangan ekonomi mikro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dukungan regulasi tingkat pusat dan daerah</li> <li>- Adanya dukungan teknologi informasi dan sarana pelaksanaan program</li> <li>- Adanya komitmen dari Pimpinan</li> <li>- Dukungan pendanaan untuk menyediakan</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya Sumber Daya Manusia (Staf di Sub Bagian Pembinaan BUMD)</li> <li>- Kurangnya Sumber Daya Pegawai sehingga menghambat pekerjaan.</li> <li>- Kurang transparan dalam pemberian data sehingga data masih belum akurat dan terarah.</li> <li>- Fasilitas yang tidak memadai, sehingga mengganggu proses pekerjaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tenaga konsultan</li> <li>- Meningkatnya komunikasi antar OPD sehingga koordinasi dapat berjalan lancar.</li> </ul>
6.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan dalam</li> <li>- penyusunan dokumen</li> <li>- perencanaan, dan penganggaran belum optimal.</li> <li>- Masih terbatas kepada penyajian Laporan kinerja ruang lingkup Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya keselarasan regulasi tingkat pusat, regional dan daerah.</li> <li>- Adanya komitmen dan semangat aparatur dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban.</li> <li>- Pesatnya kemajuan teknologi informasi yang menunjang dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>- Tingkat kepehaman terhadap kualitas lingkungan yang nyaman semakin meningkat.</li> </ul>
7.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan tingkat pusat tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaan dengan cepat, sehingga menyebabkan terjadinya mis persepsi dalam implementasinya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1557 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pada Metode Pengadaan Langsung dan e-Purchasing</li> <li>- Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan pengadaan barang/jasa melalui Peningkatan intensitas sosialisasi dan publikasi</li> </ul>
8.	BAGIAN ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidaksesuaian nomenklatur Perangkat Daerah dengan Kementerian/ Lembaga menyebabkan sulitnya pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan urusan/ program kegiatan dari Pemerintah Pusat</li> <li>- Beban kerja organisasi belum tergambar</li> <li>- Adanya kepentingan Politik dari legislatif di Daerah dalam menata Organisasi Perangkat Daerah</li> <li>- Regulasi yang selalu berubah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat regulasi/pedoman dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan</li> <li>- Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>- Adanya aplikasi e- Standar Pelayanan Publik</li> <li>- Regulasi</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perampangan Organisasi yang menyebabkan hilangnya beberapa jabatan</li> <li>- Kurangnya Sarana dan Prasarana pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>- Terbatasnya Sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitas</li> <li>- Kurangnya pemahaman ASN terhadap TUSI dan Target Kinerja</li> </ul>	
9.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOUNIKASI PIMPINAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya pertanyaan masyarakat tentang kebijakan pemerintah terkait pembangunan kota.</li> <li>- Adanya Informasi yang mengandung unsur pemberitaan negatif.</li> <li>- Terbatasnya SDM ASN yang memiliki kualifikasi/kompetensi di bidang kehumasan. ( desain grafis, penulisan naskah sambutan, Liputan dan jurnalistik baik SDM Bagian Humas dan OPD)</li> <li>- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kehumasan.</li> <li>- Belum tersinkronisasinya tugas fungsi dalam nomenklatur jabatan pada Bagian Humas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjalinnnya Kemitraan yang baik dengan media massa sebanyak 312 media</li> <li>- Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi yang semakin cepat, menjadikan peluang untuk menyebarluaskan program dan inovasi Pemerintah Kota Bandung. Melalui Media Sosial, Media Cetak (Koran, Majalah dll) dan Media Elektronik (TV, Radio Dll)</li> </ul>
10.	BAGIAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deskripsi tugas dan kewenangan yang tidak jelas.</li> <li>- Prosedur tetap layanan yang tidak terdokumentasi dengan baik.</li> <li>- Keterbatasan pengembangan infrastruktur bangunan dengan status bersejarah.</li> <li>- Jumlah sarana dan prasarana tersedia tidak sebanding dengan ruang perkantoran yang dibutuhkan.</li> <li>- Alokasi sdm yang berkompeten yang tidak merata pada setiap di unit kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem penganggaran berbasis system teknologi informasi.</li> <li>- Tersedianya layanan pengadaan barang jasa (e-katalog lokal, nasional dan BIRMS).</li> <li>- Perwal Remunerasi Kinerja Pegawai.</li> <li>- Perwal tentang Standar Operasional Prosedur.</li> <li>- Kebijakan pengadaan pegawai non ASN yang professional.</li> </ul>
11.	BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban kerja organisasi belum tergambar karena masih merupakan Bagian baru,</li> <li>- Regulasi yang sering cepat berubah dan berganti,</li> <li>- Perubahan Organisasi sebagian maupun keseluruhan menyebabkan perubahan tugas fungsi, SDM serta penyesuaian program dan anggaran,</li> <li>- Kurangnya Sarana dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui IKM,</li> <li>- Terdapat regulasi/ pedoman dalam melaksanakan tugas fungsi,</li> <li>- Perkembangan penguasaan dan penggunaan teknologi</li> </ul>



		Prasarana pada unit penyelenggara tugas dan fungsi, - Terbatasnya Sumberdaya manusia terutama sumber daya ASN serta kualitas yang perlu dikembangkan sehingga mempengaruhi pola kerja dan fungsi tertentu,	informasi berbasis IT
--	--	---	-----------------------

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

#### A. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas :

- Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Subwilayah Kota (SWK); dan
- Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-



alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

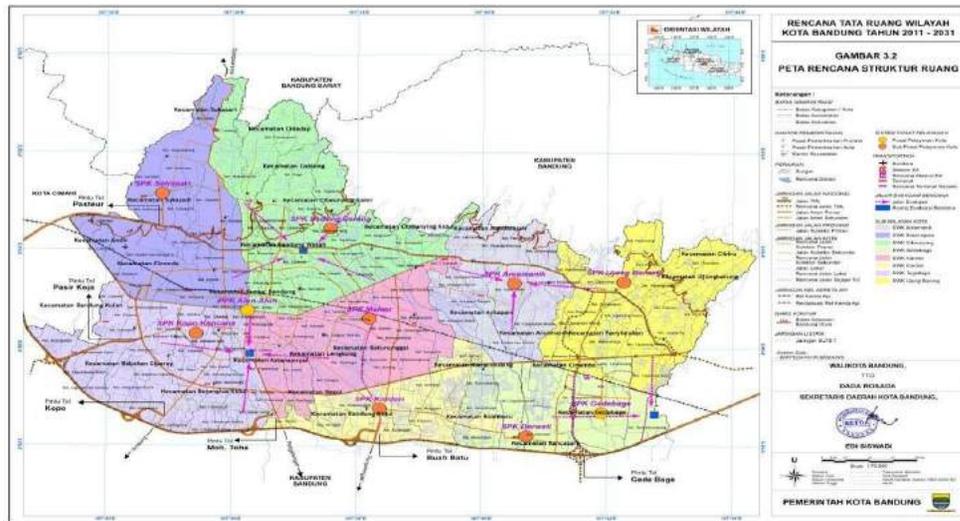
Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Subwilayah Kota Tegalega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah Batu; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

**Gambar 3. 1**  
**Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung**



## B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a. Perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. Optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- Menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- Mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- Mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

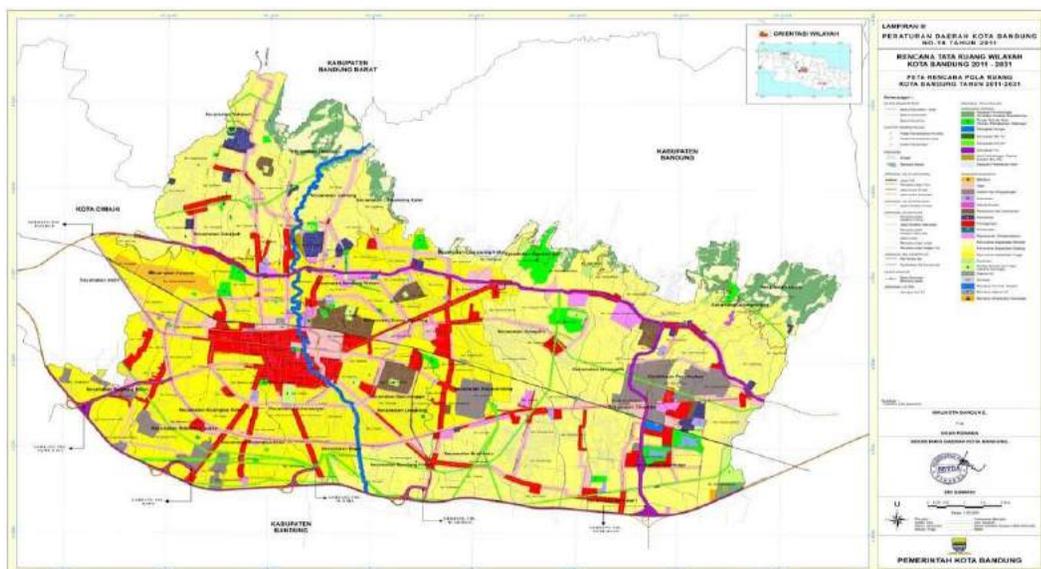
- Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- Meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. Mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. Mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. Mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. Membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. Mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. Menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

**Gambar 3. 2**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung**



### **C. Penelaahan KLHS**

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun RPJMD adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan



pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneegara
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
14. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim



15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pencapaian target indikator TPB di Kota Bandung baru sebesar 21% dari total 214 indikator yang menjadi kewenangan, artinya bahwa indikator yang berhasil terlaksana dan mencapai target baru mencapai 45 indikator saja. Kategorisasi capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Bandung pada RPJMD periode berikutnya. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama pada umumnya adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan yang tidak ada datanya. Capaian tersebut terhadap target diperoleh berdasarkan masing-masing capaian tersebut. Isu strategis yang terumuskan adalah sebagai berikut:

1. Isu Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal
2. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air (Air Permukaan dan Air Tanah)
3. Tingginya Tingkat Alih Fungsi Lahan
4. Frekuensi dan Intensitas Banjir yang Semakin Tinggi
5. Rendahnya Kualitas Udara
6. Kemacetan yang Semakin Sering Terjadi dan Meluas
7. Belum Optimalnya Pola Kemitraan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan hasil analisis pencapaian target TPB, ditemukan permasalahan-permasalahan terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Bandung. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. sistem pengelolaan sampah yang belum optimal,
2. rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya air tanah,
3. tingginya tingkat alih fungsi lahan,
4. rendahnya kualitas udara dan sungai,

5. frekuensi dan intensitas banjir yang semakin tinggi,
6. rendahnya kualitas udara,
7. kemacetan yang semakin sering terjadi dan meluas, serta
8. belum optimalnya pola kemitraan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dalam dokumen KLHS juga dibuat proyeksi terhadap indikator TPB di Kota Bandung yang belum mencapai target. Proyeksi ini dibuat perbandingan antara tingkat pencapaian jika dilakukan BAU (business as usual) dan dengan upaya tambahan.

Berdasarkan analisis permasalahan strategis Kota Bandung dan analisis indikator TPB yang belum tercapai, diperoleh rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengkaji ulang aktivitas alih fungsi lahan dengan menghitung kembali daya dukung, penegakkan hukum atas pelanggaran dengan tegas, penerapan sistem insentif dan disinsentif
2. Mengendalikan pertumbuhan populasi penduduk dan urbanisasi di Kota Bandung
3. Edukasi kepada masyarakat Kota Bandung terkait isu-isu penting perkotaan yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat kota, meliputi: pengelolaan sampah, pencemaran udara, kualitas air, alih fungsi lahan, kemacetan, dan drainase.
4. Pengendalian kualitas dan kuantitas sumber daya air oleh Pemerintah Daerah untuk pengelolaan bagi masyarakat umum.
5. Restrukturisasi anggaran pembangunan oleh Pemerintah Daerah termasuk untuk meningkatkan sarana-prasarana pelayanan kepada masyarakat. Melakukan kajian dan inovasi berkelanjutan terkait pengelolaan sampah perkotaan, Green Building dan Infrastruktur Transportasi Vertikal
6. Mengembangkan pola kemitraan untuk berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi pembiayaan pembangunan dengan pihak ketiga agar terjadi pemerataan dan efektivitas pembangunan infrastruktur kota yang berkualitas dan program-program solutif inovatif bagi masalah lingkungan perkotaan.

Hasil telaahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi dapat di simpulkan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas fungsi dapat diuraikan sebagaimana berikut :

**Tabel 3. 4**  
**Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat**

NO	BAGIAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dalam terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam penyusunan LPPD masih terdapat permasalahan pengumpulan data dikarenakan masih banyak Perangkat Daerah yang harus mensinkronkan data antar Perangkat Daerah yang sesuai dengan indikatornya.</li> <li>- Permasalahan dalam Penilaian Kecamatan Berkinerja baik yaitu belum terpenuhinya kriteria dari Ombudsmen (Sistem Pelayanan Satu Pintu, Standar Operasional Pelayanan, Maklumat Pelayanan), Kinerja Kelurahan yang belum optimal, Lembaga Masyarakat yang kurang aktif, dan kurangnya prestasi Kecamatan</li> <li>- Permasalahan batas antar wilayah yaitu masih terjadi 2 wilayah pada 1 Persil (satu hamparan), terjadi perbedaan KTP pada wilayah yang sama, batas fisik di lapangan masih belum ditandai dengan baik.</li> </ul>
2.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM yang belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan agenda program dan kegiatan.</li> <li>- Daya dukung anggaran memadai</li> <li>- Saran prasarana memadai</li> <li>- Telah dibuatnya Naskah Akademik Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan sedang disusunnya Raperda Penanggulangan Kemiskinan (bidang Kesejahteraan Sosial)</li> </ul>



3.	BAGIAN HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan internal dalam pembentukan produk hukum daerah masih belum optimal;</li> <li>- Masih lemahnya data/alat bukti di Perangkat Daerah dalam penanganan perkara gugatan TUN dan Perdata;</li> <li>- Perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan tingkat pusat tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaan dengan cepat, sehingga menyebabkan terjadinya mispersepsi dalam implementasinya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</li> <li>- Peningkatan evaluasi produk hukum daerah khususnya terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat;</li> <li>- Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum dan HAM bagi aparatur dan masyarakat melalui Peningkatan intensitas sosialisasi dan publikasi serta penyuluhan hukum terpadu.</li> </ul>
4.	BAGIAN KERJASAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi sasaran yang akan di kerjasamakan harus lebih terencana</li> <li>- Kesiapan leading sector dalam melaksanakan tindak lanjut kerja sama yang sudah dilaksanakan.</li> <li>- Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam mengoperasikan produk hasil kerja sama;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekuatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pengelola Kerjasama lingkup dalam dan luar negeri dalam meningkatkan dan mengoptimalkan potensi sektor-sektor kerjasama.</li> <li>- Adanya fokus kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam bidang perbaikan lingkungan melalui pelatihan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang perbaikan lingkungan dan tata ruang, pemanfaatan teknologi perbaikan lingkungan dan pemetaan terhadap upaya pembenahan kondisi lingkungan di Kota Bandung (penyusunan improvement plan/masterplan).</li> <li>- Adanya komitmen untuk menyelenggarakan kerja sama yang efektif dan memberikan benefit terhadap Pemerintah Daerah Kota Bandung yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.</li> </ul>



5.	BAGIAN PEREKONOMIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor internal masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan latar belakang pendidikan terkait kebijakan ekonomi</li> <li>- Belum adanya SOP tentang integrasi data dan informasi tentang program dan kegiatan pengembangan ekonomi mikro</li> <li>- Kurangnya Sumber Daya Manusia (Staf di Sub Bagian Pembinaan BUMD)</li> <li>- Kurangnya Sumber Daya Pegawai sehingga menghambat pekerjaan.</li> <li>- Kurang transparan dalam pemberian data sehingga data masih belum akurat dan terarah.</li> <li>- Fasilitas yang tidak memadai, sehingga mengganggu proses pekerjaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dukungan regulasi tingkat pusat dan daerah</li> <li>- Adanya dukungan teknologi informasi dan sarana pelaksanaan program</li> <li>- Adanya komitmen dari Pimpinan</li> <li>- Dukungan pendanaan untuk menyediakan tenaga konsultan</li> <li>- Meningkatnya komunikasi antar OPD sehingga koordinasi dapat berjalan lancar.</li> </ul>
6.	BAGIAN ADINISTRASI PEMBANGUNAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditunjang dengan peraturan yang memadai dalam melaksanakan tupoksi</li> <li>- Tersedianya sistem aplikasi dalam menunjang efektifitas dan efisiensi kerja</li> <li>- Adanya tenaga ahli yang membantu dalam pertimbangan desain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuantitas dan kualifikasi SDM yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan ideal</li> <li>- Belum semua Perangkat Daerah mengikuti mekanisme monev pengendalian kualitas dan penyelenggaraan pengesahan desain</li> <li>- Belum optimalnya tugas sinkronisasi program pembangunan</li> </ul>
7.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya insentif terhadap pelaku pengadaan barang/jasa menjadi pemacu bagi pelaku pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Telah dibentuk unit kerja pengadaan barang jasa (UKPBJ) pada bagian layanan pengadaan yang mengintergrasikan 3 fungsi yaitu fungsi pembinaan, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengelolaan sistem informasi pengadaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pelaku pengadaan barang/jasa dalam memahami prosedur pengadaan barang/jasa sesuai dengan system informasi serta peraturan yang berlaku.</li> </ul>



8.	BAGIAN ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidaksesuaian nomenklatur Perangkat Daerah dengan Kementerian/ Lembaga menyebabkan sulitnya pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan urusan/ program kegiatan dari Pemerintah Pusat</li> <li>- Beban kerja organisasi belum tergambar</li> <li>- Adanya kepentingan Politik dari legislatif di Daerah dalam menata Organisasi Perangkat Daerah</li> <li>- Regulasi yang selalu berubah</li> <li>- Perampingan Organisasi yang menyebabkan hilangnya beberapa jabatan</li> <li>- Kurangnya Sarana dan Prasarana pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>- Terbatasnya Sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitas</li> <li>- Kurangnya pemahaman ASN terhadap TUSI dan Target Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat regulasi/ pedoman dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan</li> <li>- Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>- Adanya aplikasi e-Standar Pelayanan Publik</li> <li>- Regulasi</li> </ul>
9.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban kerja organisasi belum tergambar karena masih merupakan Bagian baru,</li> <li>- Regulasi yang sering cepat berubah dan berganti,</li> <li>- Terbatasnya Sumberdaya manusia terutama sumber daya ASN serta kualitas yang perlu dikembangkan sehingga mempengaruhi pola kerja dan fungsi tertentu,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik secara internal ataupun melalui IKM,</li> <li>- Terdapat regulasi/ pedoman dalam melaksanakan tugas fungsi,</li> <li>- Perkembangan penguasaan dan penggunaan teknologi informasi berbasis IT</li> </ul>
10.	BAGIAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen kepala daerah terhadap penataan lingkungan perkantoran yang baik dalam rangka menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>- Kewenangan yang diatur dalam Peraturan Walikota</li> <li>- Ketersediaan anggaran</li> <li>- Kompetensi Pegawai yang memiliki sertifikat barang/jasa</li> <li>- Kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi</li> <li>- Terdapat basis system data yang kepegawaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang akuratnya data status asset sarana dan prasarana</li> <li>- Belum terdapat manajemen pengelolaan sarana prasarana yang tersusun secara sistematis</li> <li>- Sering ditemukan ketidaksesuaian rencana kebutuhan barang/jasa</li> <li>- Layanan tidak tepat waktu</li> </ul>

11.	BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban kerja organisasi belum tergambar karena masih merupakan Bagian baru,</li> <li>- Regulasi yang sering cepat berubah dan berganti,</li> <li>- Terbatasnya Sumberdaya manusia terutama sumber daya ASN serta kualitas yang perlu dikembangkan sehingga mempengaruhi pola kerja dan fungsi tertentu,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik secara internal ataupun melalui IKM,</li> <li>- Terdapat regulasi/pedoman dalam melaksanakan tugas fungsi,</li> <li>- Perkembangan penguasaan dan penggunaan teknologi informasi berbasis IT</li> </ul>
-----	---	--	---

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung

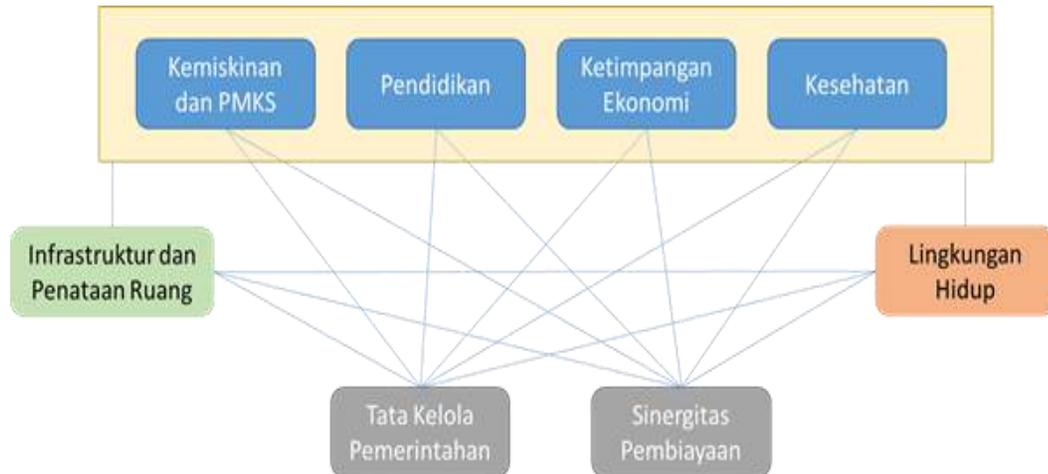
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Permasalahan pembangunan Kota Bandung.
2. Dinamika internasional, nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Bandung.
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Bandung.
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Kota Bandung yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kota Bandung.
5. KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil telaah terhadap Isu Global, isu nasional, Isu Regional, SDGs, Capaian kinerja RPJMD tahun lalu dan prediksi permasalahan yang akan datang, diidentifikasi terdapat 8 Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bandung. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penanganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu-isu dalam skema keterkaitan, dapat dilihat pada diagram berikut ini.

**Gambar 3. 3**  
**Isu Strategis Kota Bandung**



Hasil telaahan dari Isu Strategis Kota Bandung yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas fungsi dapat diuraikan sebagaimana berikut :

**Tabel 3. 5**  
**Isu Strategis Berdasarkan Tugas Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis**

<b>Tugas Fungsi</b>	<b>Isu Strategis</b>
1. Pengordinasian penyusunan kebijakan daerah	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah	2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	3. Tata Kelola Pemerintahan
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah	4. Ketimpangan Ekonomi
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya	5. Optimalisasi Infrastruktur dan Penataan Ruang
	6. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan
	7. Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS
	8. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan

Berdasarkan hasil penelaahan dari Isu-isu Strategis yang sudah disesuaikan dengan tugas fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana di atas, dapat di jabarkan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3. 6**  
**Penjabaran Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah**

NO	BAGIAN	ISU STRATEGIS
1.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Nilai LPPD dalam Optimalisasi Indikator Kinerja Kunci dari aspek pengukuran kinerja Urusan Wajib, Urusan Penunjang dan Urusan Pilihan.</li> <li>- Penilaian Kecamatan Berkinerja Baik dapat diukur dengan Laporan Bulanan Kecamatan yang harus memenuhi kriteria penilaian dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi Kelurahan masing-masing agar melakukan laporan secara disiplin, sehingga penilaian laporan kegiatan di Kecamatan dapat terukur.</li> <li>- Penentuan Batas Antar Wilayah dan Tapal Batas antara Wilayah ditentukan oleh luas daerah/wilayah keseluruhan dan wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.</li> </ul>
2.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan kebijakan-kebijakan terkait Sosial Keagamaan, Kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial.</li> <li>- Mengoptimalkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah terkait.</li> </ul>
3.	BAGIAN HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain tingginya ekspektasi terhadap layanan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung dalam kerangka Reformasi Birokrasi.</li> </ul>
4.	BAGIAN KERJASAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi Kerjasama Wajib untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien.</li> <li>- Optimalisasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga lingkup Dalam dan Luar Negeri yang meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerjasama dalam pelayanan Publik;</li> <li>b. Kerjasama dalam pengelolaan Aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;</li> <li>c. Kerjasama investasi;</li> <li>d. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> </li> <li>- Optimalisasi kualitas evaluasi dan publikasi kerjasama</li> </ul>
5.	BAGIAN PEREKONOMIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turut Mendukung program prioritas kota bandung (Co Working Space) di wilayah Kecamatan</li> <li>- Mengoptimalkan Program pemulihan ekonomi berupa sinkronisasi dan fasilitasi kegiatan pembangunan ekonomi mikro berbasis kolaborasi dan inovasi meliputi proses pembiayaan modal usaha, perijinan, kapasitas produk, pengembangan jejaring pasar dan pendampingan usaha</li> <li>- Dalam melaksanakan fungsi Pembina teknis BUMD dan melaksanakan Tupoksi pembinaan BUMD sebagaimana tertuang dalam table identifikasi masalah, diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten, relevan dengan fungsi pembinaan serta kuantitas yang seimbang dengan jumlah BUMD yang dibina yaitu sebanyak 5 BUMD</li> <li>- Jumlah staf Kasubag Pembinaan BUMD saat ini sebanyak 2 orang</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan di segala bidang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan, sehingga dapat mengukur perkembangan ekonomi makro di Kota Bandung, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan</li> </ul>
6.	BAGIAN ADINISTRASI PEMBANGUNAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian kualitas desain dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam kegiatan pembangunan</li> <li>- Sinkronisasi program, desain dan pembangunan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur</li> <li>- Kualitas administratif pelaporan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan yang efektif dan efisien</li> </ul>
7.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain tingginya ekspektasi terhadap Perangkat Daerah (PD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung dalam kerangka Reformasi Birokrasi.</li> </ul>
8.	BAGIAN ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisasi berbasis kinerja (Performance based organization)</li> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>- Pemantapan akuntabilitas kinerja secara konsisten pada pemerintah kota dan seluruh perangkat daerah</li> </ul>
9.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Citra Positif Pimpinan Kota Bandung di Media</li> <li>- Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</li> <li>- Memfasilitasi Kegiatan Pimpinan Terkait Dengan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</li> </ul>
10.	BAGIAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan infrastruktur di area Balaikota yang belum sepenuhnya representative</li> <li>- Kaitan pengelolaan aset lingkup Sekretariat Daerah yang belum jelas masih tumpang tindih dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset</li> <li>- Belum adanya peraturan yang baru dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> </ul>
11.	BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pelayanan dan koordinasi persuratan, perencanaan, keuangan dan kepegawaian berbasis Jaringan IT.</li> <li>- Peningkatan dan pemerataan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara pada Penguasaan Teknologi IT dan Sistem yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan dan kepegawaian.</li> <li>- Kekurangan Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara sebagai koordinator dan pengelola tugas terutama pada Sub Tugas Perencanaan</li> <li>- Penguatan sarana prasarana pendukung Perencanaan Keuangan dan kepegawaian</li> </ul>



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Bandung**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Bandung yang mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Tujuan dan Sasaran (Sebelum Perubahan) Jangka Menengah Pelayanan**  
**Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Capaian RPJMD		Persentase capaian sasaran RPJMD	100	100	100	100	100
		Terselesaikannya permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terselesaikan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan (Skala 15)	12,60	12,70	12,80	12,90	13
			Nilai EPPD	-	-	3,4023	3,4033	3,4043
			Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
			Nilai IKM Setda	60	70	80	90	100

**Tabel 4. 2**  
**Tujuan dan Sasaran (Setelah Perubahan) Jangka Menengah Pelayanan**  
**Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Capaian RPJMD		Persentase capaian sasaran RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai LPPD	-	-	3,4023	3,4033	3,4043
			Nilai IKM Setda	60	70	87,7	87,8	87,9

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Setda Kota Bandung 2018-2023 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

**Tabel 4. 3**  
**Indikator Kinerja Utama (Iku) (Sebelum Reviu) Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2021- 2023**

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)/ Indikator Capaian Program	Keterangan
1	2	3	4
1	Terselesaikannya permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terselesaikan	Semua Bagian
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan (Skala 15)	Bagian Oganisasi
		Nilai EPPD	Bagian Tata Pemerintahan
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Bagian Perkapeg dan Bagian Umum
		Nilai IKM Setda	Semua Bagian

**Tabel 4. 4**  
**Indikator Kinerja Utama (Iku) (Setelah Reviu) Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2018 - 2023**

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)/ Indikator Capaian Program	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Kerjasama, Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi
		Nilai LPPD	Seluruh Bagian Lingkup Sekretariat Daerah dengan <i>leading sector</i> Bagian Tata Pemerintahan
		Nilai IKM Setda	Seluruh Bagian Lingkup Sekretariat Daerah dengan pengkompulir Bagian Organisasi



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Peran strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung, menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur yang menghambat investasi.

Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Kebijakan berdasarkan tugas fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, meliputi :

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
2. Meningkatnya produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum
3. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
4. Meningkatnya implementasi Kerjasama dalam dan luar negeri
5. Meningkatnya pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan
6. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota
7. Meningkatnya kualitas administrasi keuangan, kepegawaian dan kehumasan Setda



8. Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana prasarana internal Setda dan keprotokolan Pemda

**Tabel 5. 1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Bandung**

<b>Visi : “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”</b>			
<b>Misi 1 : Membangun Masyarakat Yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil dan Merata Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat</li> <li>- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalisasi kebijakan-kebijakan terkait kesejahteraan rakyat, sosial keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan.</li> <li>- Mengoptimalisasi koordinasi antar organisasi perangkat daerah terkait.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dibuatnya Naskah Akademik Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan sedang disusunnya Raperda Penanggulangan Kemiskinan (bidang Sosial Kemasyarakatan) dan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Biaya Transportasi Haji kota Bandung (untuk bidang Sosial Keagamaan)</li> </ul>
<b>Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Nilai LPPD dalam Optimalisasi Indikator Kinerja Kunci dari aspek pengukuran kinerja Urusan Wajib, Urusan Penunjang dan Urusan Pilihan.</li> <li>- Penilaian Kecamatan Berkinerja Baik dapat diukur dengan Laporan Bulanan Kecamatan yang harus memenuhi kriteria penilaian dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi Kelurahan masing-masing agar melakukan laporan secara disiplin, sehingga penilaian laporan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Melaksanakan koordinasi pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Bagian Pemerintahan.</li> <li>-Merumuskan perencanaan dalam penyusunan dokumen penelitian dan kajian pengembangan.</li> <li>-Penyusunan SOP pada Bagian Pemerintahan.</li> <li>-Memperjelas pemilihan kegiatan program prioritas</li> </ul>



		<p>di Kecamatan dapat terukur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penentuan Batas Antar Wilayah dan Tapal Batas antara Wilayah ditentukan oleh luas daerah/wilayah keseluruhan dan wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.</li> </ul>	<p>yang menjadi tugas dan fungsi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah, strategi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas evaluasi produk hukum</li> <li>b. Meningkatkan tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah</li> <li>c. Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah</li> <li>d. Meningkatkan pemahaman ASN dan masyarakat terhadap produk hukum</li> <li>e. Meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat</li> <li>f. Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hukum dan HAM)</li> <li>g. Meningkatkan kualitas penanganan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pemberian bantuan hukum</li> </ul> </li> </ul>	<p>Penyusunan SOP tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan Perda</li> <li>2. Rancangan Perwal</li> <li>3. Rancangan Kepwal</li> <li>4. Penyusunan SOP Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</li> </ol>
		<p>perkara Tata Usaha Negara (TUN) dan perdata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang perancangan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi Kerjasama Wajib untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun system pemerintahan yang lebih efektif dan efisien</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pengendalian kualitas desain dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam kegiatan pembangunan</li> <li>- Sinkronisasi program, desain dan pembangunan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur</li> <li>- Kualitas administratif pelaporan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan yang efektif dan efisien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi program, desain, pengendalian kualitas pembangunan dan optimalisasi monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi pembangunan.</li> <li>-Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan program, desain, pengendalian kualitas pembangunan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi pembangunan</li> <li>-Merumuskan bahan kebijakan dalam mendukung tugas lingkup program, desain, pengendalian kualitas pembangunan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi pembangunan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah belum tepat waktu, dan masih menumpuk pada akhir tahun anggaran</li> <li>- Adanya perubahan peraturan perundangan yang mengatur terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan SOP terkait dengan perencanaan penganggaran, pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pelaku pengadaan belum sepenuhnya dibuatkan rencananya.</li> <li>- Adanya perubahan kebijakan dan system pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih belum cukup dilaksanakan sosialisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah terkait untuk pengangkatan pelaku pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>-Melaksanakan peningkatan kapasitas pelaku pengadaan</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisasi berbasis kinerja (Performance based organization)</li> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>- Pemantapan akuntabilitas kinerja secara konsisten pada pemerintah kota dan seluruh perangkat daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan Kelembagaan berdasarkan pemetaan kinerja sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah</li> <li>- Peningkatan IKM melalui penataan Bisnis Proses dan SOP</li> <li>- Mengembangkan aplikasi yang terintegrasi dengan Perangkat Daerah di Kota Bandung</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Peningkatan pelayanan persuratan dan informasi berbasis Jaringan IT.</li> <li>- Kualitas SDM dan Penguasaan Teknologi IT yang belum merata pada masing-masing Sub Bagian</li> <li>- Gelombang pensiun, mutasi, rotasi dan promosi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun kedepan memerlukan SDM pengganti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan aplikasi surat yang terintegrasi dengan Perangkat Daerah di Kota Bandung</li> <li>- Sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi pengelolaan surat</li> <li>- Mengajukan permohonan penyediaan ASN yang memiliki kualifikasi/kompetensi</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Tata Usaha Pimpinan</li> <li>- Mengusulkan pelatihan penguasaan Teknologi IT dan publikasi public</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</li> <li>- Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan tata kelola sarana dan prasarana berbasis system informasi</li> <li>- Penyusunan standar kebijakan mutu baku perencanaan,</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar sarana dan prasarana pendukung layanan public</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengadaan, pemanfaatan dan pencatatan aset</li> <li>- Penyusunan prosedur tetap pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana</li> <li>- Peningkatan kualitas pegawai berbasis kompetensi</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi informasi pada Bagian Humas dan setiap OPD mengenai kebijakan Pemerintah Kota dan Pelayanan Publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan analisis berita untuk mengatasi berita negatif dengan menentukan fragmen-fragmen pemberitaan.</li> <li>- Pembentukan Tim Kehumasan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.</li> <li>- Merevisi SOP tambahan lingkup Bagian Humas.</li> <li>- Menyelenggarakan workshop/pelatihan kepada personil tim kehumasan Perangkat Daerah.</li> <li>- Mengajukan permohonan penyediaan SDM ASN yang memiliki kualifikasi/kompetensi di bidang kehumasan (desain grafis, penulis naskah sambutan dan jurnalistik)</li> <li>- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pembangunan melalui Media Informasi dan Public Relationship dalam bentuk pameran terhadap masyarakat.</li> <li>- Pengadaan sarana prasarana untuk menunjang pekerjaan kehumasan yang memadai.</li> </ul>
--	--	--	---

**Misi 3 : Membangun Perekonomian Yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Perekonomian Kota</li> <li>- Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin</li> <li>- Meningkatnya Kesempatan Kerja</li> </ul>	<p>- Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dalam mendorong potensi, peningkatan Daya Saing Kota dan produk unggulan daerah berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat perekonomian kota (Daya Beli Masyarakat, Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Pengendalian Inflasi) melalui strategi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daya beli dengan mengoptimalkan kegiatan pengendalian inflasi (TPID), membuka kemudahan akses pemodal bagi UMKM (KUR), fasilitasi kegiatan pelatihan, pameran, temu bisnis bagi UMKM agar produknya semakin berkembang (Sinkronisasi Program Kewirausahaan);</li> <li>b. LPE dengan sinkronisasi regulasi ekonomi makro Kota yang terintegrasi dengan regulasi teknis pelaksanaan lingkup OPD;</li> <li>c. PDRB Perkapita dengan meningkatkan Sentra Perindustrian dan Perdagangan, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan produksi di level pengusaha mikro dan kecil;</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan SOP lingkup Bagian Perekonomian khususnya terkait dengan perencanaan penganggaran, pelaksanaan program dan evaluasi program</li> <li>- Melakukan Publikasi dan komunikasi intensif dengan Perusahaan-Perusahaan melalui media pertemuan (road show, coffe morning&amp;gala dinner, rapat rutin, dsbnya)</li> <li>- Mengoptimalkan aplikasi lingkup bagian perekonomian sebagai salah satu media layanan informasi bagi publik</li> <li>- Meningkatkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi khususnya terkait timeline, target dan pengolahan data sebagai bahan kebijakan pimpinan;</li> <li>- Mengajukan permohonan penyediaan SDM ASN yang memiliki kualifikasi/kompetensi di bidang ekonomi (akuntansi, analisis investasi, komunikasi publik dan informatika, perencana program dan keuangan)</li> <li>- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pembangunan lingkup bagian perekonomian melalui kegiatan</li> </ul>



		<p>d. Inflasi dengan mengoptimalkan keterjangkauan Harga, Ketersediaan Paasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif dengan stakeholder terkait;</p> <p>2. Ketersediaan dan kualitas SDM;</p> <p>a. Angkatan kerja</p> <p>b. Pelatihan dan Pendidikan</p> <p>c. Kualitas Hidup Masyarakat</p> <p>- Memperkuat aspek kelembagaan dalam mengkoordinasikan dan sinkronisasi program pengendalian harga kebutuhan bahan pokok dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui monitoring ketersediaan dan kelancaran pasokan kebutuhan bahan pokok serta mengoptimalkan kegiatan yang terkait dengan pengendalian inflasi.</p>	<p>asistensi, workshop dan Diklat;</p>
--	--	---	--

**Misi 4 : Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan</li> <li>- Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas</li> <li>- Meningkatnya Layanan Air Bersih</li> <li>- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung</li> </ul>	-	-



<b>Misi 5 : Mengembangkan Pembiayaan Kota Yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<p>Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan</li> <li>- Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta dalam Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga lingkup Dalam dan Luar Negeri yang meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerjasama dalam pelayanan Publik</li> <li>b. Kerjasama dalam pengelolaan Aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memeberikan pendapatan bagi daerah</li> <li>c. Kerjasama investasi</li> <li>d. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul> </li> <li>- Optimalisasi kualitas evaluasi dan publikasi kerjasama</li> </ul>	<p>-Keterbatasan anggaran diharapkan tidak ;lagi menjadi penyebab utama sempitnya ruang gerak daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat signifikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sinkronisasi dan kolaborasi Program Pembangunan Kota yang belum terakomodir oleh APBN/APBD dengan pihak swasta melalui Program TJSL Perusahaan;</li> <li>- Ketersediaan infrastruktur dan sumberdaya alam;               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Modal Fisik berupa infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitasnya mendukung aktivitas ekonomi daerah</li> <li>b. Modal Alamiah berupa kondisi geografis maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya</li> <li>c. Teknologi Informasi merupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing.</li> </ul> </li> </ul>	<p>- Melakukan koordinasi dan asistensisecara intensif dengan Kecamatan dan Perangkat Daerah terkait perencanaan dan sinkronisasi pelaksanaan Program Berbasis Kolaborasi melalui Program CSR Perusahaan berupa penyusunan Timeline dan target outcome yang akan dicapai</p>

Berdasarkan hasil analisa strategi bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, maka dapat disimpulkan kebijakan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai berikut :

**Tabel 5. 2**  
**Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Bandung**

Tugas Fungsi	Kebijakan	Keterangan
1	2	3
1. Pengordinasian penyusunan kebijakan daerah 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya	Meningkatnya pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, keagamaan, budaya, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan	Bagian Kesra dan Bagian Ekonomi
	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
	Meningkatnya produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum	Bagian Hukum
	Meningkatnya implementasi Kerjasama dalam dan luar negeri	Bagian Kerjasama
	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Bagian Organisasi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana prasarana internal Setda dan keprotokolan Pemerintah	Bagian Umum dan Bagian Prokompim
	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan, kepegawaian dan kehumasan Setda	Bagian Perkapeg dan Bagian Prokompim
	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota	Bagian Adbang dan Bagian PBJ



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan sebagai program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk monitoring sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reuiu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reuiu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja

PD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reuiu renstra menunjukkan tingginya komitmen PD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target



kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah periode tahun 2018–2023 terbagi pada 11 (Sebelas) Bagian di lingkungan Setda Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 6. 1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Bandung 2018-2023**

**1. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Persentase Capaian RPJMD		Persentase capaian sasaran RPJMD				-	100		100		100		100		100		100		
	Terselesaikanya permasalahan penyelesaian pemerintahan dan pembangunan yang terselesaikan	Persentase permasalahan penyelesaian pemerintahan dan pembangunan yang terselesaikan				100	100		100		100		100		100		100		
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokras	Nilai LPPD				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi										



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	i																			
		Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Baik				51.61	60		70		80		90		100					
			4.05.4.05.02.40	Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	553.090.000	Sangat Tinggi	652.401.200										



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4.05.02.40.001	Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	400.020.000	1 Dokumen	484.024.200									
			4.05.02.40.002	Kegiatan Fasilitasi Pelaporan Standart Pelayanan Minimal	Jumlah SPM yang dievaluasi	6 PD	6 PD	153.070.000	6 PD	168.377.000									
			4.05.02.40.001	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Jumlah pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pilpres, Pilleg dan Pilkada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	62.192.250	-	-									



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4.05.02.41.01	Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu	Persentase terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilpres, Pileg dan pilkada	100 %	100%	62.192.250	-	-									
			4.05.02.42	Program Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah	Persentase Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah	100 %	100 %	294.169.773	100 %	323.586.750									
			4.05.02.41	Fasilitasi Dan Inventarisasi, Pemantauan Dan Penegasaan Batas Daerah Dan Batas Wilayah	Dokumen Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	135.674.773	1 Dokumen	149.242.250									



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4.05.02.42.002	Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Inventarisasi Dan Identifikasi Pembakuan Namarupabumi	Dokumen laporan inventarisasi dan identifikasi pembakuan rupa bumi	1 Dokumen	1 Dokumen	158.495.000	1 Dokumen	174.344.500									
			4.05.02.43	Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	100	33,33	3.171.397.223	50,00	3.488.536.945									
			4.05.02.43.001	Pemantauan Inovasi Manajemen Pemerintahan Dan Pembangunan Kewilaya	Dokumen perencanaan, realisasi, monev, dan laporan akhir PIPPK	4 Dokumen	4 Dokumen	2.033.020.000	4 Dokumen	2.236.322.000									



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				han															
			4.05. 4.05. 02.4 3.00 2	Pemantauan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya pelimpahan sebagian urusan Wali Kota kepada Camat	1 Dokumen	1 Dokumen	737.613.750	1 Dokumen	811.375.125									
			4.05. 4.05. 02.4 3.00 4	Fasilitasi Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kewilayahan	Dokumen Validasi Triwulan SIP Bandung Juara dan Hasil Penilaian kegiatan evaluasi kinerja Camat dan Lurah	4 Dokumen	4 Dokumen	400.763.473	4 Dokumen	440.839.820									



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4.05. 4.05. 02.0 1	PROGRA M PELAYAN AN ADMINIS TRASI PERKANT ORAN	Pemenuh an laporan ketataus ahaan tepat waktu		4 Lapor an	932. 103. 688	4 Lapor an	1.28 0.03 8.05 7									
			4.05. 4.05. 02.0 1	Penyedia an Alat Tulis Kantor	Terpenuhi nya Penyedia an ATK		4 Kegiat an	84.4 47.5 45	4 Kegiat an	92.8 92.3 00									
			4.05. 4.05. 02.0 1.00 8	Penyedia an jasa kebersiha n kantor	Terciptan ya ruangan kantor yang bersih		4 Kegiat an	103. 449. 400	4 Kegiat an	113. 794. 340									



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4.05. 4.05. 02.0 1.00 9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terawatnya peralatan kerja		4 Kegiatan	27.6 00.0 00	4 Kegiatan	30.3 60.0 00									
			4.05. 4.05. 02.0 1.01 4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		4 Kegiatan	77.7 85.0 76	4 Kegiatan	85.5 63.5 84									
			4.05. 4.05. 02.0 1.01 5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan		4 Kegiatan	19.2 09.3 20	4 Kegiatan	21.1 30.2 52									



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4.05. 4.05. 02.0 1.01 7	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan		4 Kegiatan	169. 252. 347	4 Kegiatan	186. 177. 582									
			4.05. 4.05. 02.0 1.01 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah		4 Kegiatan	450. 360. 000	4 Kegiatan	495. 396. 000									
			4.05. 4.05. 02.0 1.01 9	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran /Teknis	Terfasilitasinya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran /Teknis	-	-	-	1 Laporan	254. 724. 000									
			4.05. 4.05. 02.0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya sarana penunjang peningkatan disiplin aparatur		1 Kegiatan	84.2 00.0 00	1 Kegiatan	92.2 60.0 00									



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4.05. 4.05. 02.0 3.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya		16 Stel	84.2 00.0 00	-	-									
Persentase Capaian RPJMD		Persentase capaian sasaran RPJMD				-	100		100		100		100		100				
	Terselesaikannya permasalahan penyelesaian pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Persentase permasalahan penyelesaian pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti				100	100		100		100		100		100		100		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai LPPD				Sangat Tinggi					3.4023		3.4033		3.4043		3.4043		
			4.1.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti						100 %	3.844.116.350	100 %	4.228.527.985	100 %	4.651.380.784	100 %	4.651.380.784	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Jumlah pengendalian dan evaluasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat secara berkala.						100 %		100 %		100 %		100 %			
					Cakupan Perumusan Kebijakan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintah						100 %		100 %		100 %		100 %			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					ahan dan Kesejahteraan Rakyat Sesuai Prosedur														
			4.1.0 2.19	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Tata Pemerintahan ditindaklanjuti						100 %		100 %		100 %		100 %		
					Cakupan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Tata Pemerintahan Sesuai Prosedur							100 %	3.84 4.11 6.35 0	100 %	4.22 8.52 7.98 5	100 %	4.651.380. 784	100 %	4.651.380. 784



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Dokumen LPPD terverifikasi dan tepat waktu						100 %		100 %		100 %		100 %		
			4.1.0 2.19. 01	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)						1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	620.098.138	
					Jumlah Dokumen Money Pelaksanan Tugas Urusan Pemerintahan lingkup Administrasi							1 Dokumen	512.477.800		1 Dokumen	563.725.580		1 Dokumen	620.098.138



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Pemerintahan															
			4.1.0 2.19. 02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan, realisasi, monev, dan laporan akhir PIPPK						4 Laporan	1.570.078.550	4 Laporan	1.727.086.405	4 Laporan	1.899.795.046	4 Laporan	1.899.795.046		
					Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Camat							4 Laporan			4 Laporan				4 Laporan	
					Jumlah Dokumen Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah							1 Dokumen			1 Dokumen				1 Dokumen	
					Jumlah Laporan Pembabu							1 Laporan			n/a		n/a		n/a	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					kan namarup abumi														
					Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat						1 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan
			4.1.0 2.19. 03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD						1 Dokumen	1.76	1 Dokumen	1.93	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen
					Jumlah Dokumen LKPJ						n/a	1.56 0.00 0	1 Dokumen	7.71 6.00 0	1 Dokumen	2.131.487. 600	1 Dokumen	2.131.487. 600	
Persentase capaian sasaran RPJMD	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Baik	4.1.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran						100 %	1.28 1.71 3.15 0	100 %	1.40 9.88 4.46 5	100 %	1.422.701. 597	100 %	1.422.701. 597	
			4.1.0 1.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						100 %	1.15 0.97 4.95 0	100 %	1.26 6.07 2.44 5	100 %	1.392.679. 690	100 %	1.392.679. 690	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Nilai IKM Bagian Tapem						85		87		90		90		
			4.1.0 1.2.0 6.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor triwulanan						4 Laporan	275. 213. 350	4 Laporan	302. 734. 685	4 Laporan	333.008.15 4	4 Laporan	333.008.15 4	
			4.1.0 1.2.0 6.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga triwulanan						4 Laporan	2.92 7.80 0	4 Laporan	3.22 0.58 0	4 Laporan	3.542.638	4 Laporan	3.542.638	
			4.1.0 1.2.0 6.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Laporan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan						4 Laporan	69.4 67.8 00	4 Laporan	76.4 14.5 80	4 Laporan	84.056.038	4 Laporan	84.056.038	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					triwulanan														
			4.1.0 1.2.0 6.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman						100 %	397.960.000	100 %	437.756.000	100 %	481.531.600	100 %	481.531.600	
			4.1.0 1.2.0 6.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur						100 %	405.406.000	100 %	445.946.600	100 %	490.541.260	100 %	490.541.260	
			4.1.0 1.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100 %	109.178.200	100 %	120.096.020	100 %	132.105.622	100 %	132.105.622	
			4.1.0 1.2.0 8.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor						2 Jasa	109.178.200	2 Jasa	120.096.020	2 Jasa	132.105.622	2 Jasa	132.105.622	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4.1.0 1.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						100 %	21.560.000	100 %	23.716.000	100 %	26.087.600	100 %	26.087.600	
			4.1.0 1.2.0 9.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1 Laporan	21.560.000	1 Laporan	23.716.000	1 Laporan	26.087.600	1 Laporan	26.087.600	



## 2. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target		target		target		target		target		target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	Terselesainya permasalahan penyelenggaraan dan pembangunan	Terselesaikannya permasalahan penyelenggaraan dan pembangunan bidang Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Keagamaan		<b>Program Sosial Keagamaan</b>	<b>Persentase rancangan Kebijakan Bidang Sosial Keagamaan ditindaklanjuti</b>	-	<b>100</b>	<b>1.938.374.590,-</b>	<b>25 %</b>	<b>466.580.000,-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan rakyat
				Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan	Terlaksananya Training of Trainer Tahfidz Al-Qur'an dan Pembinaan Guru Non Muslim		600	961.537.303	<b>200</b>	197.700.000,-									Bagian Kesejahteraan rakyat
				Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Kegiatan	1. Terlaksananya Kegiatan safari Jumat 2. Terlaksananya		30	187.800.000,-	<b>0</b>	0									Bagian Kesejahteraan rakyat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target		target		target		target		target		target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Keagamaan	a Safari Ramadhan 3. Terlaksananya Safari Minggu														
				Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung	Terfasilitasinya Operasional Masjid Agung Al Ukhuwwah dan Masjid Ar-Risallah		12	583.387.287	12	268.880.000									Bagian Kesejahteraan rakyat
				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sosial Keagamaan	Naskah Akademik dan Draft Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kota Bandung		1	205.650.000	1	0									Bagian Kesejahteraan rakyat
				<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan Masyarakat,</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan Masyarakat,</b>		<b>2 keg</b>	<b>241.425.000</b>											Bagian Kesejahteraan rakyat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target		target		target		target		target		target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				<b>Pendidikan dan Sosial Budaya</b>	<b>Pendidikan dan Sosial Budaya</b>														
				Kegiatan Peningkatan Fasilitas Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Masalah Prioritas dan Penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberculosis/TB		2 dok	80.000.000											Bagian Kesejahteraan rakyat
				kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tim Pembina UKS Kota Bandung	Terlaksananya Pembinaan TP Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (UKS/M)		3 laporan	141.825.000											Bagian Kesejahteraan rakyat
				<b>Program koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi dan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>			-	-		<b>108.320.000</b>									Bagian Kesejahteraan rakyat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target		target		target		target		target		target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				<b>dan Masyarakat</b>															
				Kegiatan Peningkatan Fasilitas Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Masalah Prioritas dan Penanggulangan HIV/Aids untuk Meningkatkan Pemahaman dan Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam Penanggulangan HIV Aids;		-		- 2 lap	4.600.000									Bagian Kesejahteraan rakyat
				kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tim Pembina UKS Kota Bandung	Terlaksananya Pembinaan TP UKS Kota Bandung		-		- 2 lap	36.900.000									Bagian Kesejahteraan rakyat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target		target		target		target		target		target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				<b>Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Lingkup Kesejahteraan Sosial, Kemasyarakatan dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Persentase Rancangan Kebijakan bidang Sosial kemasyarakatan ditindaklanjuti</b>		<b>25%</b>	<b>564.556.000</b>											Bagian Kesejahteraan rakyat
				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Kemasyarakatan dan Penanggulangan Kemiskinan	Rumusan kebijakan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan		2 Dok	564.556.000											Bagian Kesejahteraan rakyat
				<b>Program koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan</b>	<b>Persentase Rancangan Kebijakan bidang Sosial kemasyarakatan</b>				<b>25%</b>	<b>66.820.000</b>									Bagian Kesejahteraan rakyat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target		target		target		target		target		target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				<b>Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan</b>	<b>tan ditindaklanjuti</b>														
				Kegiatan Fasilitasi Tindaklanjutan Peraturan Daerah Bidang Sosial Kemasyarakatan	Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi perangkat daerah dalam menyusun perwal/kepwal				2 lap	33.520.000									Bagian Kesejahteraan rakyat
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesra dan Kemasyarakatan	Terfasilitasinya kegiatan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) Kota Bandung				3 lap	33.300.000									Bagian Kesejahteraan rakyat
<b>SETELAH PERUBAHAN SOTK 2021-2023</b>																			
				<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN</b>	Persentase permasalahan Penyelenggaraan	-	-	-	-	-	100%	62.215.723.500	100%	63,567,955,840	100%	63,567,955,840	100%	63,567,955,840	Bagian Kesejahteraan rakyat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target		target		target		target		target		target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				<b>RAAN RAKYAT</b>	Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat														
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Jumlah kegiatan fasilitasi Bina Mental Spiritual	-	-	-	-	-	<b>5 dok</b>	<b>62.215.723.500</b>	<b>5 dok</b>	<b>63,567,955,840</b>	<b>5 dok</b>	<b>63,567,955,840</b>	<b>5 dok</b>	<b>63,567,955,840</b>	Bagian Kesejahteraan rakyat
					Persentase Permasalahan diselesaikan lingkup Kesejahteraan sosial	-	-	-	-	-	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		Bagian Kesejahteraan rakyat
					Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan lingkup kesejahteraan Masyarakat (bidang kesehatan	-	-	-	-	-	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		Bagian Kesejahteraan rakyat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target		target		target		target		target		target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan fasilitasi Bina Mental Spiritual	-	-	-	-	-	<b>5 dok</b>	61.928.880.000	<b>5 dok</b>	62,575,875,000	<b>5 dok</b>	62,575,875,000	<b>5 dok</b>	62,575,875,000	Bagian Kesejahteraan rakyat
				Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan sosial	Persentase Permasalahan diselesaikan lingkup Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	130.230.000	<b>100%</b>	129,392,850	<b>100%</b>	129,392,850	<b>100%</b>	129,392,850	Bagian Kesejahteraan rakyat
				Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan lingkup kesejahteraan Masyarakat (bidang kesehatan)	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	156.613.500	<b>100%</b>	92,575,000	<b>100%</b>	92,575,000	<b>100%</b>	92,575,000	Bagian Kesejahteraan rakyat
Terlaksananya reformasi Birokrasi yang	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>774.964.699</b>	<b>100%</b>	<b>662.466.660</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan rakyat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target		target		target		target		target		target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
efektif dan efisien	birokrasi	baik																	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Kebersihan Kantor	12 laporan	12 laporan	58.852.200	12 laporan	174.297.200,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan rakyat
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	49 Unit	49 Unit	28.297.500	49 Unit	20.180.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan rakyat
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan ATK	1 Laporan	1 Laporan	73.605.979	1 Laporan	43.082.810,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan rakyat
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	5 Jenis 51555 lembar	5 Jenis 51555 lembar	105.228.500	5 Jenis 51555 lembar	42.565.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan rakyat
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Laporan	1 Laporan	11.055.000	1 Laporan	10.496.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan rakyat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target		target		target		target		target		target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 laporan	12 laporan	6.408.000	12 laporan	4.392.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan rakyat
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	72 rapat	72 rapat	62.985.520	72 rapat	49.157.250,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan rakyat
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 laporan	12 laporan	428.532.000	12 laporan	262.500.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan rakyat
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Kebersihan Kantor	12 laporan	12 laporan	58.852.200	12 laporan	55.796.400,-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan rakyat
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>1 laporan</b>	<b>42.035.400</b>	<b>1 laporan</b>	<b>14.520.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Bagian Kesejahteraan rakyat</b>
				Kegiatan Pengadaan	Jumlah Pakaian Dinas		1 laporan	42.035.400	1 laporan	14.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesejahteraan



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target		target		target		target		target		target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Beserta Perlengkapannya				1 laporan										rakyat
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			1 laporan	129.412.662	1 laporan	-									Bagian Kesejahteraan rakyat
				Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah dokumen pengadaan perlengkapan peralatan aparatur		1 laporan	129.412.662	1 laporan	-									Bagian Kesejahteraan rakyat
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>		-	-	-	-	100%	808.404.340	100%	636.775.799	100%	700.453.379	100%	700.453.379	Bagian Kesejahteraan rakyat
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	-	100%	341.584.700	100%	293.874.840	100%	250.378.560	100%	250.378.560	Bagian Kesejahteraan rakyat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target		target		target		target		target		target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibutuhkan	-	-	-	-	-	4 jenis	4.201.120,00	4 jenis	0	100%	4.201.120,00	100%	4.201.120,00	Bagian Kesejahteraan rakyat
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	100%	43.058.180,00	100%	30.786.600	100%	30.786.600	100%	30.786.600	Bagian Kesejahteraan rakyat
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pelaporan penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	-	-	-	4 laporan	4.769.600,00	4 laporan	16.448.600	4 laporan	10.000.000	4 laporan	10.000.000	Bagian Kesejahteraan rakyat
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan kegiatan Makan minum rapat dan makan minum tamu	-	-	-	-	-	72 laporan	40.412.800,00	4 laporan	65.090.840	100%	65.090.840	100%	65.090.840	Bagian Kesejahteraan rakyat
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	-	-	12 laporan	42.564.000,00	12 laporan	25.300.000	12 laporan	25.300.000	12 laporan	25.300.000	Bagian Kesejahteraan rakyat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target		target		target		target		target		target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	12 laporan	4.377.000,00	12 laporan	5.172.000	12 laporan	5.000.000	12 laporan	5.000.000	Bagian Kesejahteraan rakyat
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai Prosedur						100%	202.202.000	100%	151.076.800	100%	110.000.000	100%	110.000.000	
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>445.989.640</b>	<b>100%</b>	<b>433.818.000</b>	<b>100%</b>	<b>490.588.600</b>	<b>100%</b>	<b>490.588.600</b>	<b>Bagian Kesejahteraan rakyat</b>
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	48 jasa/bulan	445.989.640	48 jasa/bulan	433.818.000	48 jasa/bulan	490.588.600	48 jasa/bulan	490.588.600	Bagian Kesejahteraan rakyat
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>20.830.000</b>	<b>100%</b>	<b>16.080.000</b>	<b>100%</b>	<b>16.080.000</b>	<b>100%</b>	<b>16.080.000</b>	<b>Bagian Kesejahteraan rakyat</b>



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target		target		target		target		target		target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Kerja	-	-	-	-	-	31 Unit	20.830.000	24 Unit	16.080.000	24 Unit	6.080.000	24 Unit	6.080.000	Bagian Kesejahteraan rakyat

### 3. BAGIAN HUKUM

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			2.1.1.1.2	Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah		100%	1.150.434.000												Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)
			2.1.1.1.3.4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung		100%	990.165.808												Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)
			2.1.1.1.1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron		100%	115.000.000												Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
			2.1.1.35	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhiya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%	74.570.000											
TAHUN 2020																			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			2.1.1.1	Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah				100%	925.599.250										Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)
			2.1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi nya Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung				100%	1.057.333.250										Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)
			2.1.2.3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-				100%	120.750.000										Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					undangan yang baru dan lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
			2.1.2.17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur														
<b>SETELAH PERUBAHAN SOTK 2021 - 2023</b>																			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran						100%	813,317,300	100%	894,649,030	100%	984,13,933			Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Kabupaten/Kota	IKM Bagian Hukum														
			4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum Daerah yang harmonis dan sinkron Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Hukum ditindaklanjuti						100%	969,769,250	100%	1,066,746,175	100%	1,173,420,793			Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)



#### 4. BAGIAN KERJASAMA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup dalam negeri dan Luar Negeri	<b>1.2</b> <b>0.1.</b> <b>03.</b> <b>13.</b> <b>25</b>	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Presentase Naskah Kerja Sama Lingkup Dalam Negeri yang Diimplementasikan		60%	5.127.155.000	65%	6.495.039.180									Bagian Kerja Sama	
					Presentase Naskah Kerja Sama Lingkup Luar Negeri yang Diimplementasikan		30%		35%										Bagian Kerja Sama	



			4.05 .4.0 5.02 .05. 36.0 01	Kegiatan Fasilitas i Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Fasilitas i Kerja Sama Daerah dengan Pihak ke Tiga	4 Lapor an	4 Lapor an	373,93 6,000	4 Lapor an	392.6 3 2.800 , 00									Bagian Kerja Sama	
			4.05 .4.0 5.02 .05. 36.0 02	Fasilitas i Asosiasi i Pemerintah ah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	Jumlah Laporan Fasilitas i Asosiasai Pemerintah ah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	4 Lapor an	4 Lapor an	226,06 4,000	4 Lapor an	237,3 6 7,200									Bagian Kerja Sama	
			4.05 .4.0 5.02 .05.	Kegiatan Kerjasama Pemerint ah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas i Kerjasama Pemerintah	4 Lapor	4 Lapor	4.527. 155.00	4 Lapor	5,803 ,									Bagian Kerja Sama	



			36.003	dengan Pihak Luar Negeri	h Daerah dengan Pihak Luar Negeri	a n	an	0	an	512,750										
				Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Evaluasi Kerja Sama	-	-	-	-	-										Bagian Kerja Sama
			4.05.02.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bagian Kerja Sama	Nilai 75	Nilai 75	991,772,001	Nilai 76	1,041,361,536										Bagian Kerja Sama
					Terpenuhinya Laporan Ketatausahaan Tepat Waktu	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen											Bagian Kerja Sama
				Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	4 Laporan	10.890.000	4 Laporan	19.331.340										Bagian Kerja Sama
				Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan	4	4	29.800	4	15.75										Bagian Kerja Sama



				Perbaikan Peralatan Kerja	n Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Laporan	Laporan	.000	Laporan	0 .000											
				Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	4 Laporan	4 Laporan	83.666.917	4 Laporan	68.149.062										Bagian Kerja Sama	
				Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	4 Laporan	4 Laporan	45.569.000	4 Laporan	28.589.550											Bagian Kerja Sama
				Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Laporan	4 Laporan	7.520.800	-	-											Bagian Kerja Sama
				Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	4 Laporan	4 Laporan	2.040.000	4 Laporan	2.142.000											Bagian Kerja Sama



				a n	Undangan																
				Kegiatan Penyedia an Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Kegiatan Penyedia an Makanan dan Minuman	4 Lapor an	4 Lapor an	90.001 .760	4 Lapor an	37.28 6 .400										Bagian Kerja Sama	
				Kegiatan Rapat- rapat Koordina si dan Konsulta si ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4 Lapor an	4 Lapor an	572.88 0.000	4 Lapor an	296.2 7 3.235											Bagian Kerja Sama
				Kegiatan Penyedia an Jasa Tenaga Penduku ng Administ rasi Perkantoran / Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Penduku ng Administ rasi Perkantoran / Teknis Perkantoran	12 Lapo ran	12 Lapor an	149.40 4.424	12 Lapor an	156.8 7 4.635											Bagian Kerja Sama



**SETELAH PERUBAHAN SOTK 2021-2023**

			<b>4.01.02</b>	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	Presentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kerja sama yang diselesaikan					100%	5.016.242.650	100%	5.517.866.915	100%	6.069.653.606.5	100%	6.069.653.606.5	Bagian Kerja Sama		
				<b>Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	Presentase Implementasi Kerja Sama Lingkup Dalam dan Luar Negeri					100%	5.016.242.650	100%	5.517.866.915	100%	6.069.653.606.5			Bagian Kerja Sama		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah laporan Fasilitasi Kerja Sama					4 laporan	538.260.000	4 laporan	592.086.000	4 laporan	651.294.600			Bagian Kerja Sama		



				Sama Dalam Negeri	Luar Negeri														
				Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah laporan fasilitasi kerja sama Luar Negeri					4 lapor an	4.431 .166. 650	4 lapora n	4.874. 283.3 15	4 lapor an	5.36 1.71 1.64 6.5				Bagian Kerja Sama
				Sub kegiatan Evaluasi Pelaksana an Kerja Sama	Jumlah Dokumen Evaluasi Kerja Sama					2 doku men	46.81 6.000	2 dokum en	51.49 7.600	2 doku men	56.6 47.3 60				Bagian Kerja Sama
			4.01.01	<b>Program Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah Kabupate n/Kota</b>	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran					100 %	675.7 98.91 0	100%	743.3 78.80 1	100%	817. 716. 681. 1				Bagian Kerja Sama
				<b>Kegiatan Administ asi Umum Perangka t Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administras i Umum Perangkat</b>					100 %	356.0 64.99 0	100%	391.6 71.48 9	100%	430. 838. 637. 9				Bagian Kerja Sama



					<b>Daerah</b>															
				Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						4 laporan	36.755.090	4 laporan	40,430,599	4 laporan	44,473,658.9			Bagian Kerja Sama	
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4 laporan	7.481.400	4 laporan	8,229,540	4 laporan	9,052,494			Bagian Kerja Sama	
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan						4 laporan	3.720.000	4 laporan	4,092,000	4 laporan	4,501,200			Bagian Kerja Sama	
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4 laporan	23.046.500	4 laporan	25,351,150	4 laporan	27,886,265			Bagian Kerja Sama	



				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi						4 laporan	285.062.000	4 laporan	313,568,200	4 laporan	344,925,020			Bagian Kerja Sama		
																				Bagian Kerja Sama	
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100%	282.597.920	100%	310,857,712	100%	341,943,483.2			Bagian Kerja Sama		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan						4 laporan	206.272.000	4 laporan	226,899,200	4 laporan	249,589,120			Bagian Kerja Sama		
				Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan						4 laporan	76.325.920	4 laporan	83,958,512	4 laporan	92,354,363.2			Bagian Kerja Sama		



				Umum Kantor / Alat Tulis Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor														
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %	37.136.000	100%	40,849,600	100%	44,934,560				Bagian Kerja Sama
				Sub kegiatan Pemeliharaan dan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya					4 laporan	37136000	4 laporan	40,849,600	4 laporan	44,934,560				Bagian Kerja Sama



**5.**

**5. BAGIAN PEREKONOMIAN**



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	Terselesainya permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Perekonomian yang diselesaikan		<b>Program Koordinasi Rumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi</b>	<b>Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga</b>	-	-	<b>2.110.070.918</b>	<b>85,71 %</b>	<b>2.018.627.600</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian	
					<b>persentase bumd yang tercapai kinerjanya (keterangan: masing masing bumd diberikan target kinerja sesuai dengan tujuan dibentuknya)</b>	-	-		<b>40 %</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian	
					<b>Persentase permasalahan</b>	-	-		<b>100 %</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					<b>n Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Perekonomian yang diselesaikan</b>															omian
		pembangunan yang dibiayai dari swasta (akumulasi)		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR Sebagai Salah Satu Pembangunan Ekonomi	Jumlah Perusahaan yang dikoordinasikan	58	62	438.813.400	66	354.732.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian
				Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah	Jumlah BUMD yang di evaluasi berdasarkan kriteria pengukuran kinerja	5 Dokumen	5 Dokumen	747.313.418	5 Dokumen	985.254.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Pengembangan Potensi dan Daya Saing kota	2 Dokumen	1 Dokumen	564.188.500	100	410.861.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian	
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa	2 Dokumen	2 Dokumen	359.755.600	100 %	267.779.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian	
Persentase capaian sasaran RPJMD	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan	Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan</b>	-	-	-	-	-	100%	2.187.377.040	100%	2.400.614.744	100%	2.640.676.218	100%	2.640.676.218	Bagian Perekonomian	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	Pembangunan yang ditindaklanjuti			<b>pembangunan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti</b>															
				<b>Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Capaian Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti</b>	-	-	-	-	100%	2.187.377.040	100%	2.400.614.744	100%	2.640.676.218	100%	2.640.676.218	18	676.218	Bagian Perekonomian
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Tindak Lanjut Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan	-	-	-	-	100%	944.639.600	100%	1.039.103.560	100%	1.143.013.916	100%	1.143.013.916	18	601.391	Bagian Perekonomian



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Pembangunan di Bidang Perekonomian lingkup Pembinaan BUMD															
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Tindak Lanjut Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Perekonomian lingkup Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Makro	-	-	-	-	-	100%	583.846.400	100%	642.231.040	100%	706.454.144	100%	706.454.144	Bagian Perekonomian	
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Tindak Lanjut Permasalahan	-	-	-	-	-	100%	653.891.040	100%	719.280.144	100%	791.208.158	100%	791.208.158	Bagian Perekonomian	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Perekonomian lingkup Pengembangan Ekonomi Mikro															
Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM baik		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	100%	731.718.066	100%	709.874.590	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Bulanan	1 Jasa Bulanan	1 Jasa Bulanan	55.796.400	1 Jasa Bulanan	55.796.400	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9 Unit	71 Unit	30.250.000	60 Unit	26.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Kerja																
				Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan ATK	6 Paket	1 Laporan	76.408.874	1 Laporan	60.546.680	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian	
				Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	4 Jenis	100.643.000	3 Jenis	124.395.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian	
				Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	1 Laporan	53.402.134	1 Laporan	45.895.300	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian	
				Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jenis	1 Laporan	13.284.000	1 Laporan	13.284.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian	
				Kegiatan Penyediaan Makanan dan	Jumlah Laporan penyediaan makanan dan	35 Laporan	1 Laporan	67.693.340	1 Laporan	36.192.640	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Minuman	minuman bulanan															
				Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	42 Laporan	1 Laporan	282.640.318	1 Laporan	266.964.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian
				Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran / Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	-	1 Laporan	51.600.000	2 Laporan	80.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	11.385.000	<b>100%</b>	9.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian
				Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	18 Stel	18 Stel	11.385.000	17 Stel	9.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Perlengkapannya																
Persentase capaian sasaran RPJMD	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	Nilai LPPD		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>koordinasi proses optimalisasi capaian Nilai LPPD</b>	-	-	-	-	-	100%	578.887.090	100%	636.775.799	100%	700.453.379	100%	700.453.379	Bagian Perekonomian	
		Nilai IKM Setda			<b>Koordinasi dan optimalisasi Capaian IKM Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran lingkup Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah</b>						87,7		87,7		87,7		87,7			
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	-	100%	12.375.000	100%	13.612.500	100%	14.973.750	100%	14.973.750	Bagian Perekonomian	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	-	-	-	-	-	15 Stel	12.375.000	15 Stel	13.612.500	15 Stel	14.973.750	15 Stel	14.973.750	Bagian Perekonomian	
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>343.528.570</b>	<b>100%</b>	<b>377.881.427</b>	<b>100%</b>	<b>415.669.570</b>	<b>100%</b>	<b>415.669.570</b>	Bagian Perekonomian	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	100%	35.451.980	100%	14.612.400	100%	16.073.640	100%	16.073.640	Bagian Perekonomian	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	2 Laporan	9.756.340	2 Laporan	37.427.500	2 Laporan	41.170.250	2 Laporan	41.170.250	Bagian Perekonomian	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penyediaan Makanan dan minuman	-	-	-	-	-	100%	40.939.250	100%	231.079.200	100%	254.187.120	100%	254.187.120	Bagian Perekonomian	
				Penyediaan Barang	Cakupan penyediaan	-	-	-	-	-	100%	34.025.000	100%	38.997.178	100%	42.896.896	100%	42.896.896	Bagian Perekonomian	



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2021  
Sekretariat Daerah Kota Bandung  
Renstra Periode Tahun 2018-2023*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan Penggandaan															omian
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	-	-	-	-	-	48 Jasa/Bulan	13.284. 000	48 Jasa/Bulan	45.033.1 75	48 Jasa/Bulan	49.536.4 93	48 Jasa/Bulan	49.536. 493		Bagian Perekonomian
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	-	-	-	-	-	100%	210.072. 000	100%	10.731.9 74	100%	11.805.1 71	100%	11.805. 171		Bagian Perekonomian
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>184.253. 520</b>	<b>100%</b>	<b>202.678. 872</b>	<b>100%</b>	<b>222.946. 759</b>	<b>100%</b>	<b>222.9 46.759</b>		Bagian Perekonomian
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	12 Jasa/Bulan	60.305. 520	12 Jasa/Bulan	66.336.0 72	12 Jasa/Bulan	72.969.6 79	12 Jasa/Bulan	72.969. 679		Bagian Perekonomian



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	24 Jasa/Bulan	123.948.000	24 Jasa/Bulan	136.342.800	24 Jasa/Bulan	149.977.080	24 Jasa/Bulan	149.977.080	Bagian Perencanaan	
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>38.730.000</b>	<b>100%</b>	<b>42.603.000</b>	<b>100%</b>	<b>46.863.300</b>	<b>100%</b>	<b>46.863.300</b>	Bagian Perencanaan	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Kerja	-	-	-	-	-	57 Unit	38.730.000	57 Unit	42.603.000	57 Unit	46.863.300	57 Unit	46.863.300	Bagian Perencanaan	



## 6. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.413.652.546	100%	1.484.335.173										Bag Adbang
			5.2.01.	Kegiatan	Jumlah															
			09	Penyediaan	laporan															
				Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			1 Laporan	26.620.000	1 Laporan	27.951.000										
				penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		1 Laporan														



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			5.2.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	1 Laporan	1 Laporan	105.186.875	1 Laporan	110.446.219										
			5.2.01.	Kegiatan	Jumlah laporan	1														
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan	1 Laporan	315.787.623	1 Laporan	331.577.004										
			5.2.01.	Kegiatan	Jumlah laporan	1														
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1 Laporan	19,392,000	1 Laporan	20.361.600										
			5.2.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan	1 Laporan	1 Laporan	116,012,000	1 Laporan	121.812.600										



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Minuman	Dan Minuman															
			5.2.01.	Kegiatan		1														
							1	Laporan		1	Laporan									
			19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran / Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaa n Jasa Tenaga Pendukung	Laporan		232,20 1,649		243.811. 731										
			5.2.01.	Kegiatan	Jumlah Laporan	1														
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Laporan		544,16 1,551		571.369. 629										
			5.2.01.	Kegiatan	Jumlah laporan	1														



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1 Laporan	54,290,848	1 Laporan	57.005.390										
			5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Bagian Prodekbang	100%	100%	61,174,431	100%	61,174,431										
			5.2.02.	Kegiatan	Jumlah	1														
			12	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Dokumen Pengadaan Perlengkapan Peralatan	Dokumen	1 Dokumen	61,174,431	1 Laporan	64.233.153										
			5.2.45	Program Peningkatan Desain	Persentase pengendali															Bag. Adba



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				dan Kualitas Pembangunan Daerah	an dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur	100%	-	-	100%	721.981.050									ng	
					Persentase pengendalian pembangunan bidang infrastruktur	100%	-	-	100%	289.721.250										
					Persentase pelaporan rencana dan realisasi penyerapan anggaran	100%	-	-	100%	247.478.005										
			5.2.45.01	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian	Persentase perencanaan pembangunan infrastruktur yang	100%	-	-	100%	128.126.250										



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Kualitas Pembangunan Daerah	terevaluasi															
			5.2.45.02	Kegiatan Fasilitasi Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terevaluasi	100%	-	-	100%	161.595.000										
			5.2.45.04	Kegiatan Fasilitasi Aplikasi TEPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase OPD yang melaporkan rencana penyerapan anggaran</li> <li>Persentase OPD yang melaporkan realisasi penyerapan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>100%</li> </ul>	-	-	100%	247.478.005										



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			5.2.45.05	Penyusunan Administrasi Fisik dan Non Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase perencanaan pembangunan infrastruktur yang terevaluasi</li> </ul>	100%	-	-	100%	190.549.275											
			5.2.45.06	Standar Operasional Desain Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Rumusan Kebijakan Desain Pembangunan Daerah</li> <li>Persentase Desain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Dokumen</li> <li>100%</li> </ul>	-	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Dokumen</li> <li>100%</li> </ul>	531.431.775										
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>						<b>100%</b>	<b>870.576.200</b>	<b>100%</b>	<b>957.633.820</b>	<b>100%</b>	<b>1.053.397.202</b>	<b>100%</b>	<b>1.053.397.202</b>	Ba g. Ad ba ng	
				<b>KEGIATAN ADMINISTRASI</b>	<b>Cakupan Administrasi</b>	<b>1 Dokumen</b>						<b>1</b>	<b>632.023.200</b>	<b>1</b>	<b>695.225.52</b>	<b>1</b>	<b>764.748.072</b>	<b>3</b>	<b>764.74</b>		



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				RASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Umum Perangkat Daerah						en		n	0	n		men	8.072			
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan						1 Laporan	93.383.200	1 Laporan	102.721.520	1 Laporan	112.993.672	3 Laporan	112.993.672		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Laporan						1 Laporan	142.772.000	1 Laporan	157.049.200	1 Laporan	172.754.120	3 Laporan	172.754.120		
				Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Laporan Penyediaan	1 Laporan						1 Laporan	139.355.000	1 Laporan	153.290.500	1 Laporan	168.619.550	3 Laporan	168.619.550		



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Dan Penggandaan	Barang Cetakan Dan Penggandaan													50		
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan					1 Laporan	19.392.000	1 Laporan	21.331.200	1 Laporan	23.464.320	3 Laporan	23.464.320		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 Laporan					1 Laporan	237.121.000	1 Laporan	260.833.100	1 Laporan	286.916.410	3 Laporan	286.916.410		



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen					1 Dokumen	206.283.000	1 Dokumen	226.900	1 Dokumen	249.602.430	3 Dokumen	249.602.430		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan					1 Laporan	75.900.000	1 Laporan	8.349.000	1 Laporan	91.839.000	3 Laporan	91.839.000		
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan	1 Laporan					1 Laporan	18.790.200	1 Laporan	20.669.220	1 Laporan	22.736.142	3 Laporan	22.736.142		



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penag- gung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Kantor	Perlengkapan Kantor															
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan					1 Laporan	111.59 2.800	1 Laporan	122.7 52.08 0	1 Laporan	135.02 7.288	3 Laporan	135 .02 7.2 88		
				JASA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen					1 Dokumen	32.270 .000	1 Dokumen	3549 7000	1 Dokumen	39046 700	3 Laporan	39. 046 .70 0		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				<b>DAERAH</b>																
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	1 Laporan					1 Laporan	32.270.000	1 Laporan	35.497.000	1 Laporan	39.046.700	3 Laporan	39.046.700		
				<b>PROGRAM PERKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>892.880.600</b>	<b>100%</b>	<b>982.168.660</b>	<b>100%</b>	<b>1.080.385.526</b>	<b>100%</b>	<b>108.0385.526</b>		Bag. Adbang



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					n Ditindaklanjuti																
					Cakupan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Sesuai Prosedur																
					Jumlah Pengendalian Dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah																



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					n Dan Pembangunan Daerah Dibidang Perekonomian Dan Pembangunan Secara Berkala.															
					Capaian Nilai Kumulatif IKM Lingkup Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah															



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Penyusunan Program Dan Desain, Pengendalian Program Serta Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan	100%						100%	892.880.600	100%	98210	100%	1.080.385.526	100%	1.080.385.526		
					Persentase Pengendalian Pembangunan Bidang Infrastruktur	100%						100%		100%		100%		100%			
					Persentase pelaporan rencana dan	100%						100%		100%		100%		100%			



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					realisasi penyerapan anggaran															
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase penyusunan dan evaluasi program dan desain pembangunan	100%					100%	483.74 6.000	100%	532.1 20.60 0	100%	585.33 2.660	100%	585 .33 2.6 60		
					Presentase desain pembangunan yang terevaluasi															
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase pelaksanaan pembangunan strategis yang						100%	188.65 0.000	100%	207.5 15.00 0	100%	228.26 6.500	100%	228 .26 6.5 00		



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penag- gung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				nan	terevaluasi															
					Persentase pelaksanaan pembangunan strategis yang terkendali															
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase OPD yang melaporkan rencana dan realisasi penyerapan anggaran						100%	220.48 4.600	100%	2425 3306 0	100%	266.78 6.366	100%	266 .78 6.3 66		



## 7. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Perse ntase Capai an RPJM D		Persenta se capaian sasaran RPJMD				100	100		100		100		100		100		100		
	Tersel esaika nnya perma salaha n penyel engga raan pemer intaha n dan pemb angu nan	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terselesaikan				100	100		100		100		100		100		100		
	Menin gkatn ya kualit as pener apan reform asi	Nilai Kematang a n Smart City Kota Bandung				Integra tive	Integra tive		Integra tive		Sm art		Sm art		Sm art		Smart		



	birokrasi																					
		Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Baik				76	76	3.082.621.578	76	3.236.752.656,90	76	3.398.590.289,75	83	3.568.519.04,23	83	3.568.519.804,23	83	3.568.519.804,23			Bagian Layanan Pengadaan	
			4.05.4.05.02.08.01														1 laporan	2.195.085.872				
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1 laporan	1 laporan	1.805.902.579	1 laporan	1.896.197.708	1 laporan	1.991.007.593	1 laporan	2.090.557.973	1 laporan	2.195.085.872					Bagian Layanan Pengadaan	
			4.05.4.05.02.08.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				198.000.000	1 laporan	211.860.000	1 laporan	226.690.200	1 laporan	226.690.200	1 laporan	226.690.200	1 laporan	226.690.200		Bagian Layanan Pengadaan	
			4.05.4.05.02.08.01.008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan jasa kebersihan kantor bulanan	1 laporan	1 laporan	73.200.000	1 laporan	76.860.000	1 laporan	80.703.000	1 laporan	84.738.150	1 laporan	88.975.058	1 laporan	88.975.058	1 laporan	88.975.058		Bagian Layanan Pengadaan



			4.05.4.0 5.02.08. 01.009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah laporan jasa perbaikan peralatan kerja	1 laporan	1 laporan	169.669.000	1 laporan	178.152.450	1 laporan	187.060.073	1 laporan	196.413.076	1 laporan	206.233.730	1 laporan	206.233.730	Bagian Layanan Pengadaan
			4.05.4.0 5.02.08. 01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan penyediaan alat tulis kantor	1 laporan	1 laporan	274.225.635	1 laporan	287.936.917	1 laporan	302.333.763	1 laporan	317.450.451	1 laporan	333.322.973	1 laporan	333.322.973	Bagian Layanan Pengadaan
			4.05.4.0 5.02.08. 01.011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah laporan jenis cetakan dan penggandaan	1 laporan	1 laporan	294.640.170	1 laporan	309.372.179	1 laporan	324.840.787	1 laporan	341.082.827	1 laporan	358.136.968	1 laporan	358.136.968	Bagian Layanan Pengadaan
			4.05.4.0 5.02.08. 01.012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan jenis komponen instalasi listrik	1 laporan	1 laporan	17.125.556	1 laporan	17.981.834	1 laporan	18.880.925	1 laporan	19.824.972	1 laporan	20.816.220	1 laporan	20.816.220	Bagian Layanan Pengadaan
			4.05.4.0	Kegiatan Penyediaan	Jumlah laporan jenis	1	1	54.3	1	57.049.	1	59.90	1	62.896.	1	66.0		66.041.384	Bagian Layanan Pengadaan



			5.02.08.01.01.4	Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga	laporan	laporan	32.410	laporan	031	laporan	1.482	laporan	556	laporan	41.384	1 laporan		
			4.05.40.5.02.08.01.01.5	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan jenis bahan bacaan	1 laporan	1 laporan	30.756.000	1 laporan	32.293.800	1 laporan	33.908.490	1 laporan	35.603.915	1 laporan	37.384.110	1 laporan	37.384.110	Bagian Layanan Pengadaan
			4.05.40.5.02.08.01.01.6	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan jenis bahan logistik kantor	1 laporan	1 laporan	55.000.000	1 laporan	57.750.000	1 laporan	60.637.500	1 laporan	63.669.375	1 laporan	66.852.844	1 laporan	66.852.844	Bagian Layanan Pengadaan
			4.05.40.5.02.08.01.01.7	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	1 laporan	1 laporan	92.870.000	1 laporan	97.513.500	1 laporan	102.389.175	1 laporan	107.508.634	1 laporan	112.884.065	1 laporan	112.884.065	Bagian Layanan Pengadaan
			4.05.40.5.02.08.01.01	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar	1 laporan	1 laporan	665.409.400	1 laporan	698.679.870	1 laporan	733.613.864	1 laporan	770.294.557	1 laporan	808.809.285	1 laporan	808.809.285	Bagian Layanan Pengadaan



			8	Daerah	daerah														
			4.05.4 .0 5.02.0 8. 01.01 9	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Perkantoran	Jumlah laporan kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung	1 laporan	1 laporan	109. 644. 408	1 laporan	115.1 26 .628	1 laporan	120.8 82.96 0	1 laporan	126.9 27 .108	1 laporan	133. 273. 46 3	1 laporan	133.273. 463	Bagian Layanan Pengadaan
			4.05.4. 05.02. 0 8.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi nya kebutuhan Sarana Aparatur Bagian Layanan Pengadaan	100%	100%	336. 204. 000	100%	353.0 14 .200	100%	370.6 64.91 0	100%	389.1 98 .156	100%	408. 658. 06 3	100%	408.658. 063	Bagian Layanan Pengadaan
			4.05.4 .0 5.02.0 8. 02.01 2	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Terpenuhi nya kebutuhan Sarana Aparatur Bagian Layanan Pengadaan	100%	100%	336. 204. 000	100%	353.0 14 .200	100%	370.6 64.91 0	100%	389.1 98 .156	100%	408. 658. 06 3	100%	408.658. 063	Bagian Layanan Pengadaan
				Program	Persentase perencanaan														



			4.05.4.05.02.08.37	Pengadaan Barang Jasa Daerah	aan permbangunan Dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	3.093.824.832	100%	3.248.516.074	100%	3.410.941.877	100%	3.581.488.971	100%	3.760.563.420	100%	3.760.563.420	Bagian Layanan Pengadaan
			4.05.4.05.02.08.37.01	Penyelesaian Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Terkoordinasinya program pengelolaan dan pengembangan sistim informasi barang/jasa	250 Paket	250 Paket	1.092.116.560	250 Paket	1.146.722.388	250 Paket	1.204.058.507	250 Paket	1.264.261.433	250 Paket	1.327.474.504	250 Paket	1.327.474.504	Bagian Layanan Pengadaan
			4.05.4.05.02.08.37.02	Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS)	Terkoordinasinya program pengelolaan dan pengembangan sistim informasi barang/jasa	5000 Paket	5000 Paket	673.674.294	5000 Paket	707.358.009	5000 Paket	742.725.909	5000 Paket	779.862.205	5000 Paket	818.855.315	5000 Paket	818.855.315	Bagian Layanan Pengadaan
			4.05.4.05.02.08.37.03	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Pengada	Terkoordinasinya program	4		425.		446.6	4	468.9	4	492.4	4	517.071.	4	517.071.	Bagian Layanan



				an Barang dan Jasa	Pembinaan Barang/Jasa	Dokumen	4 Dokumen	395.978	4 Dokumen	65.777	Dokumen	99.066	Dokumen	49.019	Dokumen	071.470	Dokumen	470	Pengadaan
			4.05.4.0 5.02.08. 37.04	Fasilitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Terkoordinasinya program pelaksanaan Barang/Jasa	250 Paket	250 Paket	902.638.000	250 Paket	947.769.900	250 Paket	995.158.395	250 Paket	1.044.916.315	250 Paket	1.097.162.130	250 Paket	1.097.162.130	Bagian Layanan Pengadaan
<b>PERUBAHAN SOTK 2021 - 2023</b>																			
			4.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa	83	83		83		83	1.512.276.460	83	1.739.117.929	83	1.999.985.618	83	1.999.985.618	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	4.1.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %		100 %	632.631.170	100 %	683.242.527	100 %	737.1929	100 %	737.901.929	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	151.800.000	1 Laporan	163.944.000	1 Laporan	177.059.520	1 Laporan	177.059.520	Bagian Pengadaan Barang/Jasa



																	n		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	191.941.200	1 Laporan	207.296.496	1 Laporan	223.880.216	1 Laporan	223.880.216	1 Laporan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Kebersihan Kantor	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.883.970	1 Laporan	171.594.688	1 Laporan	185.322.263	1 Laporan	185.322.263	1 Laporan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah Laporan jasa perbaikan peralatan kerja -Jumlah laporan penyediaan alat tulis kantor	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	123.948.000	1 Laporan	133.863.840	1 Laporan	144.572.947	1 Laporan	144.572.947	1 Laporan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
			4.1.1.20 6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah laporan jenis komponen instalasi listrik	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.583.200	1 Laporan	14.669.856	1 Laporan	15.843.444	1 Laporan	15.843.444	1 Laporan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa



				Kantor														
			4.1.1.20 6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	198.953.090	1 Laporan	214.869.337	1 Laporan	232.058.884	1 Laporan	232.058.884	4	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
			4.1.1.20 6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan jenis peralatan rumah tangga	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	36.581.000	1 Laporan	39.507.480	1 Laporan	42.668.078	1 Laporan	42.668.078		Bagian Pengadaan Barang/Jasa
			4.1.1.20 6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Laporan jenis bahan logistik kantor -Jumlah Laporan penyediaan makanan dan minuman	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	105.293.000	1 Laporan	113.716.440	1 Laporan	122.813.755	1 Laporan	122.813.755		Bagian Pengadaan Barang/Jasa
			4.1.1.20 6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan jenis Cetakan dan Penggandaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	75.425.000	1 Laporan	81.459.000	1 Laporan	87.975.720	1 Laporan	87.975.720		Bagian Pengadaan Barang/Jasa



																	n		
			4.1.1.20 6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah laporan Jenis Bahan Bacaan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Lapora n	29.136.0 00	1 Lapora n	31.466.8 80	1 Lapora n	33.984. 230	1 Lapora n	33.984.230	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
			4.1.1.20 6.9	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Lapora n	426.732. 000	1 Lapora n	460.870. 560	1 Lapora n	497.740 .205	1 Lapora n	497.740.205	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Persentase permasala han penyelengg araan pemerinta han dan pembangu nan yang ditindaklan juti		4.1.3	Program Perekonomi an dan Pembangun an	Cakupan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pengadaan Barang/Jasa	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Bagian Pengadaan Barang/Jasa
					Nilai Hasil Survey	87,7	87,7		87,7		87,7		87,7		87,7		87,7		Bagian Pengadaan Barang/Jasa



					Kepuasan Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa														
			4.1.3.203	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Perencanaan Pembangunan Dalam Pengadaan Barang/Jasa	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket (segi jumlah dan nilai) yang diselesaikan dengan perencanaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	100 Paket	100 Paket		Bagian Pengadaan Barang/Jasa										
				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Paket Tender dan Pengadaan Langsung yang di fasilitasi SPSE	3100 Paket	3100 Paket		Bagian Pengadaan Barang/Jasa										





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							2019		2020		2021		2022		2023						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi				69,81	69,87	-	69,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda	Setda
		Nilai SAKIP				A	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda	Setda
		Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Baik				51.61	60	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda	Setda
				Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung (Komponen Pelaporan Kinerja)	12,5	12,6	375.000.000	12,7	393.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Penyusunan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU Perangkat Daerah Yang di Reviu	100	100	50.400.000	100	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan PK Perubahan	Jumlah Dokumen PK Kota dan PK Perubahan Kota Tepat Waktu	2	2	124.987.700	2	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
					Jumlah Dokumen PK Setda dan PK Perubahan Setda Tepat Waktu	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
					Jumlah Dokumen Cascading PK Eselon 3 dan 4 Setda Tahun	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
					Jumlah Dokumen IKI Setda Tahun	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi atas PK Setda Tahun	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulanan dan Tahunan	Jumlah Dokumen LKIP Kota Tepat Waktu	5	1	199.612.300	1	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
					Jumlah Dokumen LKIP Triwulanan dan Tahunan Setda Tepat Waktu	2	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
					Jumlah Aplikasi SAKIP Terbangun/ Terpelihara /Beroperasi	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Penguatan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (Komponen Penataan dan Penguatan	3,84	4	1.301.931.700	4,2	1.367.028.300	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							2019		2020		2021		2022		2023						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pemberdayaan Aparatur Daerah	Organisasi) pada Skala 6																
				Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Evaluasi Kelembagaan	100	100	114.020.000	100	319.721.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Analisis Jabatan	10	10	148.225.649	10	155.636.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
					Jumlah Perangkat Daerah Yang Tersusun Analisis Beban Kerja	10	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen Penyempurnaan Road Map Reformasi Birokrasi dan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung	2	2	110.674.000	1	116.207.700	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Program Pengembangan Kebijakan Organisasi Dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (Komponen Penataan Tata Laksana) pada Skala 5	3,76	3,9	1.301.931.700	4	1.367.028.300	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Kegiatan Evaluasi Dan Penataan Ketatalaksanaan	Persentase Laporan Sinovik	100	100	150.076.300	100	157.580.100	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							2019		2020		2021		2022		2023						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Perangkat Daerah																	
					Persentase Perangkat Daerah Yang Lengkap Standar Operasional Prosedur	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
					Persentase Perangkat Daerah Yang Memenuhi Standar Pelayanan Publik	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Penyusunan Rancangan Peraturan Dan Keputusan Kepala Daerah	Jumlah Raperwal Pedoman Ketatalaksanaan	3	3	103.133.800	3	108.290.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah Rakepwal Pedoman Ketatalaksanaan	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Persiapan Penetapan Sertifikasi ISO 9001 : 2000	Persentase Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Tersertifikasi ISO	100	100	123.00 2.000	100	129.15 2.100	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Fasilitasi Tim Pertimbangan Kebijakan Wali Kota Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Telaahan	1	1	1.635.3 50.000	1	1.700.0 00.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	870.18 5.988	100	913.69 5.300	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Cleaning Service	2	2	104.10 8.400	2	109.31 3.800	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah kegiatan pemeliharaan alat kerja/kantor pada Bag. Orpad	76	76	31.460.000	76	33.033.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung	4	4	99.999.288	4	104.999.250	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan map dinas dan penggandaan	2	2	6.417.500	2	6.738.400	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terwujudnya optimalisasi unit kerja yang didukung oleh peralatan rumah tangga yang memadai di Lingkungan Sekretariat Daerah	11	11	14.944.600	11	15.691.800	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Sekretariat Daerah	5	5	14.184.000	5	14.893.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Kegiatan Penyediaan makanan	Persentase akomodasi makanan dan minuman	100	100	35.420.000	100	37.191.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				dan minuman																
				Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedia Sarana dan Prasarana Pendukung Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Lingkungan Sekretariat Daerah	1	1	511.598.000	1	537.177.900	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Tekniks Perkantoran	Tersedia Jasa Supir	1	1	52.054.200	1	54.656.900	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	21	21	41.009.518	21	43.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
				Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas di Lingkungan Bag. Orpad	21	21	41.009.518	21	43.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian ORPAD	Setda
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti				69,87	69,87	-	69,93	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Setda	Setda
		Nilai LPPD				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi	-	3,4023	-	3,4033	-	3,4043	-	3,4043	-	Setda	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Nilai IKM Setda				60	60	-	70	-	87,7	-	87,8	-	87,9	-	87,9	-	Setda	Setda
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Administrasi Umum Ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	100	1.771.692.410	100	2.016.445.450	100	2.384.594.400	100	2.384.594.400	Bagian Organisasi	Setda
				Cakupan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi Umum Sesuai Prosedur		-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Bagian Organisasi	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Dibidang Administrasi Umum Secara Berkala	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Bagian Organisasi	Setda
					Persentase Perangkat Daerah Lingkup Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Dengan Nilai IKM Baik	-	-	-	-	-	87,7	-	87,8	-	87,9	-	87,9	-	Bagian Organisasi	Setda
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	100	426.579.390	100	511.895.250	100	614.274.200	100	614.274.200	Bagian Organisasi	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	100	93.029.590	100	111.635.500	100	133.962.600	100	133.962.600	Bagian Organisasi	Setda
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	12	16.848.300	12	20.217.950	12	24.261.500	12	24.261.500	Bagian Organisasi	Setda
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-	-	-	-	100	42.000.000	100	50.400.000	100	60.480.000	100	60.480.000	Bagian Organisasi	Setda
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	-	100	8.758.500	100	10.510.200	100	12.612.200	100	12.612.200	Bagian Organisasi	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Tersedia	-	-	-	-	-	12	14.184.000	12	17.020.800	12	20.424.950	12	20.424.950	Bagian Organisasi	Setda
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD Sesuai Prosedur	-	-	-	-	-	100	251.759.000	100	302.110.800	100	362.532.950	100	362.532.950	Bagian Organisasi	Setda
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100	123.948.000		148.737.600	100	178.485.100	100	178.485.100	Bagian Organisasi	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	12	123.948.000	12	148.737.600	12	178.485.100	12	178.485.100	Bagian Organisasi	Setda
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	-	-	-	-	-	100	51.600.000	100	61.920.000	100	74.304.000	100	74.304.000	Bagian Organisasi	Setda
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	75	51.600.000	74	61.920.000	74	74.304.000	74	74.304.000	Bagian Organisasi	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi							
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD										
							2019		2020		2021		2022		2023												
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
				Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses di Lingkup Kota Bandung	-	-	-	-	-	100	1.169.565.020	100	1.293.892.600	100	1.517.531.100	100	1.517.531.100	100	1.517.531.100	1.517.531.100	1.100	0	Bagian Organisasi	Setda		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1	376.186.670	1	451.424.000	1	541.708.800	1	541.708.800	1	541.708.800	1	541.708.800	1	541.708.800	Bagian Organisasi	Setda	
				Jumlah Perangkat Daerah Yang Tersusun Analisis Jabatan	-	-	-	-	-	10	10		10		10		10		10		10		10	10	10	10	10





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							2019		2020		2021		2022		2023						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					dengan SOP																
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	1	237.737.820	1	175.700.000	1	175.700.000	1	175.700.000	Bagian Organisasi	Setda	
				Jumlah Dokumen Penataan Ketatalaksanaan	-	-	-	-	-	8	8		8		8		8		8	8	8
				Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	3	117.455.000	4	140.946.000	4	169.135.200	4	169.135.200	Bagian Organisasi	Setda	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Nilai IKM Sub BagianKeta talaksanaan dan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	-	-	-	-	83,00		83,50		84,00		84,00		Bagian Organisasi	Setda
				Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Manajemen Reformasi Birokrasi Yang Diterapkan Perangkat Daerah Dengan Kriteria Baik	-	-	-	-	-	2	200.000.000	2	240.000.000	2	288.000.000	2	288.000.000	Bagian Organisasi	Setda
					Jumlah Dokumen PK Kota dan PK Perubahan	-	-	-	-	-	2		2		2		2		Bagian Organisasi	Setda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Tepat Waktu															
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Tepat Waktu	-	-	-	-	-	1		1		1		1		Bagian Organisasi	Setda
					Nilai IKM Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan RB sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	-	-	-	-	87,80	238.185.530	87,90	285.822.600	88,00	342.987.100	88,00	342.987.100	Bagian Organisasi	Setda



## 9. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Rasio Berita Baik dan Buruk	71 : 29	71 : 29	9.386.712.756	71,20 : 28.80	12.417.789.943	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	
				Kegiatan Kemitraan Media dan Publikasi	Jumlah Publikasi di Media Cetak dan Elektronik dan Kegiatan Bandung Menjawab	200 Publikasi	200 Publikasi	6.438.497.204	210 Publikasi	7.956.132.204	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiat an (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penangg ung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Kegiatan Data dan Informasi	Jumlah Infografis yang bisa disampai kan kepada masyarak at	400 Media Grafis	400 Media Grafis	450 Media Grafis		-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas		
					Persenta se sambuta n yang disusun	100%	100%	100%	1.924.66 6.252	3.431.55 8.400	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi	Jumlah Press Rilis Sosialisasi Kebijakan Pemerintah	700 Press Rilis	700 Press Rilis 1.023.549.300	750 Press Rilis 1.441.620.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	12 Bulan	12 Bulan 1.856.415.956	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	96.000.0 00	12 Bulan	240.000. 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	448.152. 626	12 Bulan	657.254. 710	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedia nya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	105.194. 000	12 Bulan	111.592. 800	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	
				Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan an ATK	2 Jenis	2 Jenis	112.869. 880	2 Jenis	85.000.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	3 Jenis	485.556. 000	3 Jenis	541.160. 800	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	
				Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	2 Jenis	12.888.0 00	2 Jenis	20.000.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	3 Jenis	3 Jenis	94.980.0 00	3 Jenis	95.000.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	
				Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedia nya Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	12 Bulan	36.660.0 00	12 Bulan	50.000.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Laporan	12 Laporan	464.115.450	12 Laporan	658.306.596	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	
				Program Sosial Bencana	Publikasi Mengenai Sosial Bencana	-	-	-	2 Jenis	2.212.374.490	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jenis Publikasi Mengenai Sosial Bencana	-	-	-	2 Jenis	2.212.374.490	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Humas	
	Persentase Capaian RPJMD	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Baik	Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Terselesainya Program Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	-	-	-	100%	14.385.549.771	100%	11.970.738.900	100%	13.167.812.790	100%	13.167.812.790	Asisten Administrasi Umum	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Adminstrasi Umum Perkantoran	100%	-	-	-	-	100%	1.239.4 27.287	100%	3.037.4 68.900	100%	3.341.2 15.790	100%	3.341.2 15.790	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	-	-	-	-	3 Jenis	294.48 3.487	3 Jenis	1.074.4 67.000	3 Jenis	1.181.9 13.700	3 Jenis	1.181.9 13.700	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	7.389.000	2 Jenis	36.776.000	2 Jenis	40.453.600	2 Jenis	40.453.600	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman Rapat	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	54.624.000	12 bulan	79.995.000	12 bulan	87.994.500	12 bulan	87.994.500	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jasa Pengada an Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	-	-	-	-	3 Jenis	510.29 5.800	3 Jenis	1.076.2 30.900	3 Jenis	1.183.8 53.990	3 Jenis	1.183.8 53.990	Bagian Protokol dan Komunik asi Pimpinan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	3 Jenis	-	-	-	-	3 Jenis	70.000. 000	3 Jenis	70.000. 000	3 Jenis	77.000. 000	3 Jenis	77.000. 000	Bagian Protokol dan Komunik asi Pimpinan	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	302.635.000	12 Bulan	700.000.000	12 Bulan	770.000.000	12 Bulan	770.000.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	566.038.000	12 Laporan	566.038.000	12 Laporan	622.641.800	12 Laporan	622.641.800	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Surat Menyurat	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	44.000.000	12 Laporan	44.000.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	402.090.000	12 Bulan	402.090.000	12 Bulan	442.299.000	12 Bulan	442.299.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	123.948.000	12 Bulan	123.948.000	12 Bulan	136.342.800	12 Bulan	136.342.800	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	10.800.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	55.000.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	10.800.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	55.000.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rasio Berita Baik dan Buruk	71,40 : 28,60 Rasio	-	-	-	-	71,40 : 28,60 Rasio	12.569.284.484	-	8.317.232.000	-	9.148.955.200	-	9.148.955.200	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
					Jumlah Pelayana n Protokol dan Komunik asi Pimpinan	100%	-	-	-	-	100%		100%		100%					
				Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan Pelayana n Protokol er Terhadap Pimpinan	100%	-	-	-	-	100%	1.738.5 57.584	100%	2.337.5 00.000	100%	2.571.2 50.000	100%	2.571.2 50.000	Bagian Protokol dan Komunik asi Pimpinan	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Publikasi Kegiatan Pimpinan /Pemerintah Kota Bandung Yang Di Informasikan Melalui Media Cetak, Elektronik dan Online	220 Publikasi	-	-	-	-	220 Publikasi	-	-	-	-	-	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
			Jumlah Media Grafis Infografis dan videografis yang disampaikan melalui media sosial kepada masyarakat		500 Media Grafis	-	-	-	-	500 Media Grafis	9.693.606.900	500 Media Grafis	4.041.212.000	500 Media Grafis	4.445.333.200	500 Media Grafis	4.445.333.200			



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
					Cakupan Pelayanan Sambutan Tepat Waktu	100%	-	-	-	-	100%		100%		100%					
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Press Rilis Sosialisasi Kebijakan Pemerintah	800 Press Rilis	-	-	-	-	800 Press Rilis		-		-		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
			Persentase Notulensi Dokumentasi Mengena i Pimpinan atau Pemerintah Kota Bandung		100%	-	-	-	-	100%	1.137.120.000		1.938.520.000		2.132.372.000			2.132.372.000		



## 10. BAGIAN UMUM

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	26.950.508.545.	100	27.340.439.479	100	29.175.000.000	100	31.217.250.000	100	32.778.112.500		32.778.112.500	Bagian Umum	Setda
				Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kegiatan yang memerlukan perlengkapan dan peralatan kantor,	55 kegiatan	60 kegiatan	2.500.000.000	65 kegiatan	2.491.301.800	67 kegiatan	2.665.000.000	70 kegiatan	2.851.550.000	75 kegiatan	2.994.127.500	75 kegiatan	2.994.127.500	Bagian Umum	



					sewa berupa tenda, meja, kursi dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintahan daerah penyelenggaraan acara resmi Pemerintah														
				Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah laporan jasa kebersihan kantor bulanan di lingkungan Balaikota, rumah dinas dan gedung KORPRI	12 Laporan	12 Laporan	7.599.168.400	12 Laporan	9.045.661.200	12 Laporan	9.600.000.000	12 Laporan	10.272.000.000	12 Laporan	10.785.600.000	12 Laporan	10.785.600.000	Bagian Umum
				Kegiatan Penyediaan	Jumlah penyedia	1 paket	1 paket	221.084.441	1 paket	199.549.060	1 paket	210.000.000	1 paket	224.700.000	1 paket	235.935.000	1 paket	235.935.000	Bagian Umum



				an alat tulis kantor	aa n alat tulis kantor															
				Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah penyediaan cetakan dan pengadaan	2 paket	2 paket	289.026.200	2 paket	413.877.490	2 paket	440.000.000	2 paket	470.800.000	2 paket	494.340.000	2 paket	494.340.000	Bagian Umum	
				Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan	2 jenis	2 jenis	120.000.000	2 jenis	104.647.800	2 jenis	110.000.000	2 jenis	117.700.000	2 jenis	123.585.000	2 jenis	123.585.000	Bagian Umum	
				Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan cenderamata / souvenir Pemkot Bdg	5 paket	5 paket	1.109.223.887	5 paket	841.511.000	5 paket	900.000.000	5 paket	963.000.000	5 paket	1.011.150.000	5 paket	1.011.150.000	Bagian Umum	
				Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan yang memerlukan penyedi	80 kegiatan	80 kegiatan	6.341.500.000	85 kegiatan	5.000.000.000	90 kegiatan	5.350.000.000	95 kegiatan	5.724.500.000	100 kegiatan	6.010.725.000	100 kegiatan	6.010.725.000	Bagian Umum	



					aa n makana n dan minuma n untuk memfasi li tasi kegiatan pemerint a h daerah penyele ng garaan acara acara Resmi Pemerint ah															
				Kegiatan Rapat- rapat koordinas i dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan Kegiatan Koordinas i Dan Konsultas i Keluar Daerah	4 laporan	4 lapora n	621.5 71. 417	4 lapor an	449.25 3. 129	4 lapora n	600.000 .000	4 lapora n	642.00 0 .000	4 lapora n	674.100 .000	4 lapora n	674.100 .000	Bagian Umum	
				Kegiatan Penyedia an Jasa Pengama na n Kantor	Jumlah laporan jasa keamana n kantor bulanan di lingkung an Balaikota, rumah dinas dan gedung KORPRI	12 laporan	12 lapora n	7.860. 18 4.200	12 lapor an	8.253. 19 3.410	12 lapora n	8.665.8 53.081	12 lapora n	9.099. 1 45.735	12 lapora n	9.554.1 03.021	12 lapora n	9.554.1 03.021	Bagia n Umu m	
				Kegiatan Penyedia	Jumlah laporan	12 laporan	12 lapora	288.75 0.	12 lapor	285.45 0.	12 lapora	300.000 .000	12 lapora	321.00 0	12 lapora	337.050 .000	12 lapora	337.050 .000	Bagia n	



				an jasa tenaga pendukun g administr a si perkantora n/teknis perkantora n	jasa tenaga pendukun g administr asi perkantoran		n	000	an	000	n		n	.000	n		n		Umu m
				<b>Progra m Peningk atan Sarana dan Prasaran a Aparatu r</b>	<b>Presenta se Sarana Prasaran a Kondisi Baik dan Pemenu han Sarana Prasaran a Sesuai Standar</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>28.636. 601.16 4</b>	<b>94</b>	<b>38.304. 344.862</b>	<b>95</b>	<b>29.011. 134.35 1</b>	<b>98</b>	<b>31.041. 913.75 6</b>	<b>97</b>	<b>32.594. 009.44 3</b>	<b>97</b>	<b>32.594. 009.443</b>	<b>Bagian Umum</b>
				Kegiata n Pemban gu nan Gedung Kantor	Jumlah lokasi pemban gu nan di lingkung an Balaikot a	<b>1</b> lokasi	<b>1</b> lokasi	<b>500.00</b> <b>0.</b> <b>000</b>	<b>1</b> lokasi	<b>525.00</b> <b>0.</b> <b>000</b>	<b>1</b> lokasi	<b>551.25</b> <b>0</b> <b>.000</b>	<b>1</b> lokasi	<b>578.81</b> <b>2</b> <b>.500</b>	<b>1</b> lokasi	<b>607.753</b> <b>.125</b>	<b>1</b> lokasi	<b>607.753</b> <b>.125</b>	<b>Bagian Umum</b>
				Kegiata n Pengad aan Kendar aan	Jumlah laporan pemenu han kebutuh aan	<b>2</b> laporan	<b>2</b> lapora n	<b>8.802.</b> <b>94</b> <b>8.210</b>	<b>2</b> lapora n	<b>4.126.</b> <b>86</b> <b>0.700</b>	<b>2</b> lapora n	<b>4.400.0</b> <b>00.000</b>	<b>2</b> lapora n	<b>4.708.0</b> <b>00.000</b>	<b>2</b> lapora n	<b>4.943.4</b> <b>00.000</b>	<b>2</b> lapora n	<b>4.943.4</b> <b>00.000</b>	<b>Bagian Umum</b>



				dinas/operasional	kendaraan dinas operasional														
				Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah laporan pemenuhan peralatan di rumah jabatan	2 laporan	2 laporan	2.328.451.891	2 laporan	1.716.015.200	2 laporan	1.800.000.000	2 laporan	1.926.000.000	2 laporan	2.022.300.000	2 laporan	2.022.300.000	Bagian Umum
				Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah laporan pemenuhan perlengkapan dan peralatan Kantor	2 laporan	2 laporan	1.924.423.063	2 laporan	2.163.542.370	2 laporan	2.300.000.000	2 laporan	2.461.000.000	2 laporan	2.584.050.000	2 laporan	2.584.050.000	Bagian Umum
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah laporan pemenuhan pemeliharaan mobil jabatan yang dipelihara	2 laporan	2 laporan	200.000.000	2 laporan	198.000.000	2 laporan	200.000.000	2 laporan	214.000.000	2 laporan	224.700.000	2 laporan	224.700.000	Bagian Umum
				Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah laporan pemenuhan	2 laporan	2 laporan	4.777.564.000	2 laporan	4.361.818.500	2 laporan	4.650.000.000	2 laporan	4.975.500.000	2 laporan	5.224.275.000	2 laporan	5.224.275.000	Bagian Umum



				rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	han pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang terpelihara														
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah laporan pemeliharaan pemeliharaan fisik di lingkungan di rumah dinas yang dipelihara	12 laporan	12 laporan	2.975.000.000	12 laporan	3.950.000.000	12 laporan	4.250.000.000	12 laporan	4.547.500.000	12 laporan	4.774.875.000	12 laporan	4.774.875.000	Bagian Umum
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah laporan pemeliharaan pemeliharaan fisik di lingkungan di lingkungan gedung kantor	12 laporan	12 laporan	3.761.550.000	12 laporan	5.260.384.351	12 laporan	5.260.384.351	12 laporan	5.628.611.256	12 laporan	5.910.041.818	12 laporan	5.910.041.818	Bagian Umum



					yang dipelihara															
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Jumlah laporan perengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	2 laporan	2 laporan	636.683.000	2 laporan	600.000.000	2 laporan	650.000.000	2 laporan	695.500.000	2 laporan	730.275.000	2 laporan	730.275.000	Bagian Umum	
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah laporan perengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 laporan	2 laporan	775.425.000	2 laporan	1.500.90.411	2 laporan	1.100.000.000	2 laporan	1.177.000.000	2 laporan	1.235.850.000	2 laporan	1.235.850.000	Bagian Umum	
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	Jumlah laporan pemenuhan mebeulair dipelihara	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	100.000.000	1 laporan	110.000.000	1 laporan	117.700.000	1 laporan	123.585.000	1 laporan	123.585.000	Bagian Umum	
				Kegiatan Penataan Mekanikal	Jumlah laporan penataan jaringan instalasi	3 laporan	3 laporan	1.404.556.000	3 laporan	900.000.000	3 laporan	950.000.000	3 laporan	1.016.500.000	3 laporan	1.067.325.000	3 laporan	1.067.325.000	Bagian Umum	



				Electrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan	listrik di lingkungan Balaikota, rumah dinas Wali Kota, rumah dinas Wakil Wali Kota, rumah dinas sekda dan gedung KORPRI														
				<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100	100	530.337.500	100	530.337.500	100	530.337.500	100	422.650.000	100	443.782.500	100	443.782.500	Bagian Umum
				Kegiatan Pengadaan	Jumlah pakaian dinas beserta	700 stel	700 stel	530.337.500	700 stel	530.337.500	700 stel	530.337.500	700 stel	422.650.000	700 stel	443.782.500	700 stel	443.782.500	Bagian Umum



				pakaian dinas beserta perlengkapan lainnya	perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah														
				<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	Persentase Pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	-	100	640.250.000	100	685.000.000	100	732.950.000	100	769.579.500	100	769.579.500	Bagian Umum
				Kegiatan pembinaan kinerja aparatur	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	640.250.000	1 laporan	685.000.000	1 laporan	732.950.000	1 laporan	769.579.500	1 laporan	769.579.500	Bagian Umum



Persen	Meningkat	Persentase																		
tase	nya	Perangkat																		
capaian	Kualitas	Daerah																		
sasaran	Penerapan	Dengan Nilai		<b>PROGRAM</b>	<b>Cakupan</b>	-	-	-	-	<b>100 %</b>	<b>43.218.11</b>	<b>100 %</b>	<b>46.283.89</b>	<b>100 %</b>	<b>50.020.000.</b>	<b>100 %</b>	<b>50.020.000.</b>	Bagia n		
n	Reformasi	IKM Baik		<b>ADMINISTR</b>	<b>Pelayanan</b>													Umum		
RPJMD	Birokrasi			<b>ASI UMUM</b>	<b>Umum</b>															
					<b>Perkantoran</b>															
				<b>Administrasi</b>	<b>Cakupan</b>															
				<b>Barang Milik</b>	<b>Pelayanan</b>															
				<b>Daerah</b>	<b>Administrasi</b>	-	-	-	-	<b>100 %</b>	<b>168.517.8</b>	<b>100 %</b>	<b>382.152.8</b>	<b>100 %</b>	<b>382.152.850</b>	<b>100 %</b>	<b>382.152.850</b>	Bagia n		
				<b>pada</b>	<b>Barang Milik</b>													Umum		
				<b>Perangkat</b>	<b>Daerah</b>															
				<b>Daerah</b>	<b>pada</b>															
					<b>Perangkat</b>															
					<b>Daerah</b>															
				Penatausaha	Cakupan	-	-	-	-	<b>100 %</b>	<b>168.517.8</b>	<b>100 %</b>	<b>382.152.8</b>	<b>100 %</b>	<b>382.152.850</b>	<b>100 %</b>	<b>382.152.850</b>	Bagia n		
				an Barang	penatausaha													Umum		
				Milik Daerah	an Barang															
				pada SKPD	Milik Daerah															
				<b>Administrasi</b>	<b>Persentase</b>					<b>n/a</b>		<b>80 Stel</b>	<b>50.495.00</b>	<b>80 Stel</b>	<b>50.495.000</b>	<b>80 Stel</b>	<b>50.495.000</b>	Bagia n		
				<b>Kepegawaian</b>	<b>Pemenuhan</b>	-	-	-	-									Umum		
				<b>Perangkat</b>	<b>prasarana</b>															
				<b>Daerah</b>	<b>kedisiplinan</b>															
					<b>pegawai</b>															
				Pengadaan	Jumlah	-	-	-	-	<b>n/a</b>		<b>80 Stel</b>	<b>50.495.00</b>	<b>80 Stel</b>	<b>50.495.000</b>	<b>80 Stel</b>	<b>50.495.000</b>	Bagia n		
				Pakaian	penyediaan													Umum		
				Dinas	memenuhan															
				Beserta	pakaian															
				Atribut	dinas															
				Kelengkapan	beserta															
				nya	perlengkap															
					annya di															
					lingkup															
					Bagian															
					Umum															
					Bagian															
					Umum															
					Sekretariat															
					Daerah															



				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100 %	6.876.895.440	100 %	6.994.105.560	100 %	7.705.773.424	100 %	7.705.773.424	Bagian Umum	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan pemenuhan penataan instalasi listrik di lingkungan Gedung Kantor dan rumah dinas	-	-	-	-	-	4 laporan	400.956.050	4 laporan	581.355.500	4 laporan	581.355.500	4 laporan	581.355.500	Bagian Umum	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	100 %	1.621.713.500	100 %	1.547.154.510	100 %	1.621.713.500	100 %	1.621.713.500	Bagian Umum	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan penyediaan peralatan di rumah dinas	-	-	-	-	-	100 %	1.945.977.440	100 %	1.859.442.200	100 %	1.945.977.440	100 %	1.945.977.440	Bagian Umum	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	-	100 %	1.007.156.150	100 %	962.478.000	100 %	1.007.156.150	100 %	1.007.156.150	Bagian Umum	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	-	-	-	-	-	100 %	391.315.300	100 %	405.738.150	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	Bagian Umum	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Cakupan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	-	-	-	-	-	100 %	81.623.500	100 %	95.855.000	100 %	100.373.500	100 %	100.373.500	Bagian Umum	



				undangan	Perundang undangan yang tersedia														
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan penyediaan makan minum	-	-	-	-	100 %	887.859.500	100 %	799.999.200	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	-	-	-	-	100 %	293.322.000	100 %	470.438.000	100 %	592.335.334	100 %	592.335.334	Bagian Umum	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan penyimpanan dokumen dan barang	-	-	-	-	100 %	246.972.000	100 %	271.645.000	100 %	356.862.000	100 %	356.862.000	Bagian Umum	
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-	-	-	<b>100 %</b>	<b>565.728.000</b>	<b>100 %</b>	<b>1.299.251.465</b>	<b>100 %</b>	<b>961.448.000</b>	<b>100 %</b>	<b>961.448.000</b>	Bagian Umum	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pengadaan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	100 %	304.280.000	100 %	594.000.000	100 %	700.000.000	100 %	700.000.000	Bagian Umum	
				Pengadaan Mebel	Cakupan Pengadaan mebeulair	-	-	-	-	100 %	261.448.000	100 %	705.251.465	100 %	261.448.000	100 %	261.448.000	Bagian Umum	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	-	<b>100 %</b>	<b>18.776.419.610</b>	<b>100 %</b>	<b>18.564.166.200</b>	<b>100 %</b>	<b>21.132.508.000</b>	<b>100 %</b>	<b>21.132.508.000</b>	Bagian Umum	



				n Daerah	Pemerintah n Daerah															
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi internet bulanan	-	-	-	-	-	12 laporan	275.924.000	12 laporan	314.424.000	12 laporan	332.508.000	12 laporan	332.508.000	Bagian Umum	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan penyediaan jasa yang memerlukan perlengkapan dan peralatan kantor, sewa berupa tenda, meja, kursi dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah penyelenggaraan acara resmi Pemerintah	-	-	-	-	-	70 kegiatan	1.375.689.170	73 kegiatan	1.722.785.200	75 kegiatan		1.800.000.000	75 kegiatan	1.800.000.000	Bagian Umum
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa kebersihan, keamanan dan supir kantor bulanan di lingkungan Balaikota	-	-	-	-	-	100 %	17.124.806.440	100 %	16.526.957.000	100 %	19.000.000.000	100 %	19.000.000.000	Bagian Umum	



					dan rumah dinas														
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100 %	12.086.596.918	100 %	13.829.014.486	100 %	14.264.372.726	100 %	14.264.372.726	Bagian Umum
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Unit Kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	-	-	-	-	-	100 %	467.846.500	100 %	449.873.160	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	Bagian Umum
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	-	-	-	-	-	100 %	2.873.345.510	100 %	3.123.018.600	100 %	3.500.000.000	100 %	3.500.000.000	Bagian Umum



				Pemeliharaan Mebel	Cakupan penyediaan pemeliharaan mebeulair	-	-	-	-	-	100 %	200.090.000	100 %	191.840.000	100 %	200.090.000	100 %	200.090.000	Bagian Umum	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pemeliharaan peralatan dan mesin	-	-	-	-	-	100 %	1.003.186.000	100 %	1.147.573.000	100 %	1.147.573.000	100 %	1.147.573.000	Bagian Umum	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor	-	-	-	-	-	100 %	5.891.726.500	100 %	6.673.148.900	100 %	6.673.148.900	100 %	6.673.148.900	Bagian Umum	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	-	-	-	-	-	100 %	1.650.402.408	100 %	2.243.560.826	100 %	2.243.560.826	100 %	2.243.560.826	Bagian Umum	
				<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	-	-	-	-	-	100 %	3.360.708.000	100 %	3.842.135.220	100 %	4.023.250.000	100 %	4.023.250.000	Bagian Umum	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Cakupan penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan memfasilitasi kegiatan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	100 %	1.620.058.000	100 %	1.615.103.160	100 %	1.691.250.000	100 %	1.691.250.000	Bagian Umum	



				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dan Kepala Daerah	Cakupan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dan memfasilitas i kegiatan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	100 %	1.007.374. 500	100 %	1.242.209. 100	100 %	1.300.750.0 00	100 %	1.300.750.0 00	Bagia n Umu m
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Cakupan penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dan memfasilitas i kegiatan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	100 %	733.275.5 00	100 %	984.822.9 60	100 %	1.031.250.0 00	100 %	1.031.250.0 00	Bagia n Umu m
				<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Jumlah Dokumen Kajian Tim Kebijakan Kepala Daerah</b>	-	-	-	-	-	<b>1 dokumen</b>	<b>1.383.249. 950</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1.322.573. 200</b>	<b>1 dokume n</b>	<b>1.500.000.0 00</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1.500.000.0 00</b>	Bagia n Umu m
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Kajian Tim Kebijakan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	<b>1 dokumen</b>	<b>1.383.249. 950</b>	<b>1 dokume n</b>	<b>1.322.573. 200</b>	<b>1 dokume n</b>	<b>1.500.000.0 00</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1.500.000.0 00</b>	Bagia n Umu m



## 11. BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							-2019		-2020		-2021		-2022		-2023					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Rp 15	16	17	18	19	20	
Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	4.05.02.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100%	3.189.649.554	100%	3.508.614.509,40	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda/Bag.TU Pimpinan	Setda
			4.05.02.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			100%	21.483.400,00	100%	23.631.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda/Bag.TU Pimpinan	
			4.05.02.1.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			100%	38.167.956,00	100%	41.984.751,60	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda/Bag.TU Pimpinan	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4.05.0 2.1.01 .10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			100%	164.601.170,00	100%	181.061.287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda/ Bag.TU Pimpinan	
			4.05.0 2.1.01 .11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100%	291.601.170,00	100%	320.859.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda/ Bag.TU Pimpinan	
			4.05.0 2.1.01 .15	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan			100%	4.248.000,00	100%	4.672.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda/ Bag.TU Pimpinan	
			4.05.0 2.1.01 .17	Penyediaan Makanan dan Minuman			100%	228.814.000,00	100%	251.695.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda/ Bag.TU Pimpinan	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Rp 15	16	17	18	19	20	
			4.05.0 2.1.01 .18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			100%	1.279.285.500,00	100%	1.407.214.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda/ Bag.TU Pimpinan	
			4.05.0 2.1.01 .19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Tekhnis Perkantoran			100%	1.161.395.526,00	100%	1.277.495.480,80	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda/ Bag.TU Pimpinan	
			4.05.0 2.1.0. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen tase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi Baik		70%	143.000.000,00	70%	157.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda/ Bag.TU Pimpinan	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4.05.0 2.1.02 .12	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur			70%	143.000,00	70%	157.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda/ Bag.TU Pimpinan	
			4.05.0 2.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur		100%	58.069.900,00	100%	63.876.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda/ Bag.TU Pimpinan	
			4.05.0 2.1.03 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			100%	58.069.900,00	1,00	63.876.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda/ Bag.TU Pimpinan	
			4.05.0 2.10.1 6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/	Nilai Indeks Layanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/		100%	1.706.891,00	100%	1.877.580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda/ Bag.TU Pimpinan	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Wakil Kepala Daerah																	
			4.05.0 2.10.1 6.02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen/ Luar Negeri			100%	1.706.891.000,00	100%	1.877.580.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda/ Bag.TU Pimpinan



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>PERUBAHAN SOTK TAHUN 2021 -2023</b>																				
Persentase capaian sasaran RPJMD	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Baik	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	(TOTAL 4 Indikator)	-	-	-	-	100%	Rp 1.852.089.465	100%	Rp 2.037.298.412	100%	2.241.028.253	100%	2.465.131.078	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG	
Persentase capaian sasaran RPJMD	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Baik	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian Tepat Waktu.					100%	Rp 778.428.440	100%	Rp 856.271.284	100%	941.898.412	100%	1.036.088.254	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4.01.0 1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	5 dokumen	Rp 185.021.240	5 dokumen	Rp 203.523.364	5 dokumen	223.875.700	5 dokumen	246.263.270	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD		-	-	-	-	1 dokumen	Rp 63.177.400	1 dokumen	Rp 69.495.140	1 dokumen	76.444.654	1 dokumen	84.089.119	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD		-	-	-	-	1 dokumen	Rp 17.563.000	1 dokumen	Rp 19.319.300	1 dokumen	21.251.230	1 dokumen	23.376.353	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4.01.0 1.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) SKPD		-	-	-	-	1 dokumen	Rp 20.162.450	1 dokumen	<b>Rp 22.178.695</b>	1 dokumen	<b>24.396.565</b>	1 dokumen	<b>26.836.221</b>	<b>Bag. PERKAPEG</b>	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD		-	-	-	-	1 dokumen	Rp 21.750.500	1 dokumen	<b>Rp 23.925.550</b>	1 dokumen	<b>26.318.105</b>	1 dokumen	<b>28.949.916</b>	<b>Bag. PERKAPEG</b>	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan SKPD		-	-	-	-	1 dokumen	Rp 21.521.500	1 dokumen	<b>Rp 23.673.650</b>	1 dokumen	<b>26.041.015</b>	1 dokumen	<b>28.645.117</b>	<b>Bag. PERKAPEG</b>	SETDA KOTA BANDUNG



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4.01.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	1 dokumen	Rp 40.846.390	1 dokumen	Rp 44.931.029	1 dokumen	49.424.132	1 dokumen	54.366.545	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai		-	-	-	-	100%	Rp 441.294.500	100%	Rp 485.423.950	100%	533.966.345	100%	587.362.980	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.05. 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi ASN		-	-	-	-	11 unit	Rp 44.982.000	11 unit	Rp 49.480.200	11 unit	54.428.220	11 unit	59.871.042	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN		-	-	-	-	3 Dokumen	Rp 396.312.500	3 Dokumen	Rp 435.943.750	3 Dokumen	479.538.125	3 Dokumen	527.491.938	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Kelengkapannya																	
			4.01.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelaaan dan Penatausahaan keuangan tepat waktu		-	-	-	-	100%	152.112.700	100%	Rp 167.32 3.970	100%	184.056.367	100%	202.462.004	Bag. PERKAPENG	SETDA KOTA BANDUNG	
			4.01.0 1.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp.	Laporan penatausahaan keuangan SKPD		-	-	-	-	1 Laporan	Rp 86.048.400	1 Laporan	Rp 94.653.240	1 Laporan	104.118.564	1 Laporan	114.530.420	Bag. PERKAPENG	SETDA KOTA BANDUNG	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			4.01.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	-	-	-	3 Dokumen	Rp 29.060.400	3 Dokumen	<b>Rp 31.966.440</b>	3 Dokumen	<b>35.163.084</b>	3 Dokumen	<b>38.679.392</b>		<b>Bag. PERKAPEG</b>	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan dan Semesteran SKPD		-	-	-	-	16 Laporan	Rp 37.003.900	16 Laporan	<b>Rp 40.704.290</b>	16 Laporan	<b>44.774.719</b>	16 Laporan	<b>49.252.191</b>		<b>Bag. PERKAPEG</b>	SETDA KOTA BANDUNG



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Persentase capaian sasaran RPJMD	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Baik	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2) Persentase temuan BPK/Inspektorat lingkup Keuangan ditindak lanjuti.		-	-	-	-	2 laporan	42.350.000	2 laporan	Rp 46.585.000	2 laporan	51.243.500	2 laporan	56.367.850	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4.01.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengalokasian dan Penatausahaan keuangan tepat waktu		-	-	-	-	100%	Rp 42.350.000	100%	Rp 46.585.000	100%	51.243.500	100%	56.367.850	Bag. PERKAPENG	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.02. 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tanggapan Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti		-	-	-	-	2 laporan	Rp 42.350.000	2 laporan	Rp 46.585.000	2 laporan	51.243.500	2 laporan	56.367.850	Bag. PERKAPENG	SETDA KOTA BANDUNG



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Persentase capaian sasaran RPJMD	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Baik	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3) IKM Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian		-	-	-	-	100%	621,322,800	100%	Rp 795.504.628	100%	875.055.090	100%	962.560.599	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		-	-	-	-	100%	Rp 723.186.025	100%	Rp 795.504.628	100%	875.055.090	100%	962.560.599	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		-	-	-	-	1 dokumen	Rp 13.345.000	1 dokumen	<b>Rp 14.679.500</b>	1 dokumen	<b>16.147.450</b>	1 dokumen	<b>17.762.195</b>	<b>Bag. PERKAPEG</b>	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	-	-	100%	Rp 486.464.725	100%	<b>Rp 535.111.198</b>	100%	<b>588.622.317</b>	100%	<b>647.484.549</b>	<b>Bag. PERKAPEG</b>	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	-	-	-	2 Laporan	Rp 27.248.100	2 Laporan	<b>Rp 29.972.910</b>	2 Laporan	<b>32.970.201</b>	2 Laporan	<b>36.267.221</b>	<b>Bag. PERKAPEG</b>	SETDA KOTA BANDUNG



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4.01.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penyediaan Makanan dan Minuman		-	-	-	-	100%	Rp 61.730.700	100%	Rp 67.903.770	100%	74.694.147	100%	82.163.562	Bag. PERKAPENG	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan		-	-	-	-	100%	Rp 114.270.000	100%	Rp 125.697.000	100%	138.266.700	100%	152.093.370	Bag. PERKAPENG	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia		-	-	-	-	12 Laporan	Rp 8.064.000	12 Laporan	Rp 8.870.400	12 Laporan	9.757.440	12 Laporan	10.733.184	Bag. PERKAPENG	SETDA KOTA BANDUNG



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4.01.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan penyediaan Makanan dan minuman tamu		-	-	-	-	100%	Rp 153.000	100%	Rp 168.300	100%	185.130	100%	203.643	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur		-	-	-	-	100%	Rp 11.910.500	100%	Rp 13.101.550	100%	14.411.705	100%	15.852.876	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG
Persentase capaian sasaran RPJMD	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Baik	4.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4) Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	100%	308.125.000	100%	Rp 338.937.500	100%	372.831.250	100%	410.114.375	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	100%	289.855.000	100%	Rp 318.840.500	100%	350.724.550	100%	385.797.005	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi		-	-	-	-	12 Laporan	Rp 17.600.000	12 Laporan	Rp 19.360.000	12 Laporan	21.296.000	12 Laporan	23.425.600	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	-	-	-	12 Laporan	Rp 272.255.000	12 Laporan	Rp 299.480.500	12 Laporan	329.428.550	12 Laporan	362.371.405	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 -2019		Tahun-2 -2020		Tahun-3 -2021		Tahun-4 -2022		Tahun-5 -2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Belanja Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	100%	18.270.000	100%	Rp 20.097.000	100%	22.106.700	100%	24.317.370	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG
			4.01.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin		-	-	-	-	3 Dokumen	Rp 18.270.000	3 Dokumen	Rp 20.097.000	3 Dokumen	22.106.700	3 Dokumen	24.317.370	Bag. PERKAPEG	SETDA KOTA BANDUNG

Sumber: Bagian Perkapeg, Angka Anggaran 2023 Proyeksi plus 10% dari RKPD Tahun 2022

**Tabel 6. 2**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) Sekretariat Daerah Kota Bandung**

RPJMD KOTA BANDUNG 2018-2023 / RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2018-2023							PEMETAAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
KODE/PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI PENGUKURAN (INDIKATOR KINERJA PROGRAM)	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KAB/KOTA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN (INDIKATOR KINERJA PROGRAM)	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	
						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.05.02.40	Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Indeks EKPPD berdasarkan Indeks EKPPD:  Indeks EKPPD Prestasi  1. 3,00 < 4,00 Sangat Tinggi  2. 2,00 < 3,00 Tinggi  3. 1,00 < 2,00 Sedang  4. 0,00 < 1,00 Rendah	Predikat	Sangat Tinggi	Kepala Bagian Pemerintahan	4	1	02	2.001		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (sesuai permendagri 18/2020)  1. 1.00 < 1.80 Sangat Rendah 2. 1.81 < 2.60 Rendah 3. 2.61 < 3.40 Sedang 4. 3.41 < 4.20 Tinggi 5. 4.21 < 5.00 Sangat Tinggi	Status Kinerja	Sangat Tinggi	Kepala Bagian Tata Pemerintahan



4.05.02.40.001	Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Dokumen	1	Kasubag Tata Pemerintahan	4	1	02	2.01	03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD		Dokumen	1	Kasubag Otonomi Daerah
4.05.02.40.002	Fasilitasi Pelaporan Standart Pelayanan Minimal	Jumlah SPM yang dievaluasi		PD	6	Kasubag Tata Pemerintahan	4	1	02	2.01	01	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah SPM yang di Evaluasi		Urusan	6	Kasubag Administrasi Pemerintahan
<b>4.05.02.41</b>	<b>Program Dukungan Kelancaran Pemilu</b>	terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilpres, Pilleg dan Pilkada		Kegiatan	1	<b>Kepala Bagian Pemerintahan</b>	4	1	02	2.01	03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD		Dokumen	1	Kasubag Otonomi Daerah
4.05.02.41.001	Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu	Persentase terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilpres, Pilleg dan Pilkada		Persentase	100	Kasubag Otonomi Daerah											
<b>4.05.02.42</b>	<b>Program Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah</b>	<b>Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah</b>		<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>Kepala Bagian Pemerintahan</b>	4	1	02	2.02	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	<b>Jumlah Kecamatan yang masuk Indeks Nilai Kategori Hijau dibandingkan Jumlah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dikalikan 100%</b>	Persentase	100	Kasubag Administrasi Kewilayahan
4.05.02.42.001	Fasilitasi Dan Inventarisasi, Pemantauan Dan Penegasan Batas Daerah Dan Batas Wilayah	Persentase Terfasilitasinya Penataan Batas Wilayah		Persentase	100	Kasubag Otonomi Daerah											



4.05.02.42.002	Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Inventarisasi Dan Identifikasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi dan identifikasi pembakuan rupa bumi		Dokumen	1	Kasubag Otonomi Daerah													
4.05.02.43	<b>Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah</b>	<b>Persentase Kecamatan Berkinerja Baik</b>	<b>Jumlah Kecamatan yang masuk Indeks Nilai Kategori Hijau dibandingkan Jumlah Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung dikalikan 100%</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>Kepala Bagian Pemerintahan</b>													
4.05.02.43.004	Fasilitasi Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Validasi Triwulanan SIP Bandung Juara dan Hasil Penilaian kegiatan evaluasi kinerja Camat dan Lurah		Dokumen	4	Kasubag Bina Kewilayahan													
4.05.02.43.002	Pemantapan Inovasi Manajemen Pemerintahan Dan Pembangunan Kewilayahan	Jumlah Dokumen perencanaan, realisasi, monev, dan laporan akhir PIPPK		Dokumen	4	Kasubag Bina Kewilayahan													



4.05.02.43.001	Pemantapan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya pelimpahan sebagian urusan Wali Kota kepada Camat		Dokumen	1	Kasubag Tata Pemerintahan	4	1	02	2.02	01	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah SPM yang di Evaluasi		Urusan	6	Kasubag Administrasi Pemerintahan
4.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan laporan ketatausahaan tepat waktu		Laporan	4	Kepala Bagian Pemerintahan	4	1	01			Program Administrasi Perkantoran					
							4	1	01	2.03		Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Laporan Ketatausahaan Tepat Waktu		Laporan	4	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
4.05.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Penyediaan ATK		Kegiatan	4	Kasubag Tata Pemerintahan					10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Penyediaan ATK		Kegiatan	4	Kasubag Administrasi Pemerintahan
4.05.02.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya ruangan kantor yang bersih		Kegiatan	4	Kasubag Tata Pemerintahan					08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya ruangan kantor yang bersih		Kegiatan	4	Kasubag Administrasi Pemerintahan
4.05.02.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terawatnya peralatan kerja		Kegiatan	4	Kasubag Tata Pemerintahan					09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terawatnya peralatan kerja		Kegiatan	4	Kasubag Administrasi Pemerintahan
4.05.02.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		Kegiatan	4	Kasubag Tata Pemerintahan					14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		Kegiatan	4	Kasubag Administrasi Pemerintahan
4.05.02.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kegiatan	4	Kasubag Tata Pemerintahan					15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kegiatan	4	Kasubag Administrasi Pemerintahan



4.05.02.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya laporan penyediaan makanan dan minuman		Kegiatan	4	Kasubag Tata Pemerintahan					17	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya laporan penyediaan makanan dan minuman		Kegiatan	4	Kasubag Administrasi Pemerintahan
4.05.02.01.018	Rapat-Rapat Koodinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah		Kegiatan	4	Kasubag Tata Pemerintahan					18	Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koodinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah		Kegiatan	4	Kasubag Administrasi Pemerintahan
4.05.02.01.019	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Terfasilitasinya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran		Kegiatan	4	Kasubag Tata Pemerintahan					07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terfasilitasinya Jasa Administrasi Keuangan		Kegiatan	4	Kasubag Administrasi Pemerintahan
<b>4.05.05.02.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tersedianya sarana penunjang peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>Kepala Bagian Pemerintahan</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terfasilitasinya Kegiatan Pembinaan ASN</b>		<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>Kepala Bagian Tata Pemerintahan</b>
4.05.05.02.03.002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya		Stel	23	Kasubag Tata Pemerintahan	4	1	01	2.04	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya		Stel	20	Kasubag Administrasi Pemerintahan
4.05.05.02.03.003	Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Pembinaan Disiplin Dan Kinerja Aparatur		Dokumen	1	Kasubag Tata Pemerintahan	5	0	02	2.05	01	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Terpenuhinya Pembinaan Disiplin Dan Kinerja Aparatur		Laporan	1	Kasubag Administrasi Pemerintahan
													Terpenuhinya Pembinaan Disiplin Dan Kinerja Aparatur		Laporan	1	Kasubag Administrasi Pemerintahan



4.01 . 4.01.01.03 . 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan Pelayanan Administrasi yang Terfasilitasi	%	100	Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	4	0	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		%	100	Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
							4	0	01	20		Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum	-	laporan	9	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat
4.01 . 4.01.01.03 . 19.05	kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan	-	bulan	12	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat	4	0	01	20	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan		bulan	12	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat
4.01 . 4.01.01.03 . 19.08	kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat Kerja/Kantor di Lingkungan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	-	unit	62	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat					09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat Kerja/Kantor di Lingkungan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan		unit	62	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat
4.01 . 4.01.01.03 . 19.18	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kegiatan penyediaan alat tulis kantor	-	Laporan	1	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat					10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kegiatan penyediaan alat tulis kantor		Laporan	1	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat
4.01 . 4.01.01.03 . 19.09	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan	-	kegiatan	2	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat	5	0	02	20	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan		kegiatan	2	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat



	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga	-	kegiatan	1	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat					12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga	kegiatan	1	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	-	jenis	36	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat					13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	jenis	36	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan minuman di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	-	Laporan	72	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat					14	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan minuman di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Laporan	72	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat
	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	bulan	12	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat					15	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat
	kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah pembayaran jasa Supir	-	bulan	12	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat					16	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah pembayaran jasa Supir	bulan	12	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai</b>	<b>Jumlah Prasana Pegawai yang terpenuhi x 100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Kepala Bagian Kesra dan Kemasy</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>01</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Disiplin dan</b>	laporan	1	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat



						arakata n							Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	stel	50	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat	4	01	01	2014	02	Pengelolaan Perlengkapan	Jumlah Pengelolaan Perlengkapan	laporan	1		
	<b>Program Sosial Keagamaan</b>	<b>Persentase rancangan Kebijakan Bidang Sosial Keagamaan ditindaklanjuti</b>	<b>Jumlah Rancangan Bidang Sosial Keagamaan yg tindaklanjuti dibagi Jumlah Rancangan Bidang Sosial Keagamaan yang dibuat</b>	%	<b>100</b>	<b>Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan</b>	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>Program Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan</b>	<b>Cakupan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan</b>	<b>Jumlah Rancangan Bidang Sosial Keagamaan yg tindaklanjuti dibagi Jumlah Rancangan Bidang Sosial Keagamaan yang dibuat</b>	%	<b>25</b>	<b>Kepala Bagian Kesra</b>
	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan	Terlaksananya Pembinaan Guru Keagamaan	-	orang	600		4	01	02	2012	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	laporan	4	Subag Bina Sosial keagamaan	
	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya kegiatan Safari Jum'at dan Safari Ramadhan	-	laporan	36							Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan	Terlaksananya Pembinaan Guru Keagamaan	orang	600	Subag Bina Sosial keagamaan	



	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Masjid Pemerintah Kota Bandung dan Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam Di Masjid Al Ukhuwwah Kota Bandung	-	bulan	12							Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya kegiatan Safari Jum'at dan Safari Ramadhan	laporan	36	Subag Bina Sosial keagamaan
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sosial Keagamaan	Dokumen 1. Hasil Kajian TOT Ahlan Qur'an, 2. Hasil Kajian Safari Jum'at dan Minggu, 3. Hasil Kajian Tentang Sarana Peribadatan	-	dokumen	3							Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Masjid Pemerintah Kota Bandung dan Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam Di Masjid Al Ukhuwwah Kota Bandung	bulan	12	Subag Bina Sosial keagamaan
												Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sosial Keagamaan	Dokumen 1. Hasil Kajian TOT Ahlan Qur'an, 2. Hasil Kajian Safari Jum'at dan Minggu, 3. Hasil Kajian Tentang Sarana Peribadatan	dokumen	3	Subag Bina Sosial keagamaan



	<b>Program Program koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi dan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase Rancangan Kebijakan bidang Sosial kemasyarakatan ditindaklanjuti</b>	<b>Jumlah Rancangan Bidang Sosial Kemasyarakatan yg tindaklanjuti dibagi Jumlah Rancangan Bidang Sosial Kemasyarakatan yang dibuat</b>	<b>%</b>	<b>25</b>	<b>Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Tingkat Capaian Pelaksanaan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Subag Bina Kesejahteraan Sosial</b>
	Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Masalah Prioritas dan Penanggulangan HIV/Aids untuk Meningkatkan Pemahaman dan Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam Penanggulangan HIV Aids;		laporan	1	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat							Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Masalah Prioritas dan Penanggulangan HIV/Aids untuk Meningkatkan Pemahaman dan Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam Penanggulangan HIV Aids;	laporan	1	Subag Bina Kesejahteraan Sosial



	kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tim Pembina UKS Kota Bandung	Terlaksananya Pembinaan TP UKS Kota Bandung		laporan	1	Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat						kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tim Pembina UKS Kota Bandung	Terlaksananya Pembinaan TP UKS Kota Bandung	laporan	1	Subag Bina Kesejahteraan Sosial
	Kegiatan Fasilitasi Tindaklanjut Peraturan Daerah Bidang Sosial Kemasyarakatan	Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi perangkat daerah dalam menyusun perwal/kepwal		laporan	2	Kasubag Bina Sosial Kemasyarakatan										
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesra dan Kemasyarakatan	Terfasilitasinya kegiatan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) Kota Bandung		laporan	3	Kasubag Bina Sosial Kemasyarakatan	4	0	02	2	0	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Capaian Pelaksanaan kegiatan bidang Kesejahteraan Masyarakat	%	100	Subag Bina Kesejahteraan Masyarakat
												Kegiatan Fasilitasi Tindaklanjut Peraturan Daerah Bidang Sosial Kemasyarakatan	Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi perangkat daerah dalam menyusun perwal/kepwal	laporan	2	Subag Bina Kesejahteraan Masyarakat
												Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesra dan Kemasyarakatan	Terfasilitasinya kegiatan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) Kota Bandung	laporan	3	Subag Bina Kesejahteraan Masyarakat



4.05 . 4.05.24	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perda yang terbit tahun n-1/Jumlah Perda yang dievaluasi x 100% dilaporkan secara berkala per triwulan	%	100	Bagian Hukum	4	0 1	2			Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat		%	100	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.05 . 4.05.24.12	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Jumlah dokumen evaluasi produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron	Dokumen	4	Bagian Hukum	4	0 1	2	20 3		Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Daerah		Dokumen	4	Kepala Bagian Hukum
4.05 . 4.05.32	Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-Jumlah prosentase semua kegiatan Program Pembangunan Produk Hukum Daerah/Jumlah Kegiatan dalam Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	%	100	Bagian Hukum	4	0 1	2	2 0 3	0 1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Dokumen	4	Kasubag Peraturan Perundang-undangan



4.05 . 4.05.32.01	Sosialisasi/P enyuluhan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah penyuluhan hukum terpadu, jumlah pembinaan keluarga sadar hukum (Kadarkum)		kegiatan	10	Bagian Hukum	4	0 1	2	20 3	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi Bantuan Hukum		Dokumen	4	Kasubag Bantuan Hukum
4.05 . 4.05.32.02	Legislasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan daerah		Raperda	16	Bagian Hukum	4	0 1	2	20 3	03	Pendokumenta sian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Laporan Pendokumen tasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				Kasubag Administra si, Dokumen tasi dan Informasi Hukum
4.05 . 4.05.32.03	Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang- undangan dan Produk Hukum Daerah		Dokumen	6	Bagian Hukum											
4.05 . 4.05.32.04	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan		Raperwal dan Rakepwal	80 dan 20	Bagian Hukum											
4.05 . 4.05.32.05	Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM	Terlaksananya pendidikan HAM bagi aparat Pemerintah Kota Bandung		Laporan	4	Bagian Hukum											



4.05 . 4.05.32.06	Pemberian Bantuan Hukum	Jumlah Penanganan Perkara		20	Perkara	Bagian Hukum												
<b>4.05 . 4.05.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Bagian Hukum</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>01</b>			<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>Cakupan administrasi umum</b>		<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Kasubag Administrasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum</b>	
4.05 . 4.05.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor				Bagian Hukum	4	0	01	20	3	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum		Dokumen	1	Kasubag Administrasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum	
4.05 . 4.05.01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan peralatan kerja				Bagian Hukum	4	0	01	20	3	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		Dokumen	1	Kasubag Administrasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum
4.05 . 4.05.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				Bagian Hukum	4	0	01	20	3	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan peralatan kerja		Dokumen	1	Kasubag Administrasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum
4.05 . 4.05.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan				Bagian Hukum	4	0	01	20	3	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		Dokumen	1	Kasubag Administrasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum



4.05 . 4.05.01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga				Bagian Hukum	4	0 1	01	20 3	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi a kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		Dokumen	1	Kasubag Administrasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum
4.05 . 4.05.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Bagian Hukum	4	0 1	01	20 3	12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		Dokumen	1	Kasubag Administrasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum
4.05 . 4.05.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman				Bagian Hukum	4	0 1	01	20 3	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Dokumen	1	Kasubag Administrasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum
4.05 . 4.05.01.18	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhi sarana pendukung rapat koordinasi dan konsultasi				Bagian Hukum	4	0 1	01	20 3	15	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman		Dokumen	1	Kasubag Administrasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum
4.05 . 4.05.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran				Bagian Hukum	4	0 1	01	20 3	17	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhi a sarana pendukung rapat koordinasi dan konsultasi		Dokumen	1	Kasubag Administrasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum



4.05 . 4.05.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		%	100	<b>Bagian Hukum</b>	4	0 1	01		1 8	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran</b>	<b>Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran /teknis perkantoran</b>		<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan Informasi Hukum</b>
4.05 . 4.05.03.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah laporan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				Bagian Hukum						Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Dokumen	1	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan Informasi Hukum
4.05 . 4.05.03.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah laporan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				Bagian Hukum						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah laporan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Dokumen	1	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan Informasi Hukum
<b>4.05.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>Kepala Bagian Kerja Sama</b>	X	X X	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Cakupan Adminstrasi</b>	-	Dokumen	4	
							X	X X	01	2 0 3		<b>Kegiatan Administrasi Umum</b>	<b>Cakupan adminstrasi Umum</b>	-	Dokumen	4	<b>Kepala Bagian Kerja Sama</b>



4.05.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama	X	X	01	203	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama
4.05.01.009	Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Laporan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama	X	X	01	203	07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama
4.05.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama	X	X	01	203	08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama
4.05.01.011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama	X	X	01	203	09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama



4.05.01.014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama	X	X	01	203	10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama
4.05.01.015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama	X	X	01	203	11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama
4.05.01.017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama	X	X	01	203	13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama
4.05.01.018	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama	X	X	01	203	14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama



4.05.01.019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama	X	X	01	203	15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama
							X	X	01	203	17	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama
							X	X	01	203	18	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama
							X	X	01	203	07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama
							X	X	01	203	08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Laporan	4	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama



4.05.57	Program Peningkatan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Presentase Implementasi Kerja Sama Lingkup Dalam dan Luar Negeri	Presentase KSDN dijumlah dengan Presentase KSLN, dibagi 2	%	51,75	Kepala Bagian Kerja Sama	4	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
							4	01	02	204		Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah	Presentase Implementasi Kerja Sama Lingkup Dalam dan Luar Negeri	Presentase KSDN dijumlah dengan Presentase KSLN, dibagi 2	%	51,75	Kepala Bagian Kerja Sama
4.05.57.001	Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ke Tiga	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ke Tiga	-	Laporan	4	Kasubag Kerja Sama Dalam Negeri	4	01	02	204	01	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Laporan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	-	Laporan	4	Kasubbag Kerja Sama Dalam Negeri
4.05.57.002	Kegiatan Fasilitas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Laporan Forum Asosiasi Pemerintah Daerah	-	Laporan	4	Kasubbag Kerja Sama Dalam Negeri	4	01	02	204	02	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Laporan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	-	Laporan	4	Kasubbag Kerja Sama Luar Negeri
05.57.'003	Kegiatan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri	-	Laporan	4	Kasubbag Kerja Sama Luar Negeri	4	01	02	204	03	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen evaluasi Kerja Sama	-	Dokumen	2	Kasubbag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama



4.05.4.05. 02.06.58	Program Koordinasi Rumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi	Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga	bidang prioritas pembangunan yang terealisasi oleh TJSL dibagi 7 bidang prioritas pembangunan dikali 100%	%	85.71	Kepala Bagian Perekonomian	4	0	03			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Perekonomian yang diselesaikan	Jumlah Permasalahan Selesai dibagi Permasalahan dikali 100%	%	100	Sekretaris Daerah Kota Bandung
		persentase bumd yang tercapai kinerjanya (keterangan: masing masing bumd diberikan target kinerja sesuai dengan tujuan dibentuknya)	Jumlah BUMD Berkinerja Baik dibagi BUMD yang ada dikali 100%	%	60												
		Persentase permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Perekonomian yang diselesaikan	Akumulasi dari Persentase permasalahan di Lingkup Pengembangan Daya Saing dan Produksi dan distribusi Barang dan Jasa dibagi 2 dikali 100 %	%	100												



							4	0	03	2		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	persentase bumd yang tercapai kinerjanya (keterangan: masing masing bumd diberikan taget kinerja sesuai dengan tujuan dibentuknya )	Jumlah BUMD Berkinerja Baik dibagi BUMD yang ada dikali 100%	%	60	Kepala Bagian Perekonomian	
													Persentase permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Perekonomian yang diselesaikan	Akumulasi dari Persentase permasalahan di Lingkup Pengembangan Daya Saing dan Produksi dan distribusi Barang dan Jasa dibagi 2 dikali 100 %	%	100		
4.05.4.05.0 2.06.58.001	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR Sebagai Salah Satu Pembangunan Ekonomi	Jumlah Perusahaan yang dikoordinasikan	Total Perusahaan yang dikoordinasikan per tahun	Perusahaan	71	Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing												



4.05.4.05.0 2.06.58.002	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Pengembangan Potensi dan Daya Saing kota	Jumlah Permasalahan Selesai dibagi Permasalahan dikali 100%	%	100	Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing					01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang di evaluasi berdasarkan kriteria pengukuran kinerja	Total BUMD yang dievaluasi per tahun	BUMD	5	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD
4.05.4.05.0 2.06.58.003	Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah	Jumlah BUMD yang di evaluasi berdasarkan kriteria pengukuran kinerja	Total BUMD yang dievaluasi per tahun	BUMD	5	Kepala Sub Bagian Bina Investasi dan Pengembangan Usaha Daerah					02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Permasalahan Selesai dibagi Permasalahan dikali 100%	%	100	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
4.05.4.05.0 2.06.58.004	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa	Jumlah Permasalahan Selesai dibagi Permasalahan dikali 100%	%	100	Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi					03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Ekonomi, Mikro Kecil	Jumlah Permasalahan Selesai dibagi Permasalahan dikali 100%	%	100	Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Mikro Kecil
4.05.4.05.0 2.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Akumulasi persentase pencapaian kinerja setiap kegiatan Adum dibagi 10	%	100	Kepala Bagian Perekonomian	4	0	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah		%	100	Sekretaris Daerah Kota Bandung



							4	0	01	2		Kegiatan Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Akumulasi persentase pencapaian kinerja setiap kegiatan pada kegiatan Adum dikali 100%	%	100	Kepala Bagian Perekonomian
4.05.4.05.0 2.06.01.009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Unit	60	Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing	4	0	01	20	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Bulanan		Jasa Bulanan	1	Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Mikro Kecil
4.05.4.05.0 2.06.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan ATK		Laporan	1	Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing					09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Unit	60	Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Mikro Kecil
4.05.4.05.0 2.06.01.011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan		Jenis	3	Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing					10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan ATK		Laporan	1	Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Mikro Kecil



4.05.4.05.0 2.06.01.014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga		Jenis	2	Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing				11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan		Jenis	3	Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Mikro Kecil
4.05.4.05.0 2.06.01.015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Bahan Bacaan		Laporan	1	Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing				13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Laporan	1	Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Mikro Kecil
4.05.4.05.0 2.06.01.017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan		Laporan	1	Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing				14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga		Jenis	2	Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Mikro Kecil
4.05.4.05.0 2.06.01.018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Laporan	1	Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Bahan Bacaan		Laporan	1	Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Mikro Kecil



4.05.4.05.0 2.06.01.019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran		Laporan	3	Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing					17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	Laporan	1	Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Mikro Kecil		
4.05.4.05.0 2.06.01.023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Bulanan		Jasa Bulanan	1	Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing					18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Laporan	1	Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Mikro Kecil		
<b>4.05.4.05.02.06.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	<b>Akumulasi persentase pencapaian kinerja setiap Kegiatann pada Program dikali 100%</b>	%	100	<b>Kepala Bagian Perekonomian</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	<b>Akumulasi persentase pencapaian kinerja setiap Kegiatan dikali 100%</b>	%	100	<b>Kepala Bagian Perekonomian</b>
4.05.4.05.0 2.06.03.002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Stel	15	Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing	4	0	01	20	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stel	15	Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Mikro Kecil		



4.05.01	Program Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100	Kabag Prodekbang	4	01	01			Program Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum		%	100	Kabag Adbang
							4	01	01	203		Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum		Laporan	1	Kasubag Monevlap
4.05.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung		Laporan	1	Kasubag Monevlap	4	01	01	203	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat		Laporan	1	Kasubag Monevlap
							4	01	01	203	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor		Laporan	1	Kasubag Monevlap
4.05.01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Laporan Perbaikan Peralatan Kerja		Laporan	1	Kasubag Monevlap	4	01	01	203	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Laporan Perbaikan Peralatan Kerja		Laporan	1	Kasubag Monevlap
4.05.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan Penyediaan ATK		Laporan	1	Kasubag Monevlap	4	01	01	203	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan Penyediaan ATK		Laporan	1	Kasubag Monevlap



4.05.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Laporan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan		Laporan	1	Kasubag Monevlap	4	01	01	2013	11	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Laporan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan		Laporan	1	Kasubag Monevlap
4.05.01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Laporan	1	Kasubag Monevlap	4	01	01	2013	13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Laporan	1	Kasubag Monevlap
4.05.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan		Laporan	1	Kasubag Monevlap	4	01	01	2013	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan		Laporan	1	Kasubag Monevlap
4.05.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan Dan Minuman		Laporan	1	Kasubag Monevlap	4	01	01	2013	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan Dan Minuman		Laporan	1	Kasubag Monevlap
							4	01	01	2013	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah		Laporan	1	Kasubag Monevlap
4.05.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			Laporan	1		4	01	01	2014		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah laporan pengadaan perlengkapan peralatan aparatur</b>		<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>Kasubag Monevlap</b>



4.05.02.12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur		Laporan	1	Kasubag Monevlap	4	01	01	2014	02	Pengelolaan Perlengkapan	Jumlah laporan pengelolaan perlengkapan		Laporan	1	Kasubag Monevlap
4.05.45	<b>Program Peningkatan Desain dan Kualitas Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur</b>		%	100	Kabag Prodekbang	4	01	03	2012		<b>Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase penyusunan program dan desain, pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan pembangunan</b>		%	100	<b>Kabag Adbang</b>
		<b>Persentase pengendalian pembangunan bidang infrastruktur</b>		%	100	Kabag Prodekbang							<b>Persentase pengendalian pembangunan bidang infrastruktur</b>		%	100	<b>Kabag Adbang</b>
		<b>Persentase pelaporan rencana dan realisasi penyerapan anggaran</b>		%	100	Kabag Prodekbang							<b>Persentase pelaporan rencana dan realisasi penyerapan anggaran</b>		%	100	<b>Kabag Adbang</b>
4.05.45.05	Kegiatan Penyusunan Administrasi Fisik dan Non Fisik	Persentase perencanaan pembangunan yang terevaluasi		%	100	Kasubag Program dan Desain pembangunan	4	01	03	2012	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase penyusunan dan evaluasi program dan desain pembangunan		%	100	Kasubag Program dan Desain Pembangunan
4.05.45.06	Kegiatan Standar Operasional Desain Pembangunan Daerah	Jumlah rumusan kebijakan desain pembangunan		Dokumen	1	Kasubag Program dan Desain pembangunan											



		Persentase desain pembangunan infrastruktur yang terevaluasi		%	100	Kasubag Program dan Desain pembangunan											
4.05.45.01	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan yang terevaluasi		%	100	Kasubag Desain Pembangunan	4	01	03	202	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase pelaksanaan pembangunan yang terevaluasi dan terkendali		%	100	Kasubag Pengendalian Kualitas Pembangunan
4.05.45.02	Kegiatan Fasilitasi Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pembangunan yang terevaluasi		%	100	Kasubag Desain Pembangunan											
4.05.45.04	Kegiatan Fasilitasi Aplikasi TEPR	Persentase OPD yang melaporkan rencana penyerapan dan Realisasi penyerapan anggaran		%	100	Kasubag Monevlap	4	01	03	202	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase OPD yang melaporkan rencana dan realisasi penyerapan anggaran		%	100	Kasubag Monevlap
4.05.4.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	cakupan layanan adimintrasi perkantoran : jumlah layanan x 100%	%	100	Kepala BPBJ	4	01	01			Program Administrasi Umum	Cakupan administrasi umum	cakupan layanan adimintrasi perkantoran : jumlah layanan x 100%	%	100	Kepala BPBJ
							4	01	1	203		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum	-	Laporan	1	Kepala BPBJ



4.05 . 4.05.01.02 . 01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Laporan	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	4	01	20	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah Dokumen jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Dokumen	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa
4.05 . 4.05.01.02 . 01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan jasa kebersihan kantor		Laporan	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	4	01	20	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Dokumen	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa
4.05 . 4.05.01.02 . 01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah laporan jasa perbaikan peralatan kerja		Laporan	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	4	01	20	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Dokumen jasa kebersihan kantor	-	Dokumen	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa
4.05 . 4.05.01.02 . 01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan penyediaan Alat Tulis Kantor		Laporan	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	4	01	20	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Dokumen jasa perbaikan peralatan kerja	-	Dokumen	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa
4.05 . 4.05.01.02 . 01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan jenis cetakan dan penggandaan		Laporan	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	4	01	20	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Dokumen penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Dokumen	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan



						an Barang/ Jasa											n Barang / Jasa
4.05 . 4.05.01.02 . 01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah laporan jenis komponen instalasi listrik		Laporan	1	Kasubag Pembina an dan Advokas i Pengada an Barang/ Jasa	4	0 1	01	20 3	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen jenis cetakan dan penggandaan	-	Dokumen	1	Kasubag Pembinaa n dan Advokasi Pengadaa n Baran / Jasa
4.05 . 4.05.01.02 . 01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan jenis peralatan rumah tangga		Laporan	1	Kasubag Pembina an dan Advokas i Pengada an Barang/ Jasa	4	0 1	01	20 3	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen jenis komponen instalasi listrik	-	Dokumen	1	Kasubag Pembinaa n dan Advokasi Pengadaa n Barang / Jasa
4.05 . 4.05.01.02 . 01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah laporan jenis bahan bacaan		Laporan	1	Kasubag Pembina an dan Advokas i Pengada an Barang/ Jasa	4	0 1	01	20 3	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Dokumen	1	Kasubag Pembinaa n dan Advokasi Pengadaa n Barang / Jasa
4.05 . 4.05.01.02 . 01.16	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan jenis bahan logistik kantor		Laporan	1	Kasubag Pembina an dan Advokas i Pengada an Barang/ Jasa	4	0 1	01	20 3	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen jenis peralatan rumah tangga	-	Dokumen	1	Kasubag Pembinaa n dan Advokasi Pengadaa n Barang / Jasa



4.05 . 4.05.01.02 . 01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman		Laporan	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	4	0 1	01	20 3	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen jenis bahan bacaan	-	Dokumen	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa
4.05 . 4.05.01.02 . 01.18	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Laporan	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	4	0 1	01	20 3	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen jenis bahan logistik kantor	-	Dokumen	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa
4.05 . 4.05.01.02 . 01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran		Laporan	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	4	0 1	01	20 3	17	penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Dokumen penyediaan makanan dan minuman	-	Dokumen	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa
<b>4.05.4.05.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana Aparatur BPBJ</b>	Kebutuhan Sarana Aparatur : jumlah sarana x 100%	%	100	<b>Kepala BPBJ</b>	4	0 1	01	20 3	18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Dokumen kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Dokumen	1	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa



4.05.4.05.0 2.02.12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan Sarana Aparatur Bagian Layanan Pengadaan				Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	4	01	03			<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan</b>	jumlah dokumen perencanaan perekonomian dan pembangunan yang terselesaikan : jumlah dokumen x 100			
<b>4.05.4.05.02.37</b>	<b>Program Pengadaan Barang/Jasa Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan Pembangunan Dalam Pengadaan Barang/Jasa</b>	jumlah dokumen perencanaan pengadaan yang terselesaikan : jumlah dokumen x 100%	%	100	<b>Kepala BPBJ</b>	4	01	03	203		<b>Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>Persentase Perencanaan Pembangunan Dalam Pengadaan Barang/Jasa</b>	jumlah dokumen perencanaan pengadaan yang terselesaikan : jumlah dokumen x 100			
4.05.4.05.0 2.37.01	Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Jumlah Paket Tender yang difasilitasi SPSE		Paket Tender	230	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4	01	03	203	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah paket (segi jumlah dan nilai) yang diselesaikan dengan perencanaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)		Paket Tender	230	
4.05.4.05.0 2.37.02	Bandung Integrated Resources Management System	Jumlah paket pengadaan langsung yang difasilitasi SPSE		Paket Pengadaan Langsung	5000	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4	01	03	203	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Paket Tender dan Pengadaan Langsung yang difasilitasi SPSE		Paket Tender dan Pengadaan Langsung	5230	



4.05.4.05.0 2.37.03	Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang Jasa	Jumlah Dokumen naskah Dinas pengembangan dan pembinaan pengadaan barang/jasa		Dokumen	4	Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	4	01	03	203	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa		Dokumen	4	
4.05.4.05.0 2.37.04	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa	jumlah paket (segi jumlah dan nilai) yang diselesaikan dengan perencanaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)		Paket Tender	230	Kasubag Pengelolaan Barang/ Jasa											
<b>4.05.4.05.02.09.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Pelayanan administrasi baik : Jumlah Total Pelayanan Administrasi x 100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Kabag ORPAD</b>	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>Terselesaikannya permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</b>	<b>Jumlah masalah yang terselesaikan : jumlah masalah x 100% (penjelasan: permasalahan yang bersifat strategis membutuhkan kebijakan dan lintas sektoral)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Asisten Administrasi Umum</b>
4.05.4.05.0 2.09.01.008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Laporan	12	Kasubag SIAK	4	01	01	203		Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	Kabag Organisasi



4.05.4.05.0 2.09.01.009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	-	Unit	75	Kasubag SIAK	4	0	04	2	0	1	3	1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Laporan	12	Kasubag Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4.05.4.05.0 2.09.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung	-	Paket	4	Kasubag SIAK	4	0	04	2	0	1	3	2	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	-	Unit	75	Kasubag Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4.05.4.05.0 2.09.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	-	Jenis	2	Kasubag SIAK	4	0	04	2	0	1	3	0	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung	-	Laporan	4	Kasubag Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4.05.4.05.0 2.09.01.014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	-	Laporan	12	Kasubag SIAK	4	0	04	2	0	1	3	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	-	Jenis	2	Kasubag Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4.05.4.05.0 2.09.01.015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan	-	Paket	4	Kasubag SIAK	4	0	04	2	0	1	3	5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	-	Laporan	12	Kasubag Akuntabilitas Kinerja dan



	Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah															Reformasi Birokrasi
4.05.4.05.0 2.09.01.017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	-	Laporan	12	Kasubag SIAK	4	0 1	04	2 0 3	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Sekretariat Daerah	-	Paket	4	Kasubag Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4.05.4.05.0 2.09.01.018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	-	Laporan	12	Kasubag SIAK	4	0 1	04	2 0 3	0 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	-	Laporan	12	Kasubag Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
<b>4.05.4.05.02.09.38</b>	<b>Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah</b>	<b>Persentase penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Komponen Penataan dan Penguatan Organisasi) diukur sesuai dengan Permenpan 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah</b>	%	<b>100</b>	<b>Kabag ORPAD</b>	<b>4</b>	<b>0 1</b>	<b>04</b>	<b>2 0 3</b>	<b>0 8</b>	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	-	Laporan	12	Kasubag Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi



4.05.4.05.0 2.09.38.006	Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Evaluasi Kelembagaan	-	%	100	Kasubag Kelembagaan dan Anforjab	4	0	04	2	0	2	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses di Lingkup Kota Bandung	Jumlah Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses dibagi 60 dikali 100 %	%	100	Kabag Organisasi
4.05.4.05.0 2.09.38.010	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Analisis Jabatan	-	Dokumen	12	Kasubag Kelembagaan dan Anforjab	4	0	04	2	0	2	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen penataan dan evaluasi perangkat daerah	-	Dokumen	1	Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Analisis Beban Kerja	-	Dokumen	12	Kasubag Kelembagaan dan Anforjab								Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Analisis Jabatan	-	PD	10	Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4.05.4.05.0 2.09.38.003	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen Penyempurnaan Road Map Reformasi Birokrasi dan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung	-	Dokumen	1	Kasubag Kelembagaan dan Anforjab								Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Analisis Beban Kerja	-	PD	10	Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4.05.4.05.0 2.09.38.00	Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Sinovik	-	%	100	Kasubag Ketatalaksanaan								Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Evaluasi Jabatan	-	PD	31	Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan



		Persentase Perangkat Daerah yang lengkap Standar Operasional Prosedur	-	%	100	Kasubag Ketatalaksanaan							Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Standar Kompetensi Jabatan	-	PD	10	Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi Standar Pelayanan Publik	-	%	100	Kasubag Ketatalaksanaan	4	01	04	202	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen Standar Pelayanan Publik	-	Dokumen	3	Kasubag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
4.05.4.05.02.09.38.007	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah	Jumlah Raperwal Pedoman Ketatalaksanaan	-	Raperwal	3	Kasubag Ketatalaksanaan							Dokumen Penataan Ketatalaksanaan	-	Dokumen	4	Kasubag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
		Jumlah Rakepwal Pedoman Ketatalaksanaan	-	Rakepwal	5	Kasubag Ketatalaksanaan	4	01	04	202	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen pelaporan Kota dan Perangkat Daerah tepat waktu	-	Dokumen	3	Kasubag Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi



4.05.4.05.02.09.39	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (Komponen Penataan dan Penguatan Organisasi) pada Skala 6	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung diukur sesuai dengan Permenpan No. 15/2012 tentang Juklak Evaluasi AKIP serta perubahannya dan Perwal Kota Bandung ttg Juklak Evaluasi AKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Nilai	13,50	Kabag ORPAD						Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	-	Predikat	A	Kasubag Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4.05.4.05.02.09.39.011	Penyusunan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU perangkat daerah yang di reuiu	-	%	100	Kasubag SIAK						Jumlah Dokumen Kebijakan Manajemen Reformasi Birokrasi yang diterapkan Perangkat Daerah dengan kriteria baik	-	Dokumen	2	Kasubag Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4.05.4.05.02.09.39.002	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan PK Perubahan	Jumlah Dokumen PK Kota dan PK Perubahan Kota tepat waktu	-	Dokumen	2	Kasubag SIAK										
		Jumlah Dokumen PK Setda dan PK Perubahan Setda tepat waktu	-	Dokumen	2	Kasubag SIAK										



		Jumlah dokumen Cascading PK Eselon 3 dan 4 Setda	-	Dokumen	1	Kasubag SIAK											
		Jumlah dokumen IKI Setda	-	Dokumen	1	Kasubag SIAK											
		Jumlah dokumen Rencana Aksi atas PK Setda	-	Dokumen	1	Kasubag SIAK											
4.05.4.05.0 2.09.39.007	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulanan dan Tahunan	Jumlah Dokumen LKIP Kota tepat waktu	-	Dokumen	1	Kasubag SIAK											
		Jumlah Dokumen LKIP Triwulan dan Tahunan Setda tepat waktu	-	Dokumen	4	Kasubag SIAK											
		Jumlah Aplikasi SAKIP terbangun/terpelihara/beroperasi	-	Aplikasi	2	Kasubag SIAK											
							4	0	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan</b>		%	<b>100</b>	<b>Sekretaris Daerah</b>
							4	0	01	20	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD		Dokumen	3	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2021*  
**Sekretariat Daerah Kota Bandung**  
*Renstra Periode Tahun 2018-2023*

							4	01	01	201	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Renstra dan Renja SKPD		Dokumen	2	Kepala Sub Bagian Perencanaan
							4	01	01	201	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD SKPD		Dokumen	1	Kepala Sub Bagian Perencanaan
							4	01	01	202		Administrasi Keuangan	Prosentase Layanan Administrasi Keuangan SKPD		%	100	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
							4	01	01	202	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tanggapan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti		%	100	Kepala Sub Bagian Keuangan
							4	01	01	202	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan		Laporan	4	Kepala Sub Bagian Keuangan
							4	01	01	202	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan SKPD		Laporan	13	Kepala Sub Bagian Keuangan



							4	0	01	20	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran SKPD		Laporan	1	Kepala Sub Bagian Keuangan
							4	0	01	20	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen	1	Kepala Sub Bagian Keuangan
4.05.4.05.0 2.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>		%	100	<b>Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian</b>	4	0	01	20	03	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>		%	100	<b>Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian</b>
4.05.4.05.0 2.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon Protokoler		Bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	0	01	20	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon tiap bulannya		orang/Bulan	48	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorairum Tenaga Administrasi Keuangan		bulan	48	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	0	01	20	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorairum Tenaga Administrasi Keuangan		bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Unit	20	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	0	01	20	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Unit	20	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		Bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	0	01	20	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		Bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian



4.05.4.05.0 2.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Paket	3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	01	01	203	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Paket	3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/Penerangan kantor		Jenis	10	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	01	01	203	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/Penerangan kantor		Jenis	10	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor		Unit	16	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	01	01	203	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor		Unit	16	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		jenis	8	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	01	01	203	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		jenis	8	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan		bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	01	01	203	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan		bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman :	Makanan dan Minuman yang tersedia		bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	01	01	203	17	Penyediaan Makanan dan Minuman :	Makanan dan Minuman yang tersedia		bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah :	Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi		bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	01	01	203	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah :	Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi		bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian



4.05.4.05.0 2.03	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkat		%	100	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	4	01	01	204		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkat		%	100	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.03.001	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Mesin Absensi Pegawai yang tersedia		Unit	6	Kepala Sub Bag Kepegawaian	4	01	01	204	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Mesin Absensi Pegawai yang tersedia		Unit	6	Kepala Sub Bag Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kelengkapan dan keseragaman pakaian Dinas pegawai		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawaian	4	01	01	204	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kelengkapan dan keseragaman pakaian Dinas pegawai		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.03.004	Pengadaan Pakaian Korpri	Keseragaman pakaian Korpri		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawaian	4	01	01	204	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Keseragaman pakaian Korpri		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.03.005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Keseragaman pakaian hari-hari tertentu pegawai		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawaian	4	01	01	204	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Keseragaman pakaian hari-hari tertentu pegawai		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	10	Kepala Sub Bag Kepegawaian	4	01	01	204	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	10	Kepala Sub Bag Kepegawaian
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Cakupan Layanan Adminitrasi Umum		%	30	Sekretaris Daerah Kota Bandung	4	01	04			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Cakupan Layanan Adminitrasi Umum		%	30	Sekretaris Daerah Kota Bandung



	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD		Dokumen	17	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	4	01	04	204		Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD		Dokumen	17	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
	Pengelolaan Perencanaan	Jumlah Dokumen RKA dan RKAP SKPD		Dokumen	2	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran	4	01	04	204	01	Pengelolaan Perencanaan	Jumlah Dokumen RKA dan RKAP SKPD		Dokumen	2	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
	Pengelolaan Keuangan	Jumlah DPA dan DPPA SKPD		Dokumen	2	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	01	04	204	02	Pengelolaan Keuangan	Jumlah DPA dan DPPA SKPD		Dokumen	2	Kepala Sub Bagian Keuangan
	Penatausahaan Pelaporan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan SKPD)		Laporan	13	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	01	04	204	03	Penatausahaan Pelaporan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan SKPD)		Laporan	13	Kepala Sub Bagian Keuangan
4.05.4.05.02.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>		%	100	<b>Sekretaris Daerah</b>	4	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan</b>		%	100	<b>Sekretaris Daerah</b>
	Administrasi Keuangan	Prosentase Layanan Administrasi Keuangan SKPD		%	100	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan	4	01	01	202		Administrasi Keuangan	Prosentase Layanan Administrasi Keuangan SKPD		%	100	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan



						Kepegaw aian												Kepegawa ian
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN		bulan	14	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	0	01	20	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkan nya Gaji dan Tunjangan ASN		bulan	14		Kepala Sub Bagian Keuangan
	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>		%	<b>100</b>	<b>Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>		%	<b>100</b>		<b>Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian</b>
4.05.4.05.0 2.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon tiap bulannya		Bulan	12	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	0	01	20	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon tiap bulannya		Bulan	12		
4.05.4.05.0 2.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorairum Tenaga Administrasi Keuangan		bulan	12	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	0	01	20	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorairum Tenaga Administrasi Keuangan		bulan	12		
4.05.4.05.0 2.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor		bulan	12	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	0	01	20	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor		bulan	12		
4.05.4.05.0 2.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Unit	20	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	0	01	20	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Unit	20		
4.05.4.05.0 2.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		Bulan	12	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	0	01	20	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		Bulan	12		



4.05.4.05.0 2.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Paket	3	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	01	01	203	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Paket	3
4.05.4.05.0 2.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen komponen Listrik/Penerangan kantor		Jenis	10	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	01	01	203	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen komponen Listrik/Penerangan kantor		Jenis	10
4.05.4.05.0 2.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor		Unit	16	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	01	01	203	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor		Unit	16
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		jenis	8	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	01	01	203	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		jenis	8
4.05.4.05.0 2.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang undangan		bulan	12	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	01	01	203	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang undangan		bulan	12
4.05.4.05.0 2.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman :	Makanan dan Minuman yang tersedia		bulan	12	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	01	01	203	17	Penyediaan Makanan dan Minuman :	Makanan dan Minuman yang tersedia		bulan	12
4.05.4.05.0 2.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah :	Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi		bulan	12	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	01	01	203	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah :	Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi		bulan	12



4.05.4.05.0 2.03	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkat		%	100	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	4	01	01	204		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkat		%	100	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kelengkapan dan keseragaman pakaian Pimpinan dan Pegawai Sekretariat Daerah		Tahun	1	Kepala Sub Bag Kepegawaian	4	01	01	204	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kelengkapan dan keseragaman pakaian Dinas pegawai		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.03.004	Pengadaan Pakaian Korpri	Keseragaman pakaian Korpri		Tahun	1	Kepala Sub Bag Kepegawaian	4	01	01	204	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Keseragaman pakaian Korpri		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawaian
4.05.4.05.0 2.03.005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Keseragaman pakaian hari-hari tertentu pegawai		Tahun	1	Kepala Sub Bag Kepegawaian	4	01	01	204	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Keseragaman pakaian hari-hari tertentu pegawai		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawaian
<b>4.05.4.05.02.11.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Pelayanan dibagi jumlah Usulan Permintaan Pelayanan x 100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Kepala Bagian Umum</b>	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Pelayanan dibagi jumlah Usulan Permintaan Pelayanan x 100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Kepala Bagian Umum</b>
							<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>203</b>		<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum</b>	<b>-</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>Kepala Bagian Umum</b>



4.05.4.05.0 2.11.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan bulanan jasa komunikasi berupa koneksi Internet	-	Laporan	12	Kasubba g Pengelol aan Aset Setda	4	01	01	203	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi internet bulanan	-	Laporan	12	Kasubbag Pengelola an Aset Setda
4.05.4.05.0 2.11.01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan yang memerlukan perlengkapan dan peralatan kantor, sewa berupa tenda, meja, kursi dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah penyelenggaraan acara acara resmi Pemerintah	-	Kegiatan	60	Kasubba g Rumah Tangga Pimpina n	4	01	01	203	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan yang memerlukan perlengkapan dan peralatan kantor, sewa berupa tenda, meja, kursi dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah penyelenggaraan acara resmi Pemerintah	-	Kegiatan	60	Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan
4.05.4.05.0 2.11.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan bulanan jasa kebersihan kantor bulanan di lingkungan Balaikota dan rumah dinas	-	laporan	12	Kasubba g Kepegaw aian Setda	4	01	01	203	08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan bulanan jasa kebersihan kantor bulanan di lingkungan Balaikota dan rumah dinas	-	laporan	12	Kasubbag Kepegawa ian Setda



4.05.4.05.0 2.11.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	-	Paket	1	Kasubba g Pengelolan Aset Setda	4	0	01	20	09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah laporan jasa tenaga teknis perbaikan peralatan kerja dan bangunan	-	laporan	12	Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan
4.05.4.05.0 2.11.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	-	Paket	2	Kasubba g Pengelolan Aset Setda	4	0	01	20	10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	-	Paket	1	Kasubbag Pengelolan Aset Setda
4.05.4.05.0 2.11.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	-	Jenis	2	Kasubba g Pengelolan Aset Setda	4	0	01	20	11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	-	Paket	2	Kasubbag Pengelolan Aset Setda
4.05.4.05.0 2.11.01.16	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan cenderamata / souvenir Pemerintah Kota Bandung	-	Paket	6	Kasubba g Pengelolan Aset Setda	4	0	01	20	12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lokasi penataan instalasi listrik di lingkungan Balai kota dan rumah dinas	-	Lokasi	4	Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan
4.05.4.05.0 2.11.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan yang memerlukan penyediaan makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah penyelenggaraan acara acara resmi Pemerintah	-	Kegiatan	80	Kasubba g Rumah Tangga Pimpinan	4	0	01	20	13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan pemenuhan perlengkapan dan peralatan Kantor	-	Laporan	4	Kasubbag Pengelolan Aset Setda



4.05.4.05.0 2.11.01.18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	-	laporan	4	Kasubba g Kepegaw aian Setda	4	0 1	01	20 3	15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	-	Jenis	2	Kasubbag Pengelola an Aset Setda
4.05.4.05.0 2.11.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan bulanan Penyediaan Jasa Tenaga Perdukung Administrasi Perkantoran	-	laporan	12	Kasubba g Kepegaw aian Setda	4	0 1	01	20 3	16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan cenderamata / souvenir Pemkot Bdg	-	Paket	6	Kasubbag Pengelola an Aset Setda
4.05.4.05.0 2.11.01.20	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah laporan bulanan jasa keamanan kantor bulanan di lingkungan Balaikota dan rumah dinas	-	laporan	12	Kasubba g Kepegaw aian Setda	4	0 1	01	20 3	17	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan yang memerlukan penyediaan makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah penyelenggara an acara resmi Pemerintah	-	Kegiatan	80	Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan
<b>4.05.4.05. 02.11.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presentase Sarana Prasarana Kondisi Baik dan Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Saprasi dibagi Usulan Permintaan Saprasi x 100 %</b>	<b>%</b>	92	<b>Kepala Bagian Umum</b>	4	0 1	01	20 3	18	Sub Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	-	laporan	4	Kasubbag Kepegaw aian Setda



4.05.4.05.0 2.11.02.03	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah lokasi pembangunan di lingkungan Balaikota	-	lokasi	1	Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan	4	01	203	20	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	-	laporan	2	Kasubbag Pengelolaan Aset Setda
4.05.4.05.0 2.11.02.05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	-	laporan	2	Kasubbag Pengelolaan Aset Setda	4	01	203	23	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah laporan pemenuhan peralatan di rumah dinas	-	laporan	4	Kasubbag Pengelolaan Aset Setda
4.05.4.05.0 2.11.02.08	Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah laporan pemenuhan peralatan di rumah jabatan	-	laporan	4	Kasubbag Pengelolaan Aset Setda	4	01	203	35	Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah laporan pemenuhan mebeulair	-	laporan	4	Kasubbag Pengelolaan Aset Setda
4.05.4.05.0 2.11.02.10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah laporan pemenuhan kebutuhan mebeulair	-	laporan	2	Kasubbag Pengelolaan Aset Setda	4	01	203	27	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah laporan pemenuhan Pemeliharaan fisik di lingkungan di rumah dinas yang dipelihara	-	laporan	12	Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan
4.05.4.05.0 2.11.02.12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah laporan pemenuhan perlengkapan dan peralatan Kantor	-	laporan	4	Kasubbag Pengelolaan Aset Setda	4	01	203	28	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemenuhan Pemeliharaan fisik di lingkungan gedung kantor yang dipelihara	-	laporan	12	Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan



4.05.4.05.0 2.11.02.20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah laporan pemenuhan Pemeliharaan fisik di lingkungan di rumah dinas yang dipelihara	-	laporan	12	Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan	4	01	01	203	29	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah laporan pemenuhan Pemeliharaan mobil jabatan yang dipelihara	-	laporan	2	Kasubbag Pengelolaan Aset Setda
4.05.4.05.0 2.11.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemenuhan Pemeliharaan fisik di lingkungan gedung kantor yang dipelihara	-	laporan	12	Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan	4	01	01	203	30	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang terpelihara	-	laporan	12	Kasubbag Pengelolaan Aset Setda
4.05.4.05.0 2.11.02.23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah laporan pemenuhan Pemeliharaan mobil jabatan yang dipelihara	-	laporan	2	Kasubbag Pengelolaan Aset Setda	4	01	01	203	31	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah laporan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	-	laporan	2	Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan
4.05.4.05.0 2.11.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang terpelihara	-	laporan	2	Kasubbag Pengelolaan Aset Setda	4	01	01	203	32	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah laporan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	-	laporan	2	Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan
4.05.4.05.0 2.11.02.25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah laporan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	-	laporan	2	Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan	4	01	01	203	35	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah laporan pemenuhan mebeulair dipelihara	-	laporan	2	Kasubbag Pengelolaan Aset Setda



4.05.4.05.0 2.11.02.26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah laporan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	-	laporan	2	Kasubba g Rumah Tangga Pimpinan	4	01	01	204		Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Jumlah pegawai yang berpakaian rapi dan bersih dibagi Jumlah Pegawai x 100%	%	100	Kepala Bagian Umum
4.05.4.05.0 2.11.02.29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	Jumlah laporan pemenuhan pemeliharaan mebeulair	-	laporan	1	Kasubba g Pengelolan Aset Setda	4	01	01	204	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya di lingkup Sekretariat Daerah	-	stel	530	Kasubbag Kepegawaian Setda
4.05.4.05.0 2.11.02.46	Kegiatan Penataan Mekanikal Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas atau Jabatan	Jumlah tempat untuk dilakukan penataan instalasi listrik di lingkungan Balaikota, rumah dinas Wali Kota, rumah dinas Wakil Wali Kota dan rumah dinas sekda	-	lokasi	4	Kasubba g Rumah Tangga Pimpinan											
<b>4.05.4.05.02.11.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai</b>	<b>Jumlah pegawai yang berpakaian rapi dan bersih dibagi Jumlah Pegawai Setda x 100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Kepala Bagian Umum</b>											
4.05.4.05.0 2.11.03.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya di lingkup Sekretariat Daerah	-	stel	530	Kasubba g Kepegawaian Setda											



<b>4.05.4.05.02.11.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Aparatur Yang Mengikuti Pembinaan Kinerja</b>	<b>Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan kinerja dibagi Jumlah Pegawai Setda x 100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Kepala Bagian Umum</b>												
4.05.4.05.02.11.05.04	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan Kinerja	-	orang	180	Kasubbag Kepegawaian Setda												
<b>4.05.4.05.02.12.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Jumlah Bulanan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Kepala Bagian Hubungan Masyarakat</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>01</b>			<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Pengukuran IKM Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 Tentang IKM</b>	<b>Nilai</b>	<b>85</b>	<b>Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	
4.05.4.05.02.12.01.002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, Air dan Listrik	-	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Humas, Peliputan dan Dokumentasi	4	0	01	2	0	3	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bulanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.05.4.05.02.12.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jenis	2	Kepala Sub Bagian Humas, Peliputan dan Dokumentasi	4	0	01	20	02	3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, Air dan Listrik	-	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan



4.05.4.05.0 2.12.01.008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Humas, Peliputan dan Dokumentasi	4	01	01	2013	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jenis	3	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4.05.4.05.0 2.12.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Jenis	2	Kepala Sub Bagian Humas, Peliputan dan Dokumentasi	4	01	01	2013	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Bulan	4	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4.05.4.05.0 2.12.01.011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jasa Pengadaan Cetakan dan Penggandaan	-	Jenis	5	Kepala Sub Bagian Humas, Peliputan dan Dokumentasi	4	01	01	2013	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan peralatan kerja	-	Laporan	12	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4.05.4.05.0 2.12.01.014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	-	Jenis	3	Kepala Sub Bagian Humas, Peliputan dan Dokumentasi	4	01	01	2013	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Jenis	2	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4.05.4.05.0 2.12.01.015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	-	Jenis	3	Kepala Sub Bagian Humas, Peliputan dan Dokumentasi	4	01	01	2013	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jasa Pengadaan Cetakan dan Penggandaan	-	Jenis	3	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2021*  
**Sekretariat Daerah Kota Bandung**  
*Renstra Periode Tahun 2018-2023*

4.05.4.05.0 2.12.01.017	Kegiatan Penyediaan Makanann dan Minuman	Tersedianya kegiatan penyediaan makanan dan minuman	-	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Humas, Peliputan dan Dokumentasi	4	01	01	203	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	-	Jenis	2	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4.05.4.05.0 2.12.01.018	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Humas, Peliputan dan Dokumentasi	4	01	01	203	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	-	Jenis	3	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan
							4	01	01	203	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kegiatan penyediaan makanan dan minuman	-	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan
							4	01	01	203	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan



4.05.4.05.02.12.46	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Rasio berita baik dan rasio berita buruk	Jumlah Berita Baik Berbanding Dengan Berita Buruk	Rasio	71,40 : 28,60	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	4	01	04			Program Administrasi Umum	Terselesaikannya permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Jumlah masalah yang terselesaikan : jumlah masalah x 100% (penjelasan: permasalahan yang bersifat strategis membutuhkan kebijakan dan lintas sektoral)	%	100	Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian
4.05.4.05.02.12.46.01	Kegiatan Kemitraan Media dan Publikasi	Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan Bandung Menjawab	Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan Bandung Menjawab	Publikasi	220	Kepala Sub Bagian Kemitraan Media dan Publikasi	4	01	04	203		Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Citra Positif Pimpinan/ Pemerintah Kota Bandung di Masyarakat	-	Rasio	71,40 : 28,60	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.05.4.05.02.12.46.02	Kegiatan Data dan Informasi	Jumlah Media Grafis Infografis dan videografis yang disampaikan melalui media sosial kepada masyarakat	Jumlah Media Grafis Infografis dan videografis yang disampaikan melalui media sosial kepada masyarakat	Media Grafis	500	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	4	01	04	203	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan Pelayanan Protokoler Terhadap Pimpinan	-	%	100	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Keprotokolan
		Cakupan pelayanan sambutan tepat waktu	Cakupan pelayanan sambutan tepat waktu	%	100		4	01	04	203	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Publikasi Kegiatan Pimpinan/ Pemerintah Kota Bandung Yang Di Informasikan Melalui Media Cetak,	-	Publikasi	220	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Komunikasi Pimpinan



												Elektronik dan Online					
												Jumlah Media Grafis Infografis dan videografis yang disampaikan melalui media sosial kepada masyarakat	-	Mediagrafis	500		
												Cakupan Pelayanan Sambutan Tepat Waktu	-	%	100		
4.05.4.05.0 2.12.46.03	Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi	Jumlah press rilis sosialisasi kebijakan pemerintah	Jumlah press rilis sosialisasi kebijakan pemerintah	Press Rilis	800	Kepala Sub Bagian Humas, Peliputan dan Dokumentasi	4	01	04	203	03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Press Rilis Sosialisasi Kebijakan Pemerintah	-	Press Rilis	800	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Tabel 6. 3

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Berdasarkan KEPMEN Nomor 050-3708 Tahun 2020) Sekretariat Daerah Kota Bandung

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020												
PERMEN DAGRI 90 TAHUN 2019		NOMENKLATUR URUSAN KAB / KOTA				INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN (INDIKATOR KINERJA PROGRAM)	SATUAN	TARGET	PENANG GUNG JAWAB	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KAB / KOTA		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN (INDIKATOR KINERJA PROGRAM)	SATUAN	TARGET	PENANG GUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEJATA	SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					
4	1	0	2		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				Asisten Pemerint ahan dan Kesra	4	1	0	2		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				Asisten Pemerint ahan dan Kesra		
4	1	0	2	0 1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	Penetapan Status Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Daerah (sesuai permendagri 18/2020) :	Nilai	Tinggi	Kepala Bagian Tata Pemerint ahan	4	1	0	2	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	Penetapan Status Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Daerah (sesuai permendagri 18/2020) :	Nilai	Sangat Tinggi	Kepala Bagian Tata Pemerint ahan	
							1. 1.00 < 1.80 SangatRendah 2. 1.81 < 2.60 Rendah 3. 2.61 < 3.40 Sedang 4. 3.41 < 4.20 Tinggi 5. 4.21 < 5.00 Sangat Tinggi										1. 1.00 < 1.80 SangatRendah 2. 1.81 < 2.60 Rendah 3. 2.61 < 3.40 Sedang 4. 3.41 < 4.20 Tinggi 5. 4.21 < 5.00 Sangat Tinggi				



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2021*  
**Sekretariat Daerah Kota Bandung**  
*Renstra Periode Tahun 2018-2023*

4	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah SPM yang di evaluasi	Jumlah SPM yang di evaluasi	Urusan	6	Kasubag Administ rasi Pemerint ahan	4	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal	Laporan	1	Kasubag Administ rasi Pemerint ahan
4	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	Jumlah Kecamatan yang masuk Indeks Nilai Kategori Hijau dibandingkan Jumlah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dikalikan 100%	Persen	100	Kasubag Administ rasi Kewilaya han	4	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	Jumlah Kecamatan yang masuk Indeks Nilai Kategori Hijau dibandingkan Jumlah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dikalikan 100%	Persen	100	Kasubag Administ rasi Kewilaya han
4	1	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Jumlah Dokumen LPPD	Dokumen	1	Kasubag Otonomi Daerah	4	1	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Jumlah Dokumen LPPD	Dokumen	1	Kasubag Otonomi Daerah
4	1	0	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>(Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/ jumlah layanan administrasi seluruhnya) x 100%</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>(Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/ jumlah layanan administrasi seluruhnya) x 100%</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	



4	1	0	2		Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Ketatausahaan	Jumlah Laporan Ketatausahaan	Laporan	4	Kasubag Administrasi Pemerintahan	4	1	0	2		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	(jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai prosedur/Jumlah pelayanan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan) x 100	Persen	100	Kasubag Administrasi Pemerintahan
4	1	0	2	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhiya Penyediaan ATK	Terpenuhiya Penyediaan ATK	Kegiatan	4	Kasubag Administrasi Pemerintahan	4	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai prosedur/Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan) x 100	Persen	100	Kasubag Administrasi Pemerintahan
4	1	0	2	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kegiatan	4	Kasubag Administrasi Pemerintahan	4	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai prosedur	Laporan	4	Kasubag Administrasi Pemerintahan



4	1	0	2	1	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kegiatan	4	Kasubag Administ rasi Pemerint ahan	4	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Laporan	1	Kasubag Administ rasi Pemerint ahan
4	1	0	2	1	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya laporan penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya laporan penyediaan makanan dan minuman	Kegiatan	4	Kasubag Administ rasi Pemerint ahan	4	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penyediaan Makanan dan minuman	(Jumlah penyediaan Makanan dan minuman sesuai prosedur/Juml ah penyediaan Makanan dan minuman yang dilaksanakan) x 100	Persen	100	Kasubag Administ rasi Pemerint ahan
4	1	0	2	1	Rapat-Rapat Koodinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Kegiatan	4	Kasubag Administ rasi Pemerint ahan	4	1	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	(Jumlah Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang sesuai prosedur/Juml ah Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan)x 100	Persen	100	Kasubag Administ rasi Pemerint ahan



4	1	0	2	0	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan	4	Kasubag Administ rasi Pemerint ahan	4	1	0	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai prosedur/Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan) x 100	Persen	100	Kepala Bagian Tata Pemerint ahan	
											1	1	0	2							0
4	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya ruangan kantor yang bersih	Terciptanya ruangan kantor yang bersih	Kegiatan	4	Kasubag Administ rasi Pemerint ahan	4	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan setiap bulan dalam kurun waktu 1 tahun	Jasa/Bulan	2/12	Kasubag Administ rasi Pemerint ahan



4	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terawatnya peralatan kerja	Terawatnya peralatan kerja	Kegiatan	4	Kasubag Administ rasi Pemerintahan	4	1	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai prosedur/Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan) x 100	Persen	100	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		1	0	9																	
			3																		
											4	1	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor berupa alat kerja utama dan pendukung (PC, Laptop, Printer, Infocus, Scanner, AC, TV, CCTV, Genset, Mesin Air dll) (per bulan/per triwulan/per semester/per tahun sesuai dengan kebutuhan)	Laporan	1	Kasubag Administrasi Pemerintahan
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama	Nilai	80	Asisten Pemerintahan dan Kesra	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama	Nilai	80	Asisten Pemerintahan dan Kesra



4	1	1	203		Kegiatan Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Akumulasi persentase pencapaian kinerja setiap Kegiatan pada kegiatan Adum dikali 100%	%	100	Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	4	1	1	206		Administrasi Umum perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Akumulasi persentase pencapaian kinerja setiap Kegiatan pada kegiatan Adum dikali 100%	%	100	Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	
4	1	1	203	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan		Laporan	12	Kasubag Bina Kesra	4	1	1	206	1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat	
				9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat Kerja/Kantor di Lingkungan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan		unit	62	Kasubag Bina Kesra				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan tantang Pengadaan ATK					Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat	
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kegiatan penyediaan alat tulis kantor		Laporan	1	Kasubag Bina Kesra				4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan tantang kegiatan					Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat	
				11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan		kegiatan	2	Kasubag Bina Kesra				5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Laporan tantang kegiatan Makan minum rapat dan makan minum tamu						Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat



				1 4	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Laporan	12	Kasubag Bina Kesra					9	Penyediaan Barng Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan cetakan dan pengadaan							Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat
				1 5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga		kegiatan	1	Kasubag Bina Kesra	4	1	1	2 0 8	3	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	laporan							Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat
				1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan		jenis	36	Kasubag Bina Kesra					4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan kegiatan							Kasubag Bina Kesejahteraan Rakyat
				1 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan minuman di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan		Laporan	72	Kasubag Bina Kesra						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah perbaikan peralatan kantor							
				1 8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Laporan	12	Kasubag Bina Kesra						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan kegiatan							
				1 9	Penyediaan komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kegiatan Penyediaan komponen Instalasi / Penerangan		laporan	1	Kasubag Bina Kesra														



4	1	1	2 0 4		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bangunan Kantor Meningkatnya Disiplin Aparatur	Akumulasi persentase pencapaian kinerja setiap Kegiatan dikali 100%	%	100	Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan											
4	1	1	2 0 4	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah kegiatan pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		laporan	1	Kasubag Bina Kesra											
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESRA	Persentase kerjasama aktif yang diimplementasikan	Jumlah Permasalahan Selesai dibagi Permasalahan dikali 100%	%	100	Asisten Pemerintahan dan Kesra	4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESRA	Persentase kerjasama aktif yang diimplementasikan	Jumlah Permasalahan Selesai dibagi Permasalahan dikali 100%	%	100	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
4	1	2	2 0 2		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang diselesaikan	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial Keagamaan	%	100	Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	4	1	2	2 0 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang diselesaikan	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial Keagamaan	%	100	Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	
				1	Fasilitasi <u>Pengelolaan Bina Mental Spiritual</u>	Jumlah Laporan kegiatan fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	kegiatan	5	Kasubag Bina Sosial Keagamaan	4	1	2	2 0 2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan fasilitasi Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	laporan	5	Kasubag Bina Sosial Keagamaan	



				2	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Permasalahan Selesai dibagi Permasalahan dikali 100%	%	50	Kasubag Bina Kesra					2	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan sosial	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Kesejahteraan Sosial		%	50	Kasubag Bina Sosial Kemasyarakatan
				3	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan sosial	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Kesejahteraan Sosial	Jumlah Permasalahan Selesai dibagi Permasalahan dikali 100%	%	100	Kasubag Bina Sosial Kemasyarakatan						Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Kesejahteraan Masyarakat		%	100	Kasubag Bina kesejahteraan Rakyat
4	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Bagian Hukum</b>	<b>Pengukuran IKM Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 Tentang IKM</b>	<b>angka</b>	<b>83</b>	Asisten Pemerintahan dan Kesra	4	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Bagian Hukum</b>	<b>Pengukuran IKM Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 Tentang IKM</b>	<b>angka</b>	<b>83</b>	Asisten Pemerintahan dan Kesra
4	1	1	203		Kegiatan Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Bulanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	Kabag Hukum	4	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Akumulasi persentase pencapaian kinerja setiap Kegiatan dikali 100%	%	100	Kabag Hukum
4	1	1	203	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Laporan	1		4	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat		Laporan	1	



4	1	1	203	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Laporan	1					208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan	1	
											4	1	1	201		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Akumulasi persentase pencapaian kinerja setiap Kegiatan dikali 100%</b>	%	<b>100</b>	
				9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Laporan Peralatan Kerja yang diperbaiki	-	Laporan	1			1	1	209	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin lainnya		Laporan	1	
											4	1	1	206		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Akumulasi persentase pencapaian kinerja setiap Kegiatan dikali 100%</b>	%	<b>100</b>	
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan Penyediaan ATK	-	Laporan	1		4	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Laporan	1	
				11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pengadaan Cetak dan Pengadaan	-	Laporan	1		4	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Barang Cetak dan Penggandaan		Laporan	1	



				1 4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Laporan	1		4	1	1	2 0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Laporan	1	
				1 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	Laporan	1		4	1	1	2 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Laporan	1	
				1 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	-	Laporan	1		4	1	1	2 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Laporan	1	
				1 8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	-	Laporan	1		4	1	1	2 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1	
4	1	1	2 0 4		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	<b>Akumulasi persentase pencapaian kinerja setiap Kegiatan dikali 100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		4	1	1	2 0 5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Akumulasi persentase pencapaian kinerja setiap Kegiatan dikali 100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	
4	1	1	2 0 4	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		Laporan	1		4	1	1	2 0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		Laporan	1	



4	1	3		Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Presentasi Kerjasama aktif yang diimplemen tasikan		%	100		4	1	2		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentasi Kerjasama aktif yang diimplemen tasikan		%	100	
4	1	3	201	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentuk an produk hukum daerah	Akumulasi persentase pencapaian kinerja setiap Kegiatan dikali 100%	%	100	Kabag Hukum	4	1	2	203	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentuk an produk hukum daerah	Akumulasi persentase pencapaian kinerja setiap Kegiatan dikali 100%	%	100	Kabag Hukum
			1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen (Ranperda, Ranperwal dan Rankepwal)	-	Dokumen	4		4	1	2	203	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen (Ranperda, Ranperwal dan Rankepwal)		Dokumen	4	
			2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Bantuan Hukum	-	Dokumen	4		4	1	2	203	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Bantuan Hukum		Dokumen	4	
			3	Pendokumentasia n Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Pendokume ntasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	Dokumen	4		4	1	2	203	Pendokumentasia n Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Pendokumen tasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Dokumen	4	
x	x	x	1	Program Penunjang Urusan	Cakupan Administras i		Dokume n	4		x	x	1		Program Penunjang Urusan					



Pemerintah Daerah										Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
x	x	1	3		Kegiatan Administrasi Umum	Cakupan Adminisrasi Umum		Dokumen	4	Kepala Bagian Kerja Sama	x	x	1	2	0	6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		Dokumen	4	Kepala Bagian Kerja Sama
x	x	1	3	1	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Barang Cetakan dan Penggandaan		Laporan	4	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan Evaluasi Kerja Sama	x	x	1	2	0	6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan		Laporan	4	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan Evaluasi Kerja Sama
x	x	1	3	1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Laporan	4	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan Evaluasi Kerja Sama	x	x	1	2	0	6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan		Laporan	4	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan Evaluasi Kerja Sama
x	x	1	3	1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Laporan	4	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan Evaluasi Kerja Sama	x	x	1	2	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Laporan		Laporan	4	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan Evaluasi Kerja Sama



x	x	1	3	17	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman		Laporan	4	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan Evaluasi Kerja Sama	x	x	1	2 . 0 6	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan		Laporan	4	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan Evaluasi Kerja Sama
x	x	1	3	18	Sub Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Laporan	4	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan Evaluasi Kerja Sama	x	x	1	2 . 0 6	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan		Laporan	4	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan Evaluasi Kerja Sama
											x	x	1	2 . 0 8		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>		<b>Dokume n</b>	<b>4</b>	<b>Kepala Bagian Kerja Sama</b>
x	x	1	3	3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor		Laporan	4	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan Evaluasi Kerja Sama	x	x	1	2 . 0 8	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan		Laporan	4	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan Evaluasi Kerja Sama
x	x	1	3	10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor		Laporan	4	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan	x	x	1	2 . 0 8	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan		Laporan	4	Kasubag Administ rasi, Dokumen tasi dan



										Evaluasi Kerja Sama											Evaluasi Kerja Sama
											x	x	1	2		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen		Dokumen	4	Kepala Bagian Kerja Sama
x	x	1	3	9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Laporan	4	Kasubag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama	x	x	1	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan		Laporan	4	Kasubag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerja Sama
4	0	0			<b>PROGRAM Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>					<b>Asisten Pemerintahan dan Kesra</b>						<b>PROGRAM Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>					<b>Asisten Pemerintahan dan Kesra</b>
4	0	0	2		<b>KEGIATAN Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Presentase Implementasi Kerja Sama Lingkup Dalam dan Luar Negeri</b>	<b>Presentase KSDN dijumlah Presentase KSLN, dibagi 2</b>	%	51,75	<b>Kabag Kerja Sama</b>						<b>KEGIATAN Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Presentase Implementasi Kerja Sama Lingkup Dalam dan Luar Negeri</b>	<b>Presentase KSDN dijumlah Presentase KSLN, dibagi 2</b>	%	100	<b>Kabag Kerja Sama</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja	Jumlah Laporan Fasilitasi		Laporan	4	Kasubag Kerja Sama						Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja	Jumlah Laporan Fasilitasi		Laporan	4	Kasubag Kerja Sama



			0 4		Sama Dalam Negeri	Kerja Sama Dalam Negeri				Dalam Negeri					Sama Dalam Negeri	Kerja sama daerah dengan daerah				Dalam Negeri
																Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja sama daerah dengan pihak ketiga (badan hukum, universitas)				
																Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja sama sinergitas pusat				
4	0 1	0 2	2 0 4	0 2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Laporan	4	Kasubag Kerja Sama Luar Negeri					Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri		Laporan	4	Kasubag Kerja Sama Luar Negeri
																Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama daerah dengan				







			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan ATK		Laporan	1		4	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	(Jumlah penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan sesuai prosedur/Jumlah penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan yang dilaksanakan) x 100	Persen	100	
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan		Jenis	3		4	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	(Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang sesuai prosedur/Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan)x 100	Persen	100	
			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga		Jenis	2		4	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai prosedur/Jumlah penyediaan Peralatan dan	Persen	100	











4	0	0	2		Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum		Laporan	1	Kabag Adbang	4	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum		Laporan	1	Kabag Adbang
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan Penyediaan ATK		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	4	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan Dan Minuman		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	4	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan bahan logistik kantor		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Laporan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	4	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Cetak Dan Penggandaan		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	4	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	4	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan



											4	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan	1	Kabag Adbang	
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan												
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan pelayanan umum kantor		Laporan	1	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	
											4	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan		Laporan	1	Kabag Adbang	





						infrastrukturu									infrastrukturu						
						<b>Persentase pelaporan rencana dan realisasi penyerapan anggaran</b>		<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Kabag Adbang</b>						<b>Persentase pelaporan rencana dan realisasi penyerapan anggaran</b>		<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Kabag Adbang</b>	
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase penyusunan dan evaluasi program dan desain pembangunan		<b>%</b>	<b>100</b>	Kasubag penyusunan program	4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase penyusunan dan evaluasi program dan desain pembangunan		<b>%</b>	<b>100</b>	Kasubag penyusunan program
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase pelaksanaan pembangunan yang terevaluasi dan terkendali		<b>%</b>	<b>100</b>	Kasubag pengendalian program	4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase pelaksanaan pembangunan yang terevaluasi dan terkendali		<b>%</b>	<b>100</b>	Kasubag pengendalian program
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase OPD yang melaporkan rencana dan realisasi penyerapan anggaran		<b>%</b>	<b>100</b>	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase OPD yang melaporkan rencana dan realisasi penyerapan anggaran		<b>%</b>	<b>100</b>	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan



4	0	0			Program Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran : jumlah layanan x 100%	%	100	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	(Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/ jumlah layanan administrasi seluruhnya) x 100%	Nilai	83	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	
4	0	1	#	#	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi perkantoran	-	Laporan	1	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	4	1	1	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai prosedur/ Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan) x 100	%	100	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4	0	0	#	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen jasa surat menyurat	-	Dokumen	1	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	4	1	1	2	0	8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan setiap bulan dalam kurun waktu 1 tahun	Jasa	1	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan



																					Barang/Jasa	
4	011	011	#	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah Dokumen jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Dokumen	1	<b>Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa</b>	4	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan atau Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan atau Listrik yang dilaksanakan setiap bulan dalam kurun waktu 1 tahun	Jasa/Bulan	1/12	12	
4	011	011	#	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah dokumen Jasa Kebersihan Kantor	-	Dokumen	1	<b>Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa</b>	4	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan setiap bulan dalam kurun waktu 1 tahun	Jasa	1	1	
4	011	011	#	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Dokumen jasa perbaikan peralatan kerja	-	Dokumen	1	<b>Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa</b>	4	1	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan setiap bulan dalam kurun waktu 1 tahun	Jasa	2	2	





4	0	0	#	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen jenis komponen instalasi listrik	-	Dokumen	1	<b>Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa</b>	4	1	1	2	1	0	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor sesuai prosedur/Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan/ )x 100	Persen	100	
4	0	0	#	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Dokumen	1	<b>Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa</b>	4	1	1	2	2	0	6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai prosedur/Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan )x 100	Persen	100	



4	0	0	#	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dokumen jenis peralatan rumah tangga	-	Dokumen	1	<b>Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa</b>	4	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai prosedur	Laporan	4		
4	0	0	#	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen jenis bahan bacaan	-	Dokumen	1	<b>Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa</b>	4	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang tersedia	Jumlah Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang tersedia dalam waktu 12 bulan	Jasa/Bulan	2/12	24	
4	0	0	#	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen jenis bahan logistik kantor	-	Dokumen	1	<b>Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa</b>	4	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai prosedur/Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan) x 100	Persen	100		
4	0	0	#	1	penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Dokumen penyediaan makanan dan minuman	-	Dokumen	1	<b>Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa</b>												



4	0	0	#	1	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Dokumen kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Dokumen	1	<b>Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa</b>	4	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	(Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang sesuai prosedur/Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan)x 100	Persen	100	<b>Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa</b>
4	0	0			<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan di bidang ekonomi yang diselesaikan</b>	jumlah dokumen perencanaan perekonomian dan pembangunan yang terselesaikan : jumlah dokumen x 100			<b>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</b>	4	1	3			<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Persentase DokumenKajian Bidang Perekonomian ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan</b>	<b>Jumlah Permasalahan Selesai dibagi Permasalahan dikali 100%</b>	%	<b>100</b>	<b>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</b>
4	0	0	#	#	<b>Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>Persentase Perencanaan Pembangunan Dalam Pengadaan Barang/Jasa</b>	jumlah dokumen perencanaan pengadaan yang terselesaikan : jumlah dokumen x 100			<b>Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa</b>	4	1	3	2		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase Perencanaan Pembangunan Dalam Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>jumlah dokumen perencanaan pengadaan yang terselesaikan : jumlah dokumen x 100</b>	%	<b>100</b>	<b>Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa</b>



4	0	0	#	0	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah paket (segi jumlah dan nilai) yang diselesaikan dengan perencanaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)		Paket Tender	200	<b>Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan</b>				1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah paket (segi jumlah dan nilai) yang diselesaikan dengan perencanaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)		Paket Tender	200	<b>Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan</b>
4	0	0	#	0	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Paket Tender dan Pengadaan Langsung yang di fasilitasi SPSE		Paket Tender dan Pengadaan Langsung	5200	<b>Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik</b>				2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Paket Tender dan Pengadaan Langsung yang di fasilitasi SPSE		Paket Tender dan Pengadaan Langsung	5200	<b>Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik</b>
4	0	0	#	0	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa		Dokumen	4	<b>Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa</b>				3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan	Jumlah dokumen pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa		Dokumen	4	<b>Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa</b>
4	0	0			<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>Terselesaiannya permasalahan</b>	<b>Jumlah masalah yang terselesaikan :</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Asisten Administ</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	<b>Cakupan pelayanan</b>	<b>(Jumlah layanan administrasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Asisten Administ</b>



						an penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	jumlah masalah x 100% (penjelasan: permasalahan yang bersifat strategis membutuhkan kebijakan dan lintas sektoral)			rasi Umum					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	administrasi perkantoran	yang dilaksanakan/ jumlah layanan administrasi seluruhnya) x 100%			rasi Umum
4	01	01	203		Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bulanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	Kabag Organisasi	4	01	1	206	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai prosedur/Jumlah pelayanan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan) x 100 %	%	100	Kabag Organisasi
4	01	04	203	01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Laporan	12	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4	01	1	206	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai prosedur/Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	%	100	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi





*Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2021  
Sekretariat Daerah Kota Bandung  
Renstra Periode Tahun 2018-2023*

4	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	-	Laporan	12	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4	0	1	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Jumlah Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia dalam waktu 12 bulan	Bulan	12	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Sekretariat Daerah	-	Paket	4	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4	0	1	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	(Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang sesuai prosedur/Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan) x 100 %	%	100	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4	0	0	2	0	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	-	Laporan	12	Kasubag Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4	0	1	2	0	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai prosedur/Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	Kabag Organisasi



4	01408	003	208	0	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	-	Laporan	12	Kasubag Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	40120	01	1	2	0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan setiap bulan dalam kurun waktu 1 tahun	Jasa	1	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4	01402	002	202	0	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses di Lingkup Kota Bandung	-	%	100	Kabag Organisasi	40120	01	1	2	0	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	(Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai prosedur/Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan) x 100 %	%	100	Kabag Organisasi
4	01402	002	202	0	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen penataan dan evaluasi perangkat daerah	-	Dokumen	1	Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan	40120	01	1	2	0	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	Unit	75	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi
						Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun	-	PD	10	Kasubag Kelembagaan dan	40120	01	1	2	0	09	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Perangkat	Jumlah penataan organisasi yang tepat	%	100	Kabag Organisasi





4	0	0	2	0	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen Standar Pelayanan Publik	-	Dokumen	3	Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana							Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Evaluasi Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Evaluasi Jabatan sesuai ketentuan yang berlaku	PD	31	Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
						Dokumen Penataan Ketatalaksanaan	-	Dokumen	4	Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana							Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Standar Kompetensi Jabatan sesuai ketentuan yang berlaku	PD	10	Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4	0	0	2	0	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen pelaporan Kota dan Perangkat Daerah tepat waktu	-	Dokumen	3	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4	0	1	2	0	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Standar Pelayanan Publik	Dokumen	1	Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana
						Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	-	Predikat	A	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi							Jumlah Dokumen Penataan Ketatalaksanaan	Jumlah dokumen penataan ketatalaksanaan	Dokumen	8	Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana
						Jumlah Dokumen Kebijakan Manajemen Reformasi Birokrasi yang	-	Dokumen	2	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4	0	1	2	0	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Manajemen Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Manajemen Reformasi Birokrasi yang	Dokumen	2	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi







4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan yang memerlukan perlengkap an dan peralatan kantor, sewa berupa tenda, meja, kursi dll untuk memfasilitas i kegiatan pemerintah daerah penyelenga raan acara resmi Pemerintah	-	Kegiatan	60	Kasubba g Rumah Tangga Pimpinan	4	0	0	2	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan bulanan jasa kebersihan kantor bulanan di lingkungan Balaikota dan rumah dinas	-	laporan	12	Kasubba g Rumah Tangga Pimpinan	4	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah lokasi penataan instalasi listrik di lingkungan Gedung Kantor dan rumah dinas		Lokasi	4	Ka. Sub. Bag. Rumah Tangga Pimpinan
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah laporan jasa tenaga teknisi perbaikan peralatan kerja dan bangunan	-	laporan	12	Kasubba g Rumah Tangga Pimpinan	4	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan pemenuhan perlengkap an dan peralatan Kantor		Laporan	4	Ka. Sub. Bag. Pengelola an Aset



4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	-	Paket	1	Kasubba g TU Pim & Staf Ahli	4	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan pemenuhan peralatan di rumah dinas	Laporan	4	Ka. Sub. Bag. Pengelola an Aset	
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	-	Paket	2	Kasubba g TU Pim & Staf Ahli	4	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Laporan	6	Ka. Sub. Bag. Pengelola an Aset	
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lokasi penataan instalasi listrik di lingkungan Balaikota dan rumah dinas	-	Lokasi	4	Kasubba g Rumah Tangga Pimpinan	4	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	-	Paket	2	Ka. Sub. Bag. Pengelola an Aset
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan pemenuhan perlengkapan dan peralatan Kantor	-	Laporan	4	Kasubba g Perlengkapan	4	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	-	Jenis	2	Ka. Sub. Bag. Pengelola an Aset
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	-	Jenis	2	Kasubba g TU Pim & Staf Ahli	4	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Laporan	4	Ka. Sub. Bag. Pengelola an Aset	



4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan cenderamata / souvenir Pemkot Bdg	-	Paket	6		4	0	0	2		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan yang memerlukan penyediaan makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah penyelenggaraan acara resmi Pemerintah	-	Kegiatan	80	Kasubba g Rumah Tangga Pimpinan	4	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	-	Laporan	2	Ka. Sub. Bag. Pengelola an Aset
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	-	laporan	4	Kasubba g TU Pim & Staf Ahli	4	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah laporan pemenuhan mebeulair	-	Laporan	4	Ka. Sub. Bag. Pengelola an Aset
4	0	0	2	2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	-	laporan	2	Kasubba g Perlengkapan	4	0	0	2		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum</b>	-	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>Kepala Bagian Umum</b>



4	0	0	2	2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah laporan pemenuhan peralatan di rumah dinas	-	laporan	4	Kasubba g Pengelola an Aset Setda	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi internet bulanan	-	Laporan	12	Ka. Sub. Bag. Pengelola an Aset
4	0	0	2	3	Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah laporan pemenuhan mebeulair	-	laporan	4	Kasubba g Perlengka pan	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan yang memerlukan perlengkapan dan peralatan kantor, sewa berupa tenda, meja, kursi dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah penyelenggaraan acara resmi Pemerintah	-	Kegiatan	60	Ka. Sub. Bag. Rumah Tangga Pimpinan
4	0	0	2	2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah laporan pemenuhan Pemeliharaan fisik di lingkungan di rumah dinas yang dipelihara	-	laporan	12	Kasubba g Rumah Tangga Pimpinan	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan jasa kebersihan kantor bulanan di lingkungan Balaikota dan rumah dinas	-	Laporan	12	Ka. Sub. Bag. Kepegawaian



4	0	0	2	2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemenuhan Pemeliharaan fisik di lingkungan gedung kantor yang dipelihara	-	laporan	12	Kasubba g Rumah Tangga Pimpinan	4	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
4	0	0	2	2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah laporan pemenuhan Pemeliharaan mobil jabatan yang dipelihara	-	laporan	2	Kasubba g Perlengkapan	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang terpelihara	-	Laporan	12	Ka. Sub. Bag. Pengelolaan Aset
4	0	0	2	3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang terpelihara	-	laporan	12	Kasubba g Perlengkapan	4	0	0	2	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah laporan pemenuhan mebeulair dipelihara	-	Laporan	2	Ka. Sub. Bag. Pengelolaan Aset
4	0	0	2	3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah laporan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	-	laporan	2	Kasubba g Rumah Tangga Pimpinan	4	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	-	Laporan	2	Ka. Sub. Bag. Rumah Tangga Pimpinan
4	0	0	2	3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah laporan perlengkapan gedung	-	laporan	2	Kasubba g Rumah Tangga Pimpinan	4	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah laporan pemenuhan Pemeliharaan	-	Laporan	12	Ka. Sub. Bag. Rumah



						kantor yang dipelihara									atau Bangunan Lainnya	n fisik di lingkungan gedung kantor yang dipelihara				Tangga Pimpinan	
4	01	01	203	35	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah laporan pemenuhan mebeulair dipelihara	-	laporan	2	Kasubba g Perlengka pan	4	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemenuhan Pemeliharaan n fisik di lingkungan di rumah dinas yang dipelihara	-	Laporan	12	Ka. Sub. Bag. Rumah Tangga Pimpinan
					Sub Kegiatan Fasilitas Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian			Dokumen	1	Kasubba g TU Pim & Staf Ahli	4	01	01	212		<b>Fasilitas Kerumahtangga an Sekretariat Daerah</b>					Ka. Sub. Bag. Rumah Tangga Pimpinan
					Sub Kegiatan Penataan Dan Pengendalian Administrasi Aset Milik Pemerintah Kota Bandung	Jumlah Dokumen Pelaporan Penataan dan Pengendalia n Aset milik Pemkot Bdg	-	Dokumen	1	Kasubba g Perlengka pan	4	01	01	212	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang memerlukan penyediaan makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah penyelenggara an acara	-	Kegiatan	80	Ka. Sub. Bag. Rumah Tangga Pimpinan







4	0	0	2	0	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran SKPD		Laporan	1	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	0	0	2	0	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran SKPD		Laporan	1	Kepala Sub Bagian Keuangan
4	0	0	2	0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen	1	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	0	0	2	0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen	1	Kepala Sub Bagian Keuangan
4	0	0	2	0	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>		%	<b>100</b>	<b>Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian</b>	4	0	0	2	0	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>		%	<b>100</b>	<b>Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian</b>
4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik,air dan telepon tiap bulannya		orang/Bulan	48	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik,air dan telepon tiap bulannya		orang/Bulan	48	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorairum Tenaga Administrasi Keuangan		bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorairum Tenaga Administrasi Keuangan		bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya JasaPerbaikan Peralatan Kerja		Unit	20	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya JasaPerbaikan Peralatan Kerja		Unit	20	Kepala Sub Bagian Kepegawaian



4	0	0	2	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		Bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	0	0	2	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		Bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4	0	0	2	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Paket	3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	0	0	2	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Paket	3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4	0	0	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Listrik/Penerangan kantor		Jenis	10	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	0	0	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Listrik/Penerangan kantor		Jenis	10	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4	0	0	2	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor		Unit	16	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	0	0	2	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor		Unit	16	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4	0	0	2	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		jenis	8	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	0	0	2	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		jenis	8	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4	0	0	2	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang undangan		bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	0	0	2	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang undangan		bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4	0	0	2	1	Penyediaan Makanan dan Minuman :	Makanan dan Minuman		bulan	12	Kepala Sub Bagian	4	0	0	2	1	Penyediaan Makanan dan Minuman :	Makanan dan Minuman :		bulan	12	Kepala Sub Bagian



						yang tersedia				Kepegawaian						Minuman yang tersedia				Kepegawaian	
4	0	0	2	1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah :	Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi		bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	4	0	0	2	1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah :	Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi		bulan	12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4	0	0	2	0	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkat		%	100	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	4	0	0	2	0	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkat		%	100	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
4	0	0	2	0	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Mesin Absensi Pegawai yang tersedia		Unit	6	Kepala Sub Bag Kepegawaian	4	0	0	2	0	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Mesin Absensi Pegawai yang tersedia		Unit	6	Kepala Sub Bag Kepegawaian
4	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kelengkapan dan keseragaman pakaian Dinas pegawai		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawaian	4	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kelengkapan dan keseragaman pakaian Dinas pegawai		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawaian
4	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Korpri	Keseragaman pakaian Korpri		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawaian	4	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Korpri	Keseragaman pakaian Korpri		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawaian
4	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Keseragaman pakaian hari-hari tertentu pegawai		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawaian	4	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Keseragaman pakaian hari-hari tertentu pegawai		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawaian



4	0	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	10	Kepala Sub Bag Kepegawaian	4	0	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	10	Kepala Sub Bag Kepegawaian
4	0	0			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Cakupan Layanan Adminitrasi Umum		%	30	Sekretaris Daerah Kota Bandung	4	0	0			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Cakupan Layanan Adminitrasi Umum		%	30	Sekretaris Daerah Kota Bandung
4	0	0	2	0	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD		Dokumen	17	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	4	0	0	2		Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD		Dokumen	17	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
4	0	0	2	0	Pengelolaan Perencanaan	Jumlah Dokumen RKA dan RKAP SKPD		Dokumen	2	Kerpala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran	4	0	0	2	0	Pengelolaan Perencanaan	Jumlah Dokumen RKA dan RKAP SKPD		Dokumen	2	Kerpala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
4	0	0	2	0	Pengelolaan Keuangan	Jumlah DPA dan DPPA SKPD		Dokumen	2	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	0	0	2	0	Pengelolaan Keuangan	Jumlah DPA dan DPPA SKPD		Dokumen	2	Kepala Sub Bagian Keuangan



4	0	0	2	0	Penatausahaan Pelaporan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan SKPD)		Laporan	13	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	0	0	2	0	Penatausahaan Pelaporan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan SKPD)		Laporan	13	Kepala Sub Bagian Keuangan
NON BAGIAN											NON BAGIAN										
4	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan</b>		%	<b>100</b>	<b>Sekretaris Daerah</b>	4	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan</b>		%	<b>100</b>	<b>Sekretaris Daerah</b>
4	0	0	2		Administrasi Keuangan	Prosentase Layanan Administrasi Keuangan SKPD		%	100	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	4	0	0	2		Administrasi Keuangan	Prosentase Layanan Administrasi Keuangan SKPD		%	100	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
4	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN		bulan	14	Kepala Sub Bagian Keuangan	4	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN		bulan	14	Kepala Sub Bagian Keuangan
4	0	0	2	0	Administrasi Umum	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>		%	<b>100</b>	<b>Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan</b>	4	0	0	2	0	Administrasi Umum	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>		%	<b>100</b>	<b>Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan</b>



										Kepegaw aian										Kepegaw aian	
4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon tiap bulannya		Bulan	12		4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon tiap bulannya		Bulan	12	
4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorairum Tenaga Administrasi Keuangan		bulan	12		4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorairum Tenaga Administrasi Keuangan		bulan	12	
4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharaan ya Kebersihan Kantor		bulan	12		4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharaan ya Kebersihan Kantor		bulan	12	
4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaik an Peralatan Kerja		Unit	20		4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaik an Peralatan Kerja		Unit	20	
4	0	0	2	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		Bulan	12		4	0	0	2	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		Bulan	12	
4	0	0	2	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Paket	3		4	0	0	2	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Paket	3	
4	0	0	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Listrik/Penerangan kantor		Jenis	10		4	0	0	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Listrik/Penerangan kantor		Jenis	10	



4	0	0	2	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor		Unit	16		4	0	0	2	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor		Unit	16	
4	0	0	2	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		jenis	8		4	0	0	2	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		jenis	8	
4	0	0	2	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang undangan		bulan	12		4	0	0	2	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang undangan		bulan	12	
4	0	0	2	1	Penyediaan Makanan dan Minuman :	Makanan dan Minuman yang tersedia		bulan	12		4	0	0	2	1	Penyediaan Makanan dan Minuman :	Makanan dan Minuman yang tersedia		bulan	12	
4	0	0	2	1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah :	Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi		bulan	12		4	0	0	2	1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah :	Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi		bulan	12	
4	0	0	2	1	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkat		%	100	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	4	0	0	2	1	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkat		%	100	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
4	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas	Kelengkapan dan keseragaman		Stel	30	Kepala Sub Bag	4	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas	Kelengkapan dan keseragaman		Stel	30	Kepala Sub Bag



					Beserta Perengkapannya	n pakaian Dinas pegawai				Kepegaw aian					Beserta Perengkapannya	pakaian Dinas pegawai				Kepegawa ian	
4	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Korpri	Keseragama n pakaian Korpri		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegaw aian	4	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Korpri	Keseragama n pakaian Korpri		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawa ian
4	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Keseragama n pakaian hari-hari tertentu pegawai		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegaw aian	4	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Keseragama n pakaian hari-hari tertentu pegawai		Stel	30	Kepala Sub Bag Kepegawa ian
4	0	0			<b>Program dan Kegiatan Pada Setiap Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Pengukuran IKM Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 Tentang IKM</b>	<b>Nilai</b>	<b>85</b>	<b>Asisten Administ rasi Umum dan Kepegaw aian</b>	4	0	0			<b>Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>Terselesaika nnya Permasalah an Penyelenga raan dan Pembangun an</b>	<b>Jumlah Masalah yang terselesaikan : Jumlah Masalah x 100% (  Penjelasan Permasalahan yang bersifat strategis membutuhkan kebijakan dan lintas sektoral</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Asisten Administ rasi Umum dan Kepegaw aian</b>
4	0	0	2	0	<b>Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan pelayanan administras i perkantora n</b>	<b>Jumlah Bulanan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Kepala Bagian Protokol dan Komunik asi Pimpina n</b>	4	0	0	2		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Jumlah Bulanan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Kepala Bagian Protokol dan Komunik asi Pimpina n</b>
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, Air dan Listrik	-	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Pendoku mentasia	4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	2	Kepala Sub Bagian Pendoku mentasia



4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jenis	3	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Jenis	2	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman Rapat	Jumlah bulan dalam satu tahun	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan peralatan kerja	-	Laporan	12	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jasa Pengadaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Jasa Pengadaan Cetak dan Pengandaan	Jenis	3	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Jenis	2	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	Jenis	3	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jasa Pengadaan Cetak dan Penggandaan	-	Jenis	3	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan dalam satu tahun	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan



4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	-	Jenis	2	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	0	0	2	0	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulanan Layanan Jasa	Bulan	12	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	-	Jenis	3	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Surat Menyurat	Jumlah bulan dalam satu tahun	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Rapat	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman Rapat	-	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah bulan dalam satu tahun	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4	0	0	2	1	Sub Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	3	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4	0	0			<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>Terselesaikannya permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</b>	<b>Jumlah masalah yang terselesaikan : jumlah masalah x 100% (penjelasan: permasalahan yang bersifat strategis membutuhkan kebijakan dan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian</b>	4	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan dalam satu tahun	Bulan	12	Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Tugas Pimpinan







## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan Dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, maka dalam penyusunannya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, Sekretariat Daerah berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

**Tabel 7. 1**  
**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Sebelum Reviu)**

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
2	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan (Skala 15)	12,50	12,60	12,70	12,80	12,90	13	13
3	Nilai LPPD	-	-	-	3,4023	3,4033	3,4043	3,4043
4	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
5	Nilai IKM Setda	51.61	60	70	80	90	100	100

**Tabel 7. 2**  
**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Setelah Reviu)**

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
2	Nilai EPPD	-	-	-	3,4023	3,4033	3,4043	3,4043
3	Nilai IKM Setda	51.61	60	70	87,7	87,8	87,9	87,9

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kota Bandung. Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 (*RENSTRA Perubahan Tahun 2021*) Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kota Bandung.

Visi Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023 dan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 (*RENSTRA Perubahan Tahun 2021*) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2018- 2023, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Dinas/Badan/lembaga Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Bandung dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan pemerintah daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 (*RENSTRA Perubahan*) Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah.

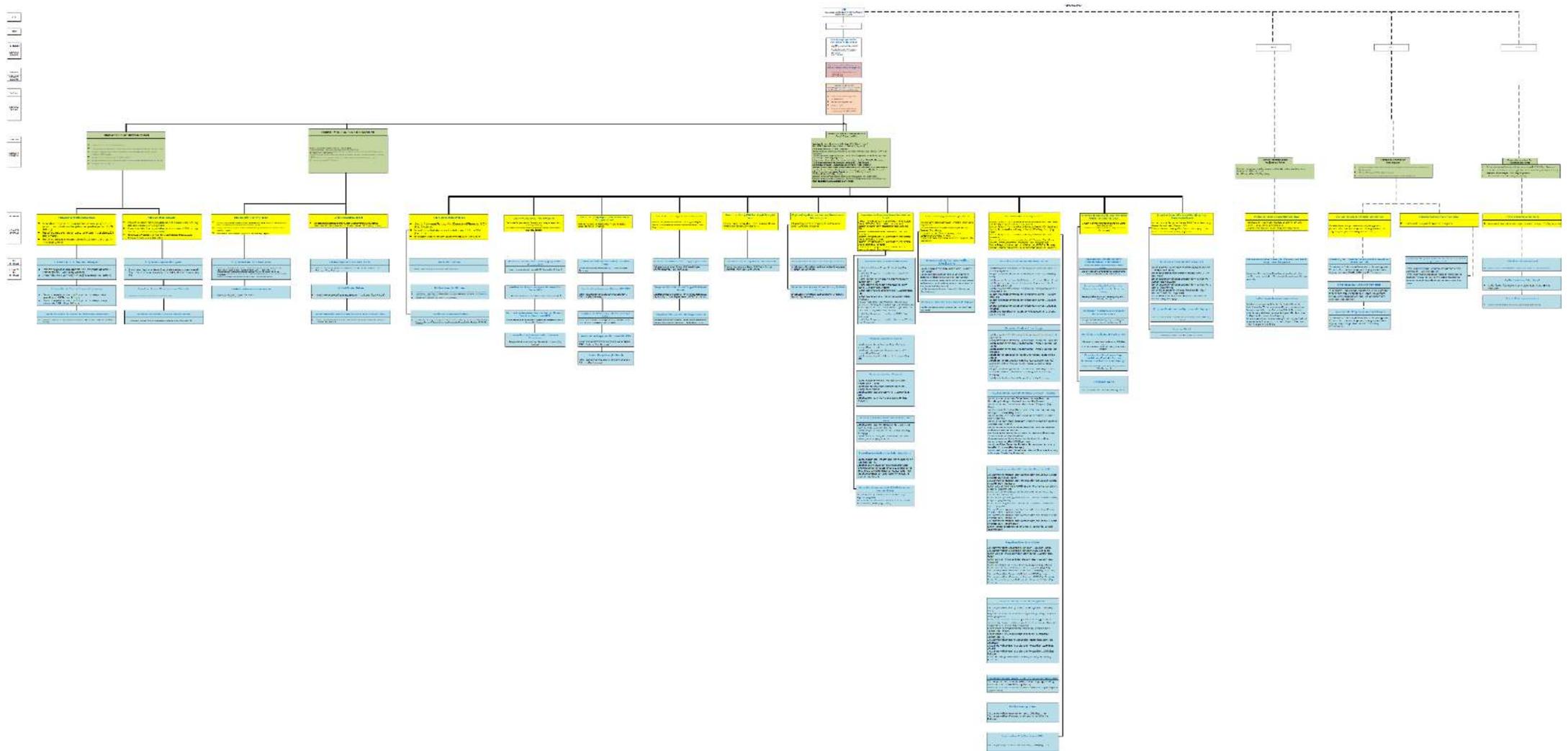
**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDUNG**



**Drs. H. EMA SUMARNA, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661207 198603 1 006

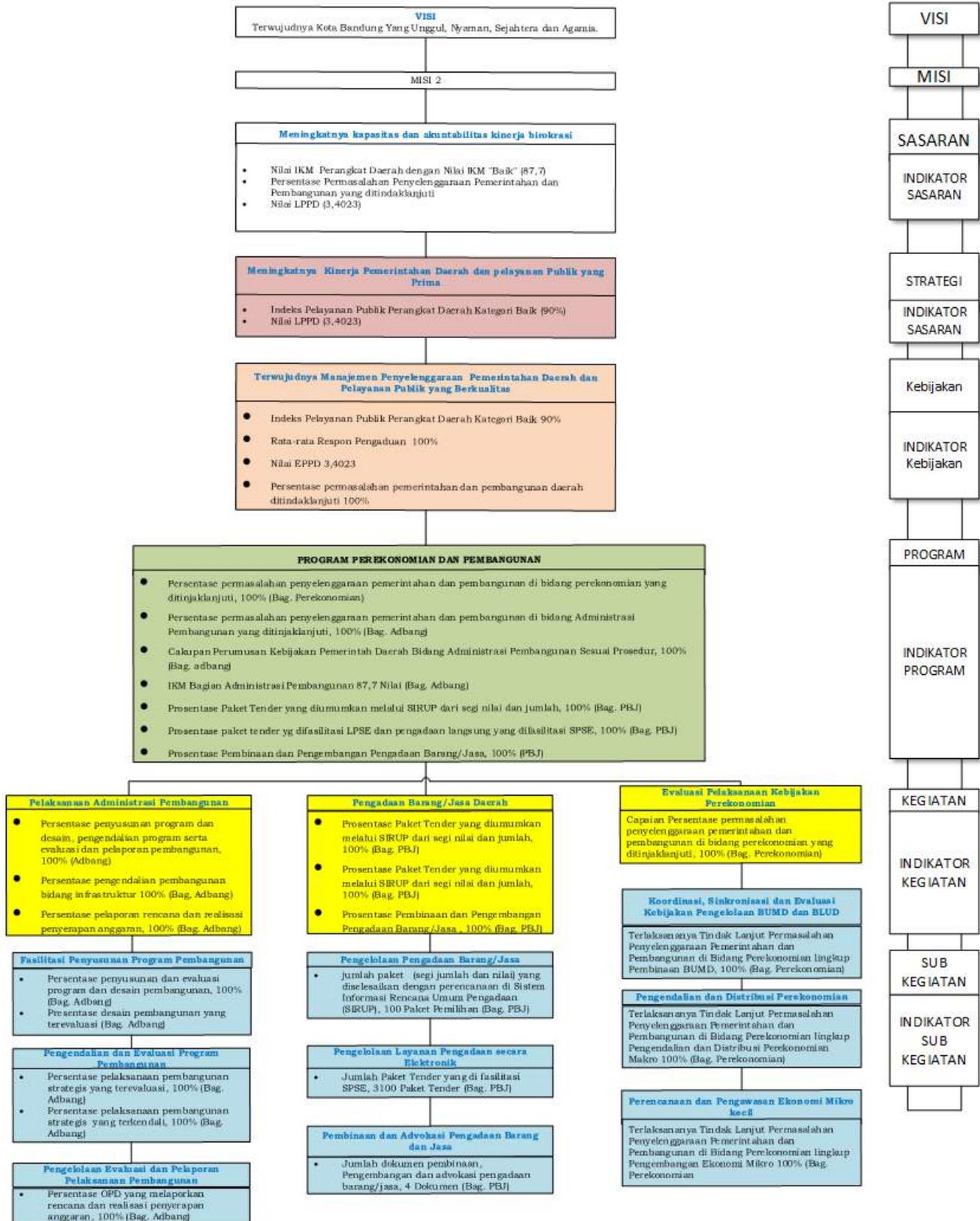


Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2021  
Sekretariat Daerah Kota Bandung  
Renstra Periode Tahun 2018-2023



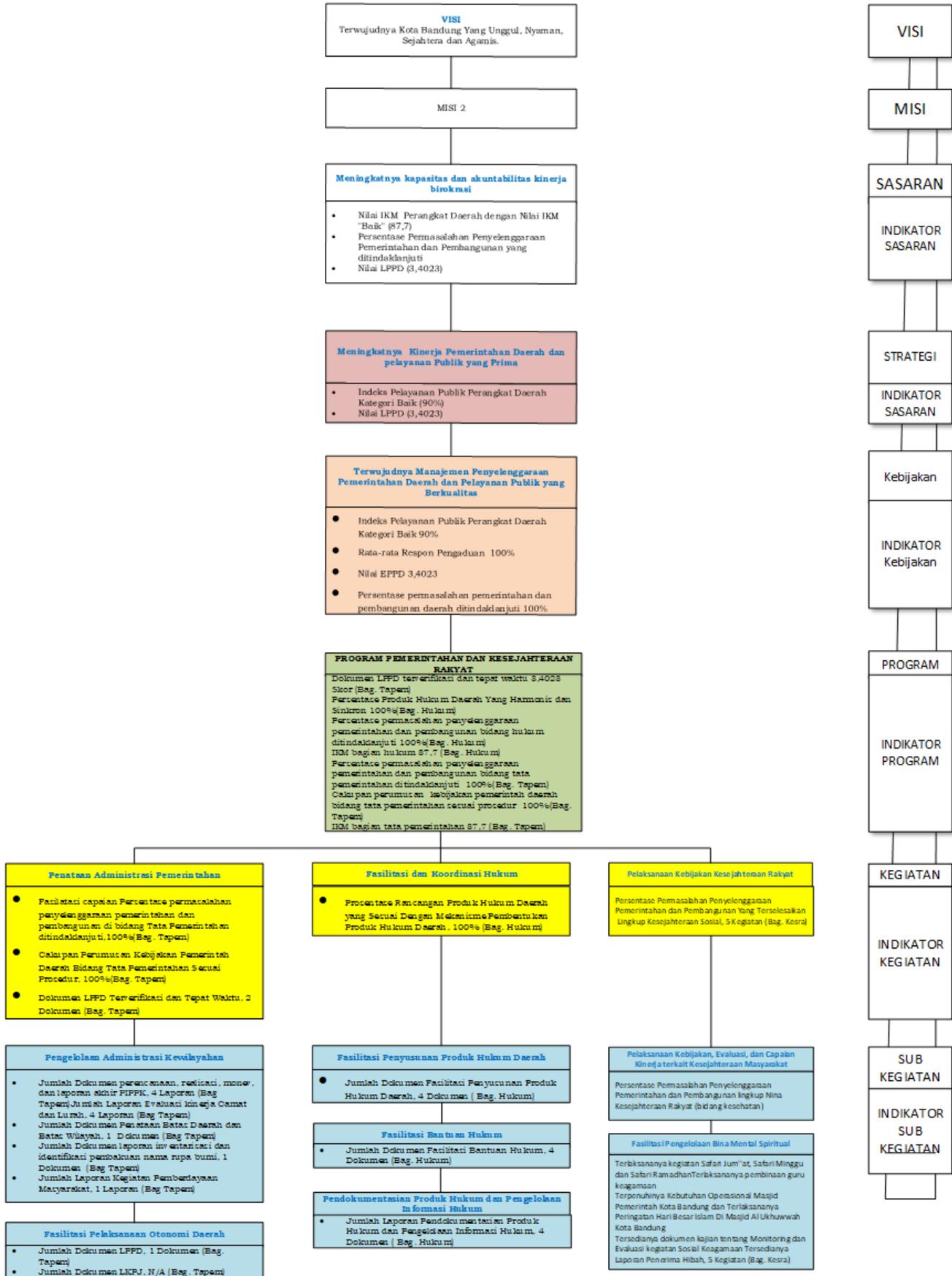


Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2021  
 Sekretariat Daerah Kota Bandung  
 Renstra Periode Tahun 2018-2023



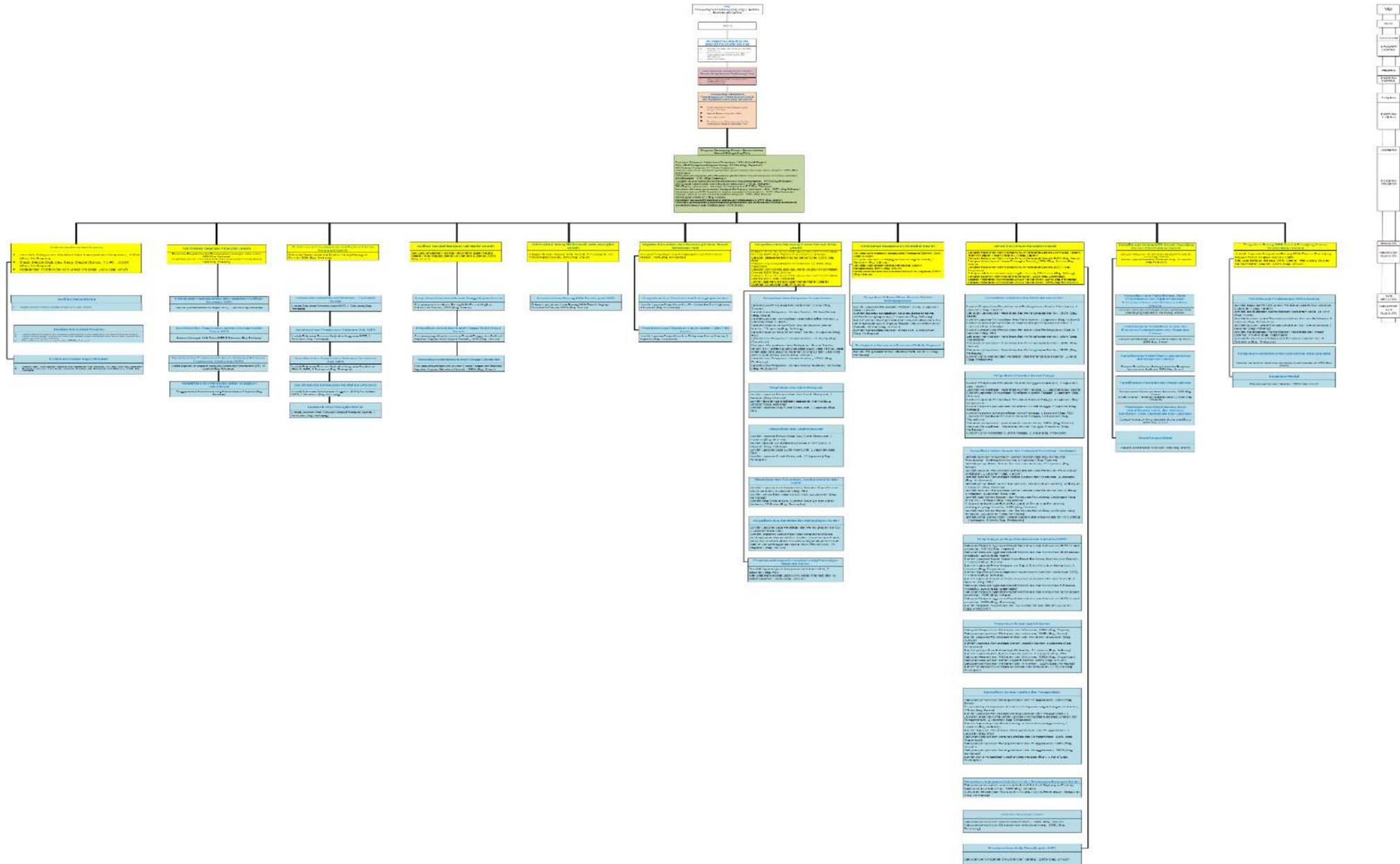


Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2021  
 Sekretariat Daerah Kota Bandung  
 Renstra Periode Tahun 2018-2023





Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2021  
Sekretariat Daerah Kota Bandung  
Renstra Periode Tahun 2018-2023





**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG**  
**TAHUN 2021**